

**INKLUSIFITAS DAN INDEPENDENSI PEMBIAYAAN
BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR UMKM**



**Diajukan oleh
Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo
19918011**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

INKLUSIFITAS DAN INDEPENDENSI PEMBIAYAAN

BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR UMKM

Tesis S-2

Program Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh

Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo

19918011

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Agustus 2023



Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaka Sriyana', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD YUSUF PERKASA WIBOWO

No. Mhs. : 19918011

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

INKLUSIFITAS DAN INDEPENDENSI PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR UMKM

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Sholawat dan Salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Mama tercinta yang selalu mensupport dan mengingatkan untuk menyelesaikan studi, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, serta dukungannya
2. Almarhum Sugeng Bowo Raharjo selaku Bapa dari penulis, walau sudah tiada namun terus memberikan berkah dan nilai-nilai yang tak terlupakan bagi penulis.
3. Kakak dan Seluruh keluarga besar yang memberikan doa dan support kepada penulis.
4. Pimpinan FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan support dan doa kepada penulis sehingga tugas akhir dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen di lingkungan FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta yang memberikan support dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Seluruh teman kerja dengan segala motivasi dan semangatnya kepada penulis, serta telah memberikan keleluasaan penulis ketika menyelesaikan tugas akhir.

7. Serta teman-teman yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir baik dari kawan-kawan MEK 19 maupun kawan-kawan S1 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Inklusifitas dan Independensi Pembiayaan Bank Umum Syariah Sektor UMKM*. Tugas akhir atau tesis ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 2 (S2) dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik berupa waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selalu mengingatkan dan memberikan support selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

5. Para dosen di lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister.
6. Seluruh Staf Program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membantu mahasiswa, terkhusus penulis dalam menjalankan proses studi.
7. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menjalani proses penyelesaian studi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah atas kebaikan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Pembiayaan BUS Sektor UMKM.....	14
2.1.2. Dana Pihak Ketiga	18
2.1.3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	20
2.1.4. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya	25
2.1.5. Independensi Pembiayaan Bank Syariah	26
2.1.6. Keuangan Inklusif.....	28
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
2.3. Kerangka Konsep Penelitian	41
2.4. Pengembangan Hipotesis	42

2.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM.....	42
2.4.2. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	42
2.4.3. Pengaruh Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM.....	43
2.4.4. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit Mikro terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	44
2.4.5. Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	45
2.4.6. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM.....	46
2.4.7. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Populasi dan Sampel	48
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	49
3.3.1 Variabel Dependen.....	49
3.3.2 Variabel Independen	50
3.3.3 Variabel Moderasi.....	52
3.4 Pengujian Hipotesis.....	54
3.4.1 Hipotesis Operasional	54
3.4.2 Model Regresi Data Panel.....	56
3.4.3 Model <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	60
3.4.4 Pengujian Hipotesis	62
BAB IV PEMBAHASAN	64
4.1. Deskripsi Profil Objek Penelitian	64
4.2. Analisis Data.....	65
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	65
4.2.2. Model Regresi Data Panel.....	65
4.2.2.1. Estimasi Regresi Data Panel	66
4.2.2.2. Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel.....	66
4.2.3. Model <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	67
4.2.4. Interpretasi Model Terbaik.....	68

4.2.5. Pengujian Hipotesis	70
4.2.5.1. Pengujian t-test	70
4.2.5.2. Pengujian F-test	71
4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (uji R^2)	72
4.3. Pembahasan	72
4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	73
4.3.2. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	74
4.3.3. Pengaruh Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	77
4.3.4. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit Mikro terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	78
4.3.5. Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	81
4.3.6. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	89
4.3.7. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	91
BAB V PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Implikasi	94
5.3. Saran	98
DAFTAR REFERENSI	100
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 Pembiayaan Syariah	16
TABEL IV.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	65
TABEL IV.2 Hasil Estimasi Model dari Common Effects, Fixed Effects, dan Random Effect	66
TABEL IV.3 Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel	67
TABEL IV.4 Hasil Estimasi Model Moderated Regression Analysis (MRA)	68
TABEL IV.5 Hasil Estimasi Persamaan Model Terbaik	69
TABEL IV.6 Ringkasan Hasil dan Kesesuaian dengan Hipotesis Utama	72
TABEL IV.7 Statistik Deskriptif Dimensi Keuangan inklusif (D)	82
TABEL IV.8 Statistik Deskriptif Indeks Keuangan inklusif Syariah (d)	85
TABEL IV.9 Nilai ISFI di Setiap Provinsi di Indonesia	88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia	3
GAMBAR II.1 Kerangka Konsep Penelitian	41
GAMBAR III.1 Kerangka Kerja Identifikasi Variabel.....	60
GAMBAR IV.1 Nilai Aktual Dimensi Banking Penetration (D1).....	83
GAMBAR IV.2 Nilai Aktual Dimensi Availability of Banking Services (D2)	84
GAMBAR IV.3 Nilai Aktual Dimensi Usage (D3).....	85
GAMBAR IV.4 Nilai Rata-Rata ISFI setiap Provinsi di Indonesia	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Aktual Dimensi 1	107
Lampiran 2. Nilai Aktual Dimensi 2	111
Lampiran 3. Nilai Aktual Dimensi 3	114
Lampiran 4. Nilai dimensi 1	118
Lampiran 5. Nilai dimensi 2	122
Lampiran 6. Nilai dimensi 3	125
Lampiran 7. Nilai X1	129
Lampiran 8. Nilai X2	132
Lampiran 9. Nilai ISFI	135
Lampiran 10. Variabel Dependen dan Variabel Independen	138
Lampiran 11. Estimasi Regresi Data Panel	159
Lampiran 12. Pemilihan Model	162
Lampiran 13. Uji Model Moderated Regression Analysis (MRA)	163
Lampiran 14. Model Terbaik	165

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inklusifitas dan Independensi Pembiayaan Bank Umum Syariah Sektor UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel untuk mengestimasi model empiris yang melibatkan 33 provinsi di Indonesia dengan periode Juli 2018 s.d. Desember 2022. Penelitian ini menemukan bahwa model *fixed effects* adalah model terbaik untuk menjelaskan inklusifitas dan independensi BUS Sektor UMKM. Adapun Hasil Uji Model *Moderated Regression Analysis* (MRA) mengidentifikasi bahwa Keuangan Inklusif merupakan variabel *quasi moderator*. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen adalah prediktor yang baik untuk model pembiayaan BUS Sektor UMKM. Berdasarkan interpretasi dengan menggunakan model terbaik diketahui bahwa DPK, NPF, Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya, Keuangan Inklusif berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Selain itu, Keuangan Inklusif memperlemah hubungan positif dari pengaruh DPK terhadap pembiayaan BUS Sektor UMKM. Sebaliknya, Keuangan Inklusif memperlemah hubungan negatif dari pengaruh NPF berpengaruh Pembiayaan BUS sektor UMKM. Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai rata-rata nilai ISFI dari 33 Provinsi di Indonesia sebesar 0,13 yang termasuk kategori rendah dimana provinsi Aceh merupakan Provinsi dengan nilai ISFI tertinggi yakni 0,79. Penelitian ini juga mengungkapkan tentang keunikan Bank Syariah yang menerapkan nilai-nilai Syariah dalam pengelolaan bisnisnya tercermin dari pembiayaan BUS Sektor UMKM yang menerapkan akad berbasis aset dan ekuitas yang tidak terpengaruh oleh Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro sehingga membuktikan Independensi dari Pembiayaan BUS Sektor UMKM.

Kata Kunci: Keuangan Inklusif, Independensi Bank Syariah, Pembiayaan UMKM, DPK, NPF, SBDK

ABSTRACT

This study aims to analyze the Inclusivity and Independency of Islamic Commercial Bank Financing in the MSME Sector. This study uses a panel data approach to estimate an empirical model involving 33 provinces in Indonesia with a period of July 2018 to December 2022. This study found that the fixed effects model is the best model to explain the inclusivity and Independency of Islamic Commercial Banks in the MSME sector. The Moderated Regression Analysis (MRA) Model Test results identify that Inclusive Finance is a quasi moderator variable. Overall, the results show that all independent variables are good predictors for the financing model of Islamic commercial banks in the MSME sector. Based on the interpretation using the best model, it is known that DPK, NPF, Islamic commercial bank financing in the MSME sector in the previous period, financial inclusion has a significant effect on Islamic commercial bank financing in the MSME sector. In addition, financial inclusion weakens the positive relationship of the effect of DPK on financing of BUS in the MSME sector. Conversely, financial inclusion weakens the negative relationship of the effect of NPF on BUS Financing in the MSME sector. This study reveals that the average value of the ISFI value of 33 provinces in Indonesia is 0.13 which is in the low category where Aceh province is the province with the highest ISFI value of 0.79. This study also reveals the unique characteristics of Islamic Banks that apply Sharia values in managing their business as reflected in the financing of Islamic commercial banks in the MSME sector that apply asset and equity-based contracts that are not affected by the Basic Interest Rate for Micro segment loans, thus proving the Independence of BUS Financing in the MSME Sector.

Keywords: *financial inclusion, Islamic Bank Independence, MSME Financing, DPK, NPF, SBDK*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

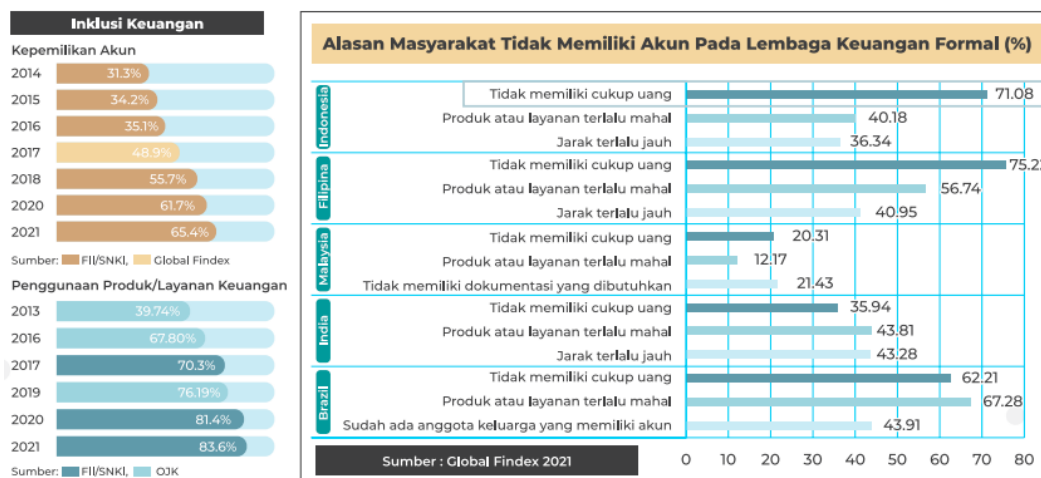
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan kunci penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang, karena mereka mengatur aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan (Shelly et al., 2020). Di India, UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi dengan kontribusi yang signifikan dalam GDP, lapangan kerja, ekspor, pencapaian SDGs, dan pengembangan berwawasan lingkungan (Shelly et al., 2020). Penelitian di Nigeria juga menunjukkan bahwa UMKM memberikan peluang kerja, pelatihan, dan pemanfaatan sumber daya lokal (Racheal & Uju, 2018).

Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama selama krisis keuangan dan pandemi Covid-19. UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berperan dalam pemerataan tingkat ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penerimaan devisa negara (Sulastri, 2022). Keberadaan UMKM juga berdampak pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, perdagangan luar negeri melalui ekspor, serta kontribusi pajak (Reswita et al., 2021). UMKM juga menjadi pilar sistem keuangan dan stabilitas ekonomi dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi (Bank Indonesia, 2023c). Bahkan UMKM menyumbang sekitar 60,51% terhadap PDB dan menyerap hampir 96,92% dari total angkatan kerja nasional (Limanseto, 2023b)

Di balik peran besar yang dimiliki, UMKM tentu tidak lepas dari permasalahan yang dihadapinya yakni dalam hal pengembangan usaha berupa keterbatasan akses terhadap layanan keuangan berupa pembiayaan. (Ahmed et al., 2017; Bowo Setiyono, 2011; Disli et al., 2023; Huda, 2012; Nendi, 2022; Uyun, 2022) Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan alat penilaian kredit utama bagi lembaga keuangan. (Bank Indonesia, 2023c) Selain hal tersebut, kendala pada akses pembiayaan dapat bersifat teknis, seperti kurangnya atau tidak adanya jaminan yang cukup, maupun non-teknis, seperti keterbatasan akses informasi terkait perbankan. (Bank Indonesia, 2023b)

Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan berupa pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM merupakan salah satu fokus dari Strategi Nasional Keuangan Inklusi di Indonesia yakni dalam meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap layanan keuangan formal. Keuangan inklusif berarti bahwa setiap orang memiliki akses ke berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses juga berarti bahwa orang dapat menggunakan layanan dan/atau membeli produk dari lembaga keuangan formal. (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020)

GAMBAR I.1 Indeks Inklusi Keuangan Indonesia



Sumber : (Bank Indonesia, 2023a)

Dalam penelitian Nugroho (2021) menjelaskan mengenai Inklusi keuangan perbankan syariah mencakup tiga aspek utama, yaitu: penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan layanan tersebut. Penetrasi perbankan mengacu pada sejauh mana sistem perbankan syariah dapat diakses oleh masyarakat, diukur dengan jumlah rekening bank syariah per 1000 orang. Ketersediaan layanan perbankan mengacu pada ketersediaan jasa pelayanan perbankan syariah bagi masyarakat, diukur dengan jumlah kantor cabang bank syariah per 1000 orang. Sedangkan penggunaan mencerminkan sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan perbankan syariah, diukur berdasarkan volume pembiayaan dan deposito sebagai persentase dari produk domestik regional bruto. Adapun dasar tiga aspek tersebut berdasarkan penelitian dari Sarma (2012)

Nugroho (2021) menjelaskan pengaruh ketersediaan layanan bank syariah positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, yang berarti kinerja UMKM akan meningkat jika ketersediaan layanan bank syariah meningkat, dan sebaliknya jika

ketersediaan layanan bank syariah menurun, kinerja UMKM akan menurun. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Ono et al., 2016) menyimpulkan bahwa kedekatan kantor cabang bank berpengaruh pada tingkat pemanfaatan jasa perbankan. Faktor jarak antara bank dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi faktor krusial dalam menjaga hubungan berkelanjutan antara bank dan UMKM.

Bertambahnya jumlah cabang bank Syariah, dapat mendekatkan bank dengan UMKM yang banyak berlokasi di daerah bukan di pusat kota, sehingga mempermudah UMKM dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah untuk meningkatkan keberhasilan bisnis mereka. Dengan adanya kantor cabang bank syariah di daerah-daerah ini, jarak transportasi akan berkurang, mengurangi biaya transportasi, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan dan kinerja UMKM (Degryse & Ongena, 2005).

Penelitian (Evanoff, 1988), yang menyatakan bahwa keberadaan banyak kantor cabang mempermudah akses UMKM terhadap layanan perbankan, memfasilitasi transaksi bisnis UMKM, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM. Oleh karena itu, kehadiran kantor cabang bank syariah yang dekat dengan lokasi para pengusaha UMKM diharapkan dapat menjadi solusi dalam mendukung pembiayaan dan pertumbuhan sektor UMKM.

Penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah (selanjutnya di singkat BUS) Sektor UMKM tentu tidak terlepas dari dana pihak ketiga (selanjutnya di singkat DPK) yang dimiliki oleh bank Syariah sebagai sebuah Lembaga intermediasi. Dalam

sebuah penelitian dari Pradesyah & Triandhini (2021) menyebutkan dengan meningkatnya jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah juga akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, salah satu tujuan bank adalah mencari keuntungan, sehingga bank tidak membiarkan dana yang terkumpul begitu saja. Bank akan cenderung menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal pula. Untuk dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal, bank harus memiliki kemampuan untuk menghimpun DPK sebab sumber likuiditas utama penyaluran pembiayaan adalah DPK. Namun temuan ini berbeda dengan penelitian oleh (Saputri & Wibowo, 2018; Suhel et al., 2018) yang menemukan hasil berkebalikan dan (I. Setiawan et al., 2023) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh DPK terhadap distribusi pembiayaan UMKM.

Dalam menyalurkan pembiayaan pada Sektor UMKM, BUS juga melihat bagaimana kemampuan UMKM dalam membayar kewajiban yang telah di sepakati. Adapun jika nasabah mengalami keterlambatan melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak bank Syariah maka rasio Non Performing Financing (selanjutnya disingkat NPF) sebuah bank Syariah akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan Rasio NPF merupakan sebuah indikator yang dapat menilai kemampuan seorang nasabah dalam membayar kembali kewajiban beserta margin yang telah disepakati. Ketika NPF besar mengakibatkan sebuah bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sehingga pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah pembiayaan UMKM di perbankan Syariah (Suhel et al., 2018). Namun penelitian ini berkebalikan dengan hasil temuan dari (Amalia & Azizuddin, 2022; I. Setiawan et al., 2023)

Dalam analisis *Variance Decomposition* menunjukkan hasil bahwa variabel Pembiayaan Modal Kerja UMKM memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Pembiayaan Modal Kerja UMKM itu sendiri. Analisis VDC menjelaskan bagaimana perubahan satu variabel dipengaruhi oleh perubahan variabel lain (Indrawati & Basuki, 2017). Asngari & Andaiyani, (2018) menjelaskan jika rata-rata pembiayaan per cabang periode sebelumnya meningkat maka pembiayaan UMKM juga akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indriani (2018) dengan menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel autoregressive, terlihat bahwa tren pembiayaan pada periode 2, 3 dan 6 bulan sebelumnya menunjukkan dampak positif terhadap pembiayaan periode sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah pertumbuhan pembiayaan periode sebelumnya dianggap sebagai salah satu dasar bagi bank syariah dalam strategi menjaga pertumbuhan pembiayaan mereka ke depan.

Pembiayaan BUS pada sektor UMKM diharapkan memiliki independensi di tengah penerapan system perbankan ganda. Independensi yang dimaksud yakni tidak terpengaruh oleh suku bunga kredit dari bank konvensional sebagai competitor. Sebab bisnis keuangan Syariah dalam hal ini BUS menekankan pengalihan aset fisik dan melarang riba. Selain itu, bank syariah dapat dikatakan independen atau tidak bergantung pada suku bunga konvensional karena pembiayaan yang sesuai dengan Syariah bergantung pada aset dan liabilitas. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang sesuai dengan Syariah bergantung pada pembagian keuntungan, kerugian, dan risiko. (Beck et al., 2010)

Namun, Studi di Malaysia menggambarkan bahwa tingkat suku bunga deposito dan pembiayaan dalam bank Islam dipengaruhi oleh tingkat suku bunga konvensional dan kebijakan Bank Negara Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa bank Islam melayani pelanggan yang mengutamakan keuntungan (Saeed et al., 2023). Temuan lain dari studi di Pakistan menunjukkan adanya hubungan signifikan dalam jangka panjang dan pendek antara volatilitas suku bunga dan pembiayaan industri perbankan Islam, memberikan bukti untuk pergerakan bersama dan konvergensi. Oleh karena itu, walaupun beroperasi berdasarkan prinsip bebas bunga, pembiayaan dalam bank Islam yang berfungsi dalam sistem perbankan ganda terkena risiko suku bunga, terutama karena ketergantungan pada acuan suku bunga, sehingga membuat bank Islam rentan terhadap risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan (Nouman et al., 2022).

Studi mengenai pembiayaan pada sektor UMKM menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan terkait pengaruh DPK, NPF, dan suku bunga terhadap pembiayaan UMKM, serta penemuan tentang peran Keuangan Inklusif dan Pembiayaan UMKM dalam periode sebelumnya terhadap pembiayaan UMKM. Perbedaan pendekatan dalam penelitian ini melibatkan periode penelitian yang lebih baru serta penggunaan variabel yang berbeda. Penelitian ini memiliki daya tarik karena mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang mencerminkan ketidakselarasan hasil. Pendekatan baru dalam penelitian ini adalah analisis tentang inklusifitas dan independensi dalam pembiayaan BUS sektor UMKM, yang kemudian diuji melalui Moderated Regression Analysis (MRA) dengan inklusifitas sebagai variabel

moderasi dari DPK dan NPF dalam mempengaruhi pembiayaan BUS sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak pembiayaan BUS sektor UMKM pada periode sebelumnya terhadap pembiayaan di masa kini. Dengan mempertimbangkan informasi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Inklusifitas dan Independensi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Sektor UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian ini mencakup analisis variabel-variabel yang signifikan dalam mempengaruhi pembiayaan BUS pada Sektor UMKM dan melihat peran Inklusifitas BUS sebagai variabel moderasi, serta Independensi dari pembiayaan BUS sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak DPK, NPF, Keuangan Inklusif, Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya, Independensi Pembiayaan BUS yang di proksikan dengan SBDK Mikro Bank Konvensional, dengan Keuangan Inklusi sebagai factor moderasi dengan memperhatikan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?
3. Apakah Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?
4. Apakah Keuangan Inklusif berpengaruh terhadap pembiayaan BUS Sektor UMKM?

5. Apakah Keuangan Inklusif mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?
6. Apakah Keuangan Inklusif mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?
7. Apakah SBDK Mikro Bank Konvensional berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
2. Menganalisis pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
3. Menganalisis pengaruh Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
4. Menganalisis pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
5. Menganalisis pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi pengaruh DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
6. Menganalisis pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM
7. Menganalisis pengaruh SBDK Mikro Bank Konvensional terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun empiris. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

1. Manfaat Akademis

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang Pengaruh dari DPK, NPF (NPF), Pembiayaan UMKM periode sebelumnya, Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran Keuangan Inklusif sebagai pemoderasi dan dampaknya terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM, serta Independensi dari Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Melalui analisis dan temuan penelitian, diharapkan dapat diberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang Inklusifitas dan Independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi mereka yang tertarik dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam, sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti berikutnya. Khususnya, penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga terkait dengan Inklusifitas dan Independensi Pembiayaan BUS Sektor UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam literatur Ekonomi dan keuangan Islam dimana kemudian menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Inklusifitas dan Independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM.

1.4.2 Manfaat secara Empiris

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang berharga bagi Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia, terutama dalam merancang kebijakan untuk pengembangan Perbankan Syariah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan potensi pengembangan perbankan syariah, khususnya pada pembiayaan BUS Sektor UMKM. Masukan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh OJK dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perbankan Syariah dalam mendorong pembiayaan UMKM.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi OJK dalam proses perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pembiayaan UMKM bagi perbankan syariah, khususnya BUS.

2. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang berharga bagi Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) sebagai pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial di Indonesia, terutama dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang potensi pengembangan UMKM melalui penyediaan akses keuangan oleh perbankan syariah, Masukan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh BI untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah khususnya mengembangkan kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan pihak lainnya dalam mendorong pembiayaan UMKM.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan kepada penulis tentang analisis Inklusifitas dan Independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian

1.5.1 BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum penelitian serta akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.5.2 BAB II Landasan Teori

Bab ini akan membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang akan diuji.

1.5.3 BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang populasi sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian dan metode analisis data.

1.5.4 BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang terkait dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

1.5.5 BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan sasaran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dan pencapaian tujuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembiayaan BUS Sektor UMKM

BUS adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan layanan jasa lalu lintas pembayaran. Tujuan dari Perbankan Syariah adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUS berfungsi sebagai intermediasi dimana menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. (UU 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, BUS memberikan Pembiayaan yang merupakan bentuk penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan dana tersebut, yang mencakup transaksi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dengan ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik, serta transaksi jual beli meliputi piutang murabahah, salam, dan istishna', dan juga transaksi pinjam meminjam dengan piutang qardh. Selain itu, juga termasuk transaksi sewa-menyewa jasa melalui ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan semacam ini berlangsung berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat UUS) dengan pihak lain, dan mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan atau fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau berdasarkan sistem bagi hasil. (UU 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

PP 7/2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (2021) menjelaskan mengenai Pembiayaan pada Sektor UMKM adalah penyediaan dana untuk pengembangan dan penguatan modal UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank. Adapun Kriteria yang menjadi dasar teoritis dalam mengklasifikasikan dan mengidentifikasi status ukuran dan skala usaha dalam kategori mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, dan untuk memenuhi kriteria Usaha Mikro, modal usahanya harus berada dalam kisaran hingga satu miliar rupiah tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha ini juga dapat diidentifikasi berdasarkan hasil penjualan tahunannya, yang tidak boleh melebihi dua miliar rupiah.
- 2) Usaha Kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau usaha besar. Untuk memenuhi kriteria Usaha Kecil, modal usahanya harus lebih dari satu miliar rupiah hingga lima miliar rupiah, tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, hasil penjualan tahunan dari usaha ini dapat berada dalam kisaran lebih dari dua miliar rupiah hingga lima belas miliar rupiah.
- 3) Usaha Menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dan tidak terafiliasi dengan Usaha Kecil atau usaha besar. Untuk

memenuhi kriteria Usaha Menengah, modal usahanya harus lebih dari lima miliar rupiah hingga lima puluh miliar rupiah, tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan dari usaha ini dapat berada dalam kisaran lebih dari lima belas miliar rupiah hingga lima puluh miliar rupiah.

Dalam usaha menyediakan pembiayaan untuk sektor UMKM di atas, BUS memiliki peran penting dalam meningkatkan keuangan inklusif, seperti yang telah diidentifikasi dengan menggunakan opsi pembiayaan syariah serta manfaat untuk Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UKM) berikut ini:

TABEL I.1 Pembiayaan Syariah

Tipe	Opsi Pembiayaan Syariah	Definisi	Manfaat untuk UKM (selain yang sesuai dengan Syariah)
Berbasis Aset	Murabahah	Murabahah adalah kontrak antara pemodal dan nasabah di mana pemodal membeli asset yang dibutuhkan oleh klien dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan biaya yang mencakup margin keuntungan yang diungkapkan untuk dibayar kembali, biasanya dalam bentuk angsuran.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pembiayaan tetap selama jangka waktu pembiayaan. - Transparansi penuh mengenai harga dan mark-up. - Berguna untuk pembiayaan jangka pendek. - Manajemen UKM dan UMKM tetap mandiri. - Idealnya mengatasi persyaratan jaminan dengan menegakkan penjualan aset dalam kasus gagal bayar.

	Ijarah	Ijarah, atau sewa syariah, adalah transaksi di mana satu pihak menyewakan suatu aset seperti peralatan yang akan digunakan oleh klien dengan biaya sewa yang disepakati. Bentuk lain dari Ijarah - Ijarah wa Iqtina - adalah sewa dengan opsi pembelian; seorang pembiaya menyewakan aset kepada klien dengan biaya sewa yang disepakati, sementara hanya satu dari pihak secara sepihak membeli atau menjual aset tersebut pada akhir periode sewa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memungkinkan pembiayaan bahkan tanpa adanya jaminan dan riwayat kredit karena lessor (pihak yang menyewakan) memiliki kepemilikan atas aset dan dapat mengambil kembali aset dalam kasus gagal bayar. - Berguna untuk pembiayaan jangka menengah dan panjang. - Dokumentasi dan proses yang sederhana.
	Salam	Salam adalah kontrak penjualan di masa depan di mana pembayaran di muka dibuat untuk komoditas (terutama hasil pertanian) yang akan diserahkan pada tanggal yang akan datang. Salam dapat digunakan untuk menyediakan modal kerja bagi UKM dan UMKM.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan modal kerja sesuai dengan prinsip syariah. - Menguntungkan untuk kegiatan impor dan ekspor pertanian. - Berguna untuk pembiayaan jangka pendek.
Berbasis Ekuitas	Musyarakah	Musharakah adalah perjanjian kemitraan yang dibentuk oleh dua atau lebih pihak di mana semua mitra menyediakan modal untuk usaha patungan untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Keuntungan didistribusikan di antara para mitra berdasarkan rasio yang disepakati	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagi keuntungan dan kerugian - Kemampuan untuk menerima persentase keuntungan yang lebih tinggi daripada kontribusi modal para pengusaha - Berguna untuk pembiayaan jangka panjang.

		sebelumnya, sementara kerugian harus ditanggung oleh para mitra sesuai dengan kontribusi modal mereka.	
	Diminishing Musharakah	Diminishing Musharakah adalah sebuah perjanjian Musharakah di mana pengusaha berjanji untuk membeli saham investasi dari mitra-mitra lainnya secara bertahap hingga pada akhirnya pengusaha memiliki 100 persen kepemilikan atas usaha patungan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagi keuntungan dan kerugian serta pembelian kembali saham berdasarkan harga pasar. - Kemampuan untuk mempertahankan UKM dan UMKM atau startup dalam jangka waktu yang panjang; terutama penting bagi bisnis keluarga. - Berguna untuk pembiayaan jembatan; tanpa harus menyerahkan ekuitas dalam jangka menengah hingga panjang.
	Mudharabah	Mudharabah adalah bentuk kemitraan antara penyedia modal (Rab-ul-Mal) dan seorang pengusaha yang bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib). Keuntungan dapat didistribusikan dalam rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal.	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagi keuntungan saja - Tidak perlu menyumbangkan modal untuk usaha patungan, berbeda dengan Musharakah - Kemampuan untuk bernegosiasi tentang persentase keuntungan - Berguna untuk pembiayaan jangka panjang.

Sumber : Malaysia International Islamic Finance Centre (2016)

2.1.2. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan dana simpanan atau investasi yang tidak terikat, yang dipercayakan oleh nasabah yang bukan bank kepada Bank Syariah dan/atau UUS

berdasarkan akad wadiah atau mudharabah. Dana tersebut disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang setara dengan itu. (OJK, 2015)

DPK BUS dan UUS terdiri dari beberapa komponen, yaitu (OJK, 2015):

1. Dana Simpanan Wadiah:
 - a. Giro Wadiah: merupakan dana titipan yang dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya.
 - b. Tabungan Wadiah: merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, dan bank harus mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah menghendaki.
2. Dana Investasi Non Profit Sharing:
 - a. Tabungan Mudharabah: terdiri dari tabungan mudharabah dan tabungan lainnya. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tanpa dapat ditarik dengan cek, dan bank memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa batasan persyaratan. Tabungan lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
 - b. Deposito Mudharabah: simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tanpa dapat ditarik dengan cek, dan bank memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa batasan persyaratan. Deposito mudharabah memiliki beragam

jangka waktu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan di atas 12 bulan.

3. Dana Investasi Profit Sharing: Giro, Tabungan, dan Deposito

2.1.3. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF digunakan untuk mengukur tingkat masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank Syariah Adapun Kriteria penilaian peringkat sebagai berikut (Lampiran SEBI No.9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 2007):

- Peringkat 1 (Sangat Baik): $NPF < 2\%$
- Peringkat 2 (Baik): $2\% \leq NPF < 5\%$
- Peringkat 3 (Cukup Baik): $5\% \leq NPF < 8\%$
- Peringkat 4 (Kurang Baik): $8\% \leq NPF < 12\%$
- Peringkat 5 (Tidak Baik): $NPF \geq 12\%$

OJK (2015) memaparkan bahwa NPF merupakan rasio yang menghitung proporsi pembiayaan dengan status non lancar terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Berikut detail penjelasan dari penjelasan NPF:

- Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah, piutang istishna', piutang sewa, piutang qardh, pembiayaan lainnya, dan pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.
- Pembiayaan yang termasuk dalam kategori non lancar mencakup pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet.

- Total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mencakup pembiayaan yang masuk dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berikut merupakan penetapan kualitas pembiayaan berdasarkan akad sesuai dengan kemampuan membayar (POJK 2 - 03 - 2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2022):

1. Akad bagi hasil yakni kesesuaian antara pembayaran angsuran pokok dan porsi hasil
 - a. Terdapat pembayaran angsuran pokok
 - 1) Lancar: Pembayaran angsuran pokok yang dilakukan tepat waktu; atau Pembiayaan yang belum mencapai batas waktu jatuh tempo; dan Realisasi Bagi Hasil lebih dari atau sama dengan 80% dari proyeksi Bagi Hasil.
 - 2) Dalam Perhatian Khusus: Pembayaran angsuran pokok yang tertunda hingga 90 hari; atau pelunasan pokok yang tertunda hingga 30 hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil yang berada di rentang 50% hingga 80%.
 - 3) Kurang Lancar: Pembayaran angsuran pokok yang tertunda melebihi 90 (sembilan puluh) hari hingga 120 (seratus dua puluh) hari; atau pelunasan pokok yang tertunda melebihi 30 (tiga puluh) hari hingga 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di rentang 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode hingga 6 (enam) periode

- pembayaran terakumulasi; atau Rencana Bagi Hasil yang kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil hingga 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.
- 4) Diragukan: Pembayaran angsuran pokok yang tertunda melebihi 120 (seratus dua puluh) hari hingga 180 (seratus delapan puluh) hari; atau pelunasan pokok yang tertunda melebihi 60 (enam puluh) hari hingga 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di rentang 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode hingga 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau Realisasi Bagi Hasil yang kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode hingga 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.
- 5) Macet: Pembayaran angsuran pokok yang tertunda melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari; atau pelunasan pokok yang tertunda melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di rentang 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau Realisasi Bagi Hasil yang kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.

- b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok
- 1) Lancar: Pembiayaan yang masih dalam masa tenggang; dan Realisasi Bagi Hasil setidaknya mencapai lebih dari atau sama dengan 80% dari Proyeksi Bagi Hasil.
 - 2) Dalam Perhatian Khusus: Pelunasan pokok yang tertunda sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di antara 50% hingga 80%.
 - 3) Kurang Lancar: Pelunasan pokok yang tertunda telah melebihi 30 (tiga puluh) hari hingga 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau tingkat Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di antara 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode hingga 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau Realisasi Bagi Hasil kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil dalam jangka waktu hingga 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.
 - 4) Diragukan: Pelunasan pokok yang tertunda telah melebihi 60 (enam puluh) hari hingga 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau tingkat Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di antara 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode hingga 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau Realisasi Bagi Hasil kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode hingga 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.

- 5) Macet: Pelunasan pokok yang tertunda telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau Realisasi Bagi Hasil/Proyeksi Bagi Hasil berada di antara 50% hingga 80% dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau Realisasi Bagi Hasil kurang dari atau sama dengan 50% dari Proyeksi Bagi Hasil dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.
2. Akad Jual Beli dan Pinjam Meminjam yakni Ketepatan pembayaran pokok dan margin
 - a. Lancar: Angsuran dibayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
 - b. Dalam Perhatian Khusus: Angsuran pokok dan/atau margin telah tertunggak namun belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Kurang Lancar: Angsuran pokok dan/atau margin telah tertunggak selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari hingga 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - d. Diragukan: Pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah tertunggak selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari hingga 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
 - e. Macet: Selama lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pembayaran angsuran pokok dan/atau margin belum dibayar.
 3. Akad Sewa Menyewa yakni ketepatan pembayaran sewa
 - a. Lancar: Sewa dibayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan.

- b. Dalam Perhatian Khusus: Adanya Tunggakan Pembayaran sewa belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Kurang Lancar: Pembayaran Sewa telah tertunggak selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari hingga 180 (seratus delapan puluh) hari.
- d. Diragukan: Pembayaran sewa telah tertunggak selama lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari hingga 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- e. Macet: Selama lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pembayaran **sewa belum dibayar.**

2.1.4. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya

Pembiayaan UMKM pada periode sebelumnya berperan penting dalam membentuk pola pembiayaan UMKM pada masa sekarang. Riwayat pembiayaan yang positif pada masa lalu cenderung meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada UMKM. Sebagai hasilnya, hubungan yang kuat antara pembiayaan UMKM pada periode sebelumnya dan pembiayaan saat ini menjadi faktor kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Analisis variance decomposition (VDC) dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi perubahan variabel lain. Menurut hasil analisis VDC, variabel Pembiayaan Modal Kerja UMKM berkontribusi terbesar terhadap pembentukan Pembiayaan Modal Kerja UMKM itu sendiri (Indrawati & Basuki, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sejarah pertumbuhan pembiayaan masa lalu akan digunakan sebagai salah satu standar bagi bank syariah dalam upaya mereka untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan mereka ke

depan (Indriani & Priyanto, 2018). Jadi, pembiayaan UMKM akan meningkat jika rata-rata pembiayaan pada setiap kantor cabang periode sebelumnya meningkat, dan sebaliknya (Suhel et al., 2018).

2.1.5. Independensi Pembiayaan Bank Syariah

Produk-produk pembiayaan bank syariah, terutama pembiayaan berbasis bagi hasil, merupakan bentuk pembiayaan yang memberikan manfaat secara komersial. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian, sementara nasabah juga berbagi keuntungan, tujuannya adalah untuk mengalirkan investasi dan tabungan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif. Pembiayaan investasi bersama (*investment financing*) dilakukan dengan mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sedangkan pembiayaan investasi sendiri (*trade financing*) diberikan kepada yang membutuhkan pembiayaan dengan pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*) serta pola sewa (*ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*) (OJK, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, diklasifikasikan Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yakni berbasis aset dan berbasis ekuitas (Malaysia International Islamic Finance Centre, 2016). Sehingga secara teori, sifat pembiayaan bank syariah yang berbasis aset seharusnya tidak bergantung pada pergerakan suku bunga sehingga Bank Syariah tidak terpengaruh oleh Suku Bunga (Samad & Hassan, 2018). Hal tersebut disebabkan karena model bisnis keuangan syariah melarang praktik riba dan menekankan pada pengalihan aset fisik. Selain itu, pembiayaan yang sesuai dengan Syariah berbasis aset dan liabilitas didasarkan

pada konsep pembagian keuntungan, keurgian, dan risiko. berdasarkan gagasan ini, dapat disimpulkan bahwa bank syariah telah Independen atau tidak bergantung pada suku bunga konvensional (Beck et al., 2010). Sehingga ketika suku bunga memberikan pengaruh pada pembiayaan bank Syariah maka bank Syariah belum dikatakan independen. Oleh karena itu, untuk menilai Independensi bank Syariah maka di proksikan dengan SBDK Mikro yang digunakan oleh Bank Konvensional.

Pada dasarnya SBDK adalah suku bunga terendah yang digunakan oleh Bank Konvensional sebagai dasar untuk menentukan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabahnya. SBDK diperoleh dari perhitungan tiga biaya, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya overhead yang dikeluarkan Bank Konvensional selama proses pemberian kredit, dan marjin keuntungan atau biasa dikenal sebagai profit margin, yang ditetapkan untuk aktivitas kredit. Komponen premi risiko individual nasabah bank, yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur, belum diperhitungkan dalam perhitungan SBDK. Akibatnya, suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur mungkin tidak sama dengan SBDK (SEBI No 15/1/DPNP Perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, 2013).

Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK bertujuan untuk meningkatkan good governance dan mendorong persaingan sehat dalam industri perbankan, termasuk menciptakan disiplin pasar yang lebih baik. Adapun peran yang sangat penting yang dimiliki SBDK yakni dalam memberikan kejelasan kepada nasabah dan mempermudah mereka dalam menilai manfaat dan biaya dari kredit yang ditawarkan oleh bank. Oleh karena itu, SBDK harus mencakup seluruh segmen

kredit yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah, termasuk segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, serta kredit konsumsi seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan Non-KPR. Adapun Segmen Kredit Mikro yang dimaksud yaitu berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SEBI No 15/1/DPNP Perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, 2013).

2.1.6. Keuangan Inklusif

CGAP-GPFI menjelaskan bahwa keuangan inklusif yaitu keadaan di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses yang efektif ke kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, dengan biaya yang terjangkau bagi pelanggan dan berkelanjutan bagi penyedia layanan, sehingga pelanggan tidak perlu menggunakan layanan keuangan formal dibandingkan dengan pilihan informal yang ada saat ini.

Keuangan inklusif berarti bahwa masyarakat dapat dengan mudah dan tepat waktu mendapatkan produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses ke layanan keuangan mencakup kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan dan/atau membeli produk dari lembaga keuangan formal. Produk dan layanan keuangan harus mudah diakses dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, produk dan layanan keuangan yang aman bertujuan untuk melindungi

hak dan kewajiban masyarakat dari risiko yang mungkin timbul. (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020)

Tujuan dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (selanjutnya disingkat SNKI) yaitu: 1) menciptakan sistem keuangan yang inklusif yang mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil; 2) mendorong pertumbuhan ekonomi; 3) mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan 4) mengurangi disparitas antara orang dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun Sasaran dari Keuangan inklusif mengutamakan penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat. Meskipun ini mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan ini berfokus pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal: masyarakat berpenghasilan rendah; pelaku usaha mikro dan kecil; dan masyarakat lintas kelompok (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020).

2.1.6.1. Indikator Keuangan Inklusif

Dalam mengukur capaian SNKI digunakan Indeks Keuangan Inklusif, yaitu paling sedikit persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal. Indikator keuangan inklusif terdiri dari tiga dimensi: Jangkauan, yang mengacu pada kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal secara fisik dan biaya; Penggunaan, yang mengacu pada penggunaan aktual produk dan layanan keuangan; dan Kualitas, yang mengacu pada tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020).

Sarma (2012) menggunakan tiga dimensi atau indikator dalam metode perhitungan *Index Financial Inclusion* (selanjutnya disingkat IFI): *banking penetration*, *availability of banking services*, dan *usage*. Jumlah rekening deposit per 1.000 orang dewasa menunjukkan penetrasi, jumlah bank dan ATM per 1.000 orang dewasa menunjukkan availabilitas, dan rasio volume dua layanan utama sistem perbankan, kredit dan deposit, dari jumlah orang dewasa terhadap nilai Gross Domestic Product (GDP) menunjukkan penggunaan. Kebanyakan negara berpendapatan tinggi memiliki IFI yang tinggi, tetapi IFI yang rendah ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah.

Beberapa penelitian lain seperti Isrowiyah (2019); Nugroho (2021); Puspitasari et al. (2020); Umar (2017) menggunakan metode perhitungan yang dilakukan oleh Sarma (2012) mengingat metode dan sumber data yang digunakan dalam perhitungan IFI lebih mudah untuk diaplikasikan dengan beberapa penyesuaian sesuai ketersediaan data sehingga diperoleh Indeks Inklusi Keuangan Syariah.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah penjabaran tinjauan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Penelitian (I. Setiawan et al., 2023) menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan syariah dan Bank Indonesia untuk periode 2021 hingga 2022. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi linear berganda dengan memanfaatkan perangkat lunak Eviews 12, kemudian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan dari

SBIS terhadap distribusi pembiayaan UMKM di Indonesia. Begitu pula, inflasi juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Namun, terdapat pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap distribusi pembiayaan UMKM di Indonesia. Namun, DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pembiayaan UMKM di Indonesia.

Penelitian (Amalia & Azizuddin, 2022) menunjukkan bahwa secara individu ukuran bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan KPMM memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Namun, untuk variabel Return on Assets (ROA), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), inflasi, dan BI 7-days tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Secara keseluruhan, ukuran bank, DPK, KPMM, ROA, NPF, FDR, inflasi, dan BI 7-days secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan triwulanan individu bank syariah dalam rentang waktu Maret 2016 hingga Juni 2020.

Penelitian Pradesyah & Triandhini (2021) menjelaskan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan BUS, NPF secara parsial berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan BUS. Secara bersama-sama DPK, NPF, SBIS berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan BUS. SBIS secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan BUS. Adapun hasil tersebut menggunakan metode penelitian berupa Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2015-2019 yang berasal dari OJK.

Penelitian Ernawati et al. (2021) menunjukkan bahwa variabel NPF UMKM, tingkat keuntungan (profit rate), dan dummy periode pandemi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia, sementara pertumbuhan aset dan dummy ambang batas NPF tidak signifikan. Peningkatan NPF akan mengurangi alokasi pembiayaan UMKM, tetapi peningkatan keuntungan akan mendorong peningkatan persentase pembiayaan UMKM. Persentase pembiayaan UMKM selama pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Data yang diolah yakni data bulanan mulai 2015 – 2020 yang berasal dari SPS yang diterbitkan oleh OJK dimana Perbankan syariah yang diestimasi terdiri dari tiga jenis BUS, UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disingkat BPRS). Metode yang digunakan yaitu data panel.

Penelitian Lestari (2020) menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF, nilai tukar, dan ERP tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM BUS baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebaliknya, dalam jangka pendek, ROA dan tingkat suku bunga adalah variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM BUS. Selanjutnya, variabel DPK, NPF, nilai tukar, dan ERP tidak mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM UUS baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebaliknya, JKB, ROA, dan tingkat suku bunga adalah variabel yang mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM UUS dalam jangka pendek. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM BPRS dalam jangka pendek adalah JKB, DPK, NPF, dan ERP. Dalam jangka panjang, variabel yang mempengaruhi

pembiayaan sektor UMKM BPRS adalah JKB, DPK, ROA, dan ERP. Sebaliknya, inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga tidak mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM BPRS dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun metode yang digunakan untuk estimasi adalah *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dengan data yang bersumber dari SPS berupa data bulanan mulai Oktober 2014 s.d. April 2020.

Penelitian A'yun (2020) menggunakan data BPRS tahun 2010 – 2018 yang diambil melalui laporan statistik dari OJK, situs web BI, dan situs web Kementerian Perdagangan. Metode yang digunakan yakni Analisis VECM menunjukkan hubungan jangka pendek antara NPF terhadap pembiayaan UMKM, sementara dalam jangka panjang terdapat pengaruh inflasi, suku bunga, NPF, dan BOPO terhadap pembiayaan UMKM. Hasil uji IRF (Impulse Response Function) menunjukkan respons pembiayaan UMKM terhadap setiap variabel. Pada variabel inflasi, responsnya negatif terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan respons suku bunga terhadap pembiayaan UMKM adalah negatif pada periode awal dan positif mulai dari periode ke-8. Sedangkan NPF merespons positif pada awalnya dan negatif pada periode ke-4. Kontribusi variabel keseluruhan terhadap pembiayaan UMKM meningkat dengan bertambahnya periode dan meningkatnya pengaruh pada variabel nilai tukar, CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO, sebaliknya terjadi penurunan pada variabel suku bunga setiap periode.

Penelitian Pramono et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara BUS dan UUS dalam faktor-faktor yang memengaruhi Pembiayaan UMKM. Untuk BUS, jumlah kantor berpengaruh positif signifikan memengaruhi

pembiayaan UMKM dan tingkat suku bunga kebijakan BI berpengaruh negative signifikan mempengaruhi pembiayaan UMKM. Sedangkan UUS, Pembiayaan yang Bermasalah (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM, dan tingkat suku bunga kebijakan bank sentral berpengaruh negative terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan dalam analisis yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan data bulanan dari Juni 2014 s.d. September 2018.

Penelitian (Saputri & Wibowo, 2018) memaparkan Hasil analisis GMM Arellano Bond dengan menggunakan data sekunder berupa data bulanan dari Januari 2011 hingga Juni 2015 yang mencakup lima provinsi di Indonesia dengan pembiayaan UMKM terbesar. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel internal perbankan syariah DPK dan NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan UMKM; FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM; dan variabel makroekonomi IPI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan UMKM dengan mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk UMKM.

Penelitian (J. Effendi et al., 2018) menerangkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model jangka panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), Finance to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Suku Bunga Kredit Bank Konvensional (SBK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan ekuitas. Variabel BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan Return on Assets (ROA) berpengaruh positif namun

tidak signifikan terhadap pembiayaan ekuitas. Variabel DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan ekuitas pada model jangka pendek. Adapun analisis dilakukan dengan metode *Error Correction Model* dengan menggunakan data time series dari bulan Januari 2010 s.d. Desember 2015 yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia (selanjutnya disingkat SPI) dan SPS.

Penelitian (Suhel et al., 2018) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), tenaga kerja (L), pembiayaan bermasalah (NPF) dan pembiayaan UKM per kantor cabang (SMEOFCT-1) secara statistik memiliki signifikan terhadap pembiayaan UKM, sedangkan jumlah kantor cabang (OFC) tidak memberikan kontribusi terhadap pembiayaan UKM. Hasil perhitungan skala ekonomi menunjukkan hasil yang semakin menurun (*diminishing return of scale*). Beberapa variabel seperti DPK, jumlah karyawan, jumlah kantor, dan NPF menunjukkan hasil yang tidak elastis. Metode yang digunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan data Januari 2012 s.d. Juni 2017 yang berasal dari SPS.

Penelitian (Indrawati & Basuki, 2017) menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Modal Kerja (selanjutnya disingkat PMK) dan variabel margin memiliki dampak yang signifikan terhadap PMK UMKM pada BUS di Indonesia dalam jangka pendek. Sementara variabel NPF, DPK, dan Inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PMK dalam jangka panjang, hasil estimasi VECM menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu NPF, DPK, Inflasi, dan Margin, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PMK dalam jangka panjang. Hasil VDC menunjukkan bahwa PMK memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PMK. Adapun Hasil IRF dari penelitian ini menunjukkan bahwa

DPK memberikan respons positif terhadap PMK. Sedangkan NPF, Inflasi, dan Margin memberikan respons negatif terhadap PMK. Alat yang digunakan untuk estimasi penelitian ini yaitu *Vector Error Correction Model* (VECM) dengan menggunakan data bulanan dari Juni 2014 s.d. November 2016 yang berasal dari BPS dan OJK.

Penelitian S. Indriani & Priyanto (2018) menjelaskan Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor berikut: suku bunga kebijakan (BI Rate), inflasi, nisbah mudharabah dan musyarakah, dan margin murabahah terhadap portofolio pembiayaan bank syariah. Metode kuantitatif *Autorgressive Distributed Lag* (ARDL) digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan meliputi pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, tingkat BI, inflasi, nisbah mudharabah dan musyarakah, serta margin murabahah dari Januari 2011 hingga Juni 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas BI Rate (BIR) tujuh bulan sebelumnya memiliki dampak negatif sebesar 1,54% terhadap pembiayaan pada periode sekarang, sementara inflasi tahunan empat bulan sebelumnya memiliki dampak positif sebesar 4,9% terhadap pembiayaan pada periode sekarang. Nisbah mudharabah selama delapan bulan sebelumnya berdampak negatif sebesar 4,4% terhadap pembiayaan saat ini, sedangkan nisbah musyarakah selama tujuh dan delapan bulan sebelumnya berdampak positif sebesar 3,6% dan 5,4% terhadap pembiayaan saat ini. Dengan menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel *autoregressive*, tren pertumbuhan pembiayaan selama periode dua, tiga, dan enam bulan sebelumnya tampaknya berdampak positif pada pembiayaan selama periode saat ini. Ini menunjukkan bahwa bank syariah menggunakan sejarah pertumbuhan

pembiayaan sebelumnya sebagai salah satu referensi untuk menjaga pertumbuhan pembiayaan mereka di masa depan.

Penelitian Mubarak & Rusdianto (2019) menggunakan metode analisis *Granger Causality*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan mencakup pembiayaan perbankan syariah, nilai tukar, inflasi, dan suku bunga dari Januari 2010 hingga Desember 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dua arah atau satu arah antara variabel pembiayaan dengan variabel inflasi, variabel pembiayaan dengan variabel suku bunga, variabel nilai tukar dengan variabel inflasi, serta variabel nilai tukar dengan variabel tingkat bunga. Namun, ditemukan hubungan satu arah antara variabel inflasi dan variabel suku bunga. Selain itu, terdapat hubungan dua arah antara variabel pembiayaan dan variabel nilai tukar. Implikasi dari tidak ada hubungan dua arah atau satu arah antara variabel pembiayaan dengan variabel suku bunga yaitu dalam penyaluran pembiayaan bank Syariah menerapkan prinsip Syariah yakni menggunakan akad dan sistem bagi hasil.

Penelitian Nouman et al. (2022) memaparkan tentang Analisis empiris dilakukan dengan menggunakan data industri perbankan Islam di Pakistan selama periode waktu 2006-2020. Uji Ko-integrasi Multivariat Johansen dan Jusiles dan Model Koreksi Kesalahan Vektor (VECM) digunakan sebagai model ekonometrik dasar. Selain itu, model DCC-GARCH digunakan untuk memastikan kekuatan dan konsistensi hasil. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek antara volatilitas suku bunga dan pembiayaan industri perbankan Islam, memberikan bukti signifikan untuk pergerakan bersama

dan konvergensi. Sehingga, disimpulkan bahwa keterkaitan yang kuat selalu ada antara sistem perbankan Islam dan konvensional karena penggunaan acuan suku bunga. Oleh karena itu, meskipun beroperasi berdasarkan ideologi bebas bunga, bank Islam rentan terhadap risiko suku bunga (IRR) yang pada akhirnya mengakibatkan risiko tingkat pengembalian, risiko penarikan, dan risiko komersial tergusur di perbankan Islam.

Penelitian Widarjono & Rafik (2023) menggunakan model ARDL, model non-linear ARDL (NARDL), dan Pooled Mean Group (PMG). Bukti adanya keterkaitan jangka panjang antara tingkat pembiayaan Islam dan tingkat pinjaman konvensional ditemukan. Namun, bukannya simetris, keterkaitan antara keduanya bersifat asimetris. Penentuan harga asimetris pada tingkat pembiayaan Islam dan beberapa kontrak spesifik seperti tingkat Mudharaba dan Murabaha di Indonesia secara kuat mengikuti penurunan tingkat pinjaman konvensional, tetapi cenderung kurang responsif terhadap peningkatan tingkat pinjaman konvensional. Penentuan harga asimetris pada tingkat pembiayaan Islam di Malaysia jelas terikat pada tingkat pinjaman konvensional. Hasil PMG memperkuat temuan asimetris di mana efek penurunan tingkat pinjaman konvensional lebih besar daripada efek peningkatan tingkat pinjaman konvensional pada tingkat pembiayaan Islam. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa peminjam bank Islam adalah peminjam yang didorong oleh keuntungan dalam sistem perbankan ganda. Oleh karena itu, tingkat pembiayaan Islam dipengaruhi untuk mengikuti tingkat pinjaman konvensional karena tingkat pembiayaan Islam yang tidak kompetitif.

Penelitian Nugroho (2021) menyimpulkan bahwa terdapat tiga dimensi membentuk inklusi keuangan perbankan syariah: penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penetrasi bank syariah tidak berdampak signifikan pada peningkatan kinerja UMKM. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemegang rekening bank syariah membuka rekeningnya dalam bentuk tabungan daripada kebutuhan bisnis. Selain itu, pemegang rekening tidak tahu banyak tentang pembiayaan syariah sehingga mereka tidak mengajukan pembiayaan meskipun telah membuka rekening di bank syariah. 2) Kinerja UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan perbankan dari bank syariah. Kantor cabang bank syariah yang dekat dengan UMKM memengaruhi penggunaan layanan perbankan, sehingga UMKM dapat mendapatkan layanan yang meningkatkan kinerja mereka. Meskipun kantor cabang bank syariah tidak berada di dekat pengusaha UMKM, bank syariah menggunakan agen bank sebagai pengganti kantor cabang fisik. Ini memungkinkan pengusaha UMKM tetap mendapatkan layanan perbankan dari bank syariah melalui agen bank tersebut. 3) Penggunaan perbankan syariah berdampak negatif pada kinerja UMKM. Ini disebabkan oleh fakta bahwa skema pembiayaan utama bank syariah, murabahah, menetapkan margin yang relatif tinggi. Margin yang tinggi ini membuat pengusaha UMKM menghadapi beban tetap yang cukup besar karena nasabah harus mengangsur pembiayaan dalam jumlah yang tetap. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh UMKM berkurang dan pada akhirnya berdampak buruk pada kinerja UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Analisis Data

Panel dengan menggunakan data sekunder 5 tahun terakhir yang berasal dari Disperindagkop, OJK, BPS.

Penelitian Isrowiyah (2019) menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah berdampak positif dan signifikan pada pembiayaan syariah UMKM di Indonesia. Artinya, pembiayaan syariah yang disalurkan pada sektor UMKM cenderung meningkat ketika indeks inklusi keuangan syariah yang diukur dari tiga dimensi (*aksesibilitas, availabilitas, dan usage*) meningkat. Dengan kata lain, provinsi dengan indeks inklusi keuangan syariah yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM. Selain itu, Secara keseluruhan, inklusi keuangan syariah di Indonesia dominan dipengaruhi oleh dimensi *availabilitas* dan penggunaan. Sementara itu, dimensi aksesibilitas memiliki peran yang lebih kecil dibandingkan keduanya. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan syariah. Metode yang digunakan yakni Analisis Regresi Linier dengan mengumpulkan data tahunan mulai 2015 s.d. 2018 dari OJK dan BPS

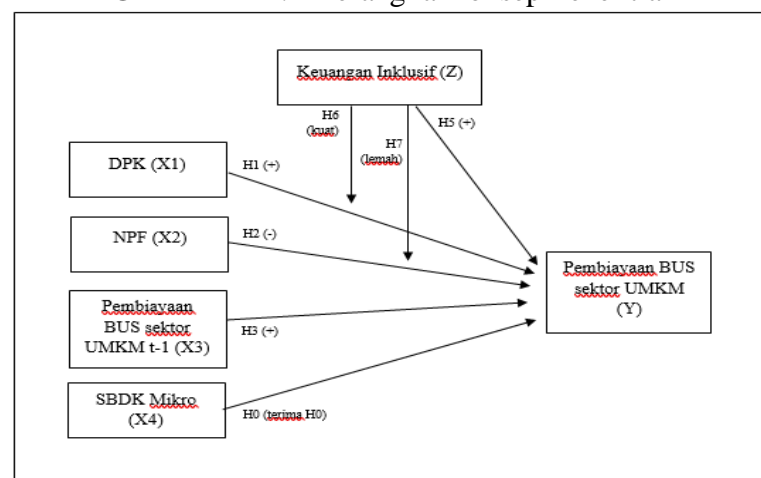
Penelitian Ahyar (2019) bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana jumlah kantor perbankan syariah (BUS dan UUS) yang terdiri dari KP (Kantor Pusat), KC (Kantor Cabang), KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan KK (Kantor Kas) mempengaruhi distribusi pembiayaan UMKM. Studi ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan model autoregresi vektor (VAR). Menurut hasil penelitian, jumlah kantor BUS dan UUS memengaruhi pembiayaan UMKM dalam perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah di Indonesia masih belum mencapai tingkat

keberhasilan yang ideal dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Perbankan syariah dapat melakukan berbagai langkah untuk memperluas akses bagi pelaku UMKM, seperti mengembangkan sistem teknologi keuangan (Fintech), memperluas jaringan agen perbankan syariah melalui program Laku Pandai, dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan UMKM.

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual menggambarkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi di antara variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel-variabel berikut digunakan: variabel independen (X) yaitu DPK, NPF, Pembiayaan BUS Sektor UMKM t-1, Keuangan Inklusif, SBDK Mikro; variabel dependen (Y) yaitu Pembiayaan BUS Sektor UMKM; dan variabel pemoderasi (Z) yaitu Keuangan Inklusif. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini akan melihat bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain.

GAMBAR II.1 Kerangka Konsep Penelitian



(Sumber: Jurnal dan Penelitian)

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Konsep Penelitian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

DPK merupakan dana simpanan atau investasi yang tidak terikat, yang dipercayakan oleh nasabah yang bukan bank kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau mudharabah. Dana tersebut disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang setara dengan itu. (OJK, 2015) Sehingga DPK merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, terutama kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks pembiayaan UMKM, DPK memainkan peran yang positif. Semakin bertambah jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, semakin bertambah pula kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM. (J. Effendi et al., 2018; Indrawati & Basuki, 2017; Pradesyah & Triandhini, 2021)

H1: DPK memengaruhi Pembiayaan BUS sektor UMKM secara positif

2.4.2. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

NPF digunakan untuk mengukur tingkat masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan yang dimiliki oleh bank Syariah. (Lampiran SEBI No.9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip

Syariah, 2007) Sehingga risiko pembiayaan yang tidak tertagih dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank dan mengurangi likuiditas bank untuk menyalurkan pembiayaan lebih lanjut. Sebagai akibatnya, bank Syariah akan mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. (A'yun, 2020; Ernawati et al., 2021; Indrawati & Basuki, 2017; Pradesyah & Triandhini, 2021; Pramono et al., 2019; Saputri & Wibowo, 2018; D. Setiawan et al., 2022; Suhel et al., 2018)

H2: NPF memengaruhi Pembiayaan BUS sektor UMKM secara negatif

2.4.3. Pengaruh Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Pola pembiayaan UMKM saat ini dipengaruhi oleh riwayat pembiayaan masa lalu, terutama yang menunjukkan riwayat positif. Riwayat positif ini meningkatkan kepercayaan dan akses lembaga keuangan untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada UMKM, menjadi kunci dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Sebagai bank syariah, mereka menggunakan sejarah pertumbuhan pembiayaan sebagai standar untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan UMKM ke depan. Jika rata-rata pembiayaan pada setiap kantor cabang periode sebelumnya meningkat, maka diperkirakan pembiayaan UMKM juga akan meningkat seiring waktu, dan sebaliknya jika menurun, hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan UMKM ke depan (Indriani & Priyanto, 2018; Suhel et al., 2018).

H3: Pembiayaan BUS Sektor UMKM t-1 memengaruhi Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif

2.4.4. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit Mikro terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Model bisnis keuangan syariah melarang praktik riba dan menerapkan konsep pengalihan aset fisik serta pembagian keuntungan, kerugian, dan risiko. Sehingga secara teori, Bank syariah memiliki sifat pembiayaan yang berbasis aset dan tidak bergantung pada pergerakan suku bunga konvensional. Oleh karena itu, bank syariah dapat dianggap independen dari pengaruh suku bunga konvensional dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Amalia & Azizuddin, 2022; Beck et al., 2010; Samad & Hassan, 2018). Dengan demikian, tidak ada hubungan dua arah atau satu arah antara variabel pembiayaan dengan variabel suku bunga yang berarti dalam penyaluran pembiayaan bank Syariah menerapkan prinsip Syariah (Mubarok & Rusdianto, 2019). Akhirnya, membuktikan independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM.

H₀: SBDK Mikro tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM

Meskipun beroperasi berdasarkan ideologi bebas bunga, bank syariah rentan terhadap risiko suku bunga (IRR) yang pada akhirnya mengakibatkan risiko tingkat pengembalian, risiko penarikan, dan risiko komersial tergusur. Penelitian yang dilakukan oleh (Nouman et al., 2022) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek antara volatilitas suku bunga dan pembiayaan industri perbankan Islam. Temuan lain menjelaskan tingkat pembiayaan Islam dengan jelas mengikuti tingkat pinjaman konvensional dalam sistem perbankan ganda. Sehingga ini menyiratkan bahwa peminjam bank syariah

adalah peminjam yang didorong oleh keuntungan dalam sistem perbankan ganda. Oleh karena itu, tingkat pembiayaan Islam dipengaruhi untuk mengikuti tingkat pinjaman konvensional karena tingkat pembiayaan Islam yang tidak kompetitif (Widarjono & Rafik, 2023). Adapun studi empiris lain, pengaruh suku bunga terhadap pembiayaan UMKM oleh bank Syariah telah banyak dilakukan diantaranya berpengaruh negatif (A'yun, 2020; Indriani & Priyanto, 2018; Pramono et al., 2019) dan berpengaruh positif (J. Effendi et al., 2018).

H4: SBDK Mikro berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan bahwa pembiayaan BUS Sektor UMKM tidak sepenuhnya independensi

2.4.5. Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Keuangan inklusif berarti bahwa masyarakat dapat dengan mudah dan tepat waktu mendapatkan produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020)

Keuangan inklusif yang mencakup akses yang lebih mudah dan lebih terjangkau terhadap layanan keuangan oleh segmen masyarakat yang lebih luas, berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keuangan inklusif di suatu daerah atau negara, maka diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah dan aksesibilitas pembiayaan yang diberikan kepada UMKM di wilayah tersebut (Ahyar, 2019; Isrowiyah, 2019).

H5: Keuangan Inklusif memengaruhi Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif

2.4.6. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Sarma (2012) menggunakan tiga dimensi atau indikator dalam metode perhitungan IFI: *banking penetration*, *availability of banking services*, dan *usage*. Melalui tiga dimensi ini, diperoleh Indeks Inklusi Keuangan yang secara keseluruhan memperkuat pengaruh DPK terhadap pembiayaan UMKM. Dengan meningkatkan penetrasi perbankan, aksesibilitas layanan bank, dan penggunaan layanan keuangan secara aktif oleh masyarakat dan UMKM, jumlah DPK yang dihimpun oleh lembaga keuangan bertambah, sehingga meningkatkan potensi pembiayaan yang dapat diberikan kepada UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha. (Evanoff, 1988; Isrowiyah, 2019; Puspitasari et al., 2020).

H6: Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK memperkuat pengaruh hubungan DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

2.4.7. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Keuangan Inklusif memainkan peran penting dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di sektor UMKM dengan meningkatkan ketersediaan akses layanan keuangan formal bagi pelaku UMKM. Keberadaan Kantor Cabang Bank berpengaruh pada pemanfaatan jasa perbankan oleh UMKM. Sehingga Keberadaan banyak cabang bank syariah di daerah terpencil dapat memudahkan akses UMKM, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kinerja sehingga mengurangi

risiko gagal bayar (Degryse & Ongena, 2005; Evanoff, 1988; Nugroho, 2021; Ono et al., 2016).

Selain itu, perbankan syariah juga dapat memainkan peran dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis (Beck et al., 2010). Sehingga potensi risiko NPF dapat dikelola dengan lebih baik. Dengan demikian, keuangan inklusif dapat memoderasi NPF terhadap pembiayaan UMKM

H7: Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF memperlemah pengaruh hubungan NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2018 - 2022. Adapun penelitian ini menggunakan sampel jenuh yakni menggunakan seluruh data populasi sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2019).

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh OJK dan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS) berupa data runtun waktu periode 2018 - 2022. Adapun sumber data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu SPS BUS setiap provinsi dan SBDK segmen Mikro. Sedangkan data yang diambil dari BPS yakni Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa) dan Produk Regional Domestik Bruto (selanjutnya disingkat (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di provinsi seluruh Indonesia.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi berupa pengambilan sumber data dari situs resmi website OJK dan BPS. Data yang diambil yakni data per bulan per provinsi di Indonesia mulai dari bulan Juli 2018 s.d. Desember 2022. Periode tersebut dipilih menyesuaikan ketersediaan data seperti SBDK mulai tersedia pada bulan Juli 2018, sedangkan data terbaru dari Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa) hanya sampai pada tahun 2022.

Kendala dan Solusi yang dihadapi dalam pengumpulan data yaitu:

1. Ketersediaan sumber data PDRB dipublikasikan setiap triwulan sehingga data PDRB yang tersedia hanya laporan triwulan. Sehingga data publikasi akan dibagi sesuai dirata-rata setiap bulan sebab data yang digunakan adalah data bulanan.
2. Ketersediaan sumber data SBDK segmen Mikro yang dipublikasikan hanya data bulanan setiap perbankan konvensional di Indonesia sehingga tidak ada data setiap provinsi karena SBDK berlaku di semua jaringan kantor masing-masing bank konvensional di provinsi manapun secara nasional. Sehingga dalam penelitian ini data dari SBDK segmen Mikro per bulan akan diaplikasikan sama pada setiap provinsi di Indonesia.
3. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa) yang dipublikasikan oleh BPS adalah data per tahun sehingga kemudian akan diaplikasikan ke setiap bulan.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Pembiayaan BUS Sektor UMKM adalah penjumlahan pembiayaan yang diberikan oleh BUS berdasarkan Jenis Penggunaan untuk modal kerja dan investasi, dimana Golongan Debitur yaitu UMKM yang berada di setiap Provinsi. (OJK, 2015).

Adapun Rumus Pembiayaan BUS Sektor UMKM:

$$P_{umkm} = PMK_{umkm} + PI_{umkm}$$

P_{umkm} : Pembiayaan BUS Sektor UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

PMK umkm : Pembiayaan JP Modal Kerja GD UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

PI umkm : Pembiayaan JP Investasi UMKM GD UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

Aplikasikan rumus di atas pada setiap provinsi dan setiap bulan sesuai periode penelitian kemudian hasil akhir ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (log).

3.3.2 Variabel Independen

1. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan dana simpanan atau investasi yang tidak terikat, yang dipercayakan oleh nasabah yang bukan bank kepada BUS berdasarkan akad wadiah atau mudharabah. Dana tersebut disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang setara dengan itu (OJK, 2015). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yakni DPK BUS per bulan per provinsi mulai Juli 2018 s.d. Desember 2022 dalam bentuk angka kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma (log).

2. Non Performing Financing

NPF adalah Penjumlahan dari NPF BUS berdasarkan Jenis Penggunaan untuk modal kerja dan investasi, dimana Golongan Debitur yaitu UMKM, kemudian dibagi dengan Pembiayaan BUS Sektor UMKM yang berada di setiap Provinsi (OJK, 2015).

Adapun Rumus NPF BUS Sektor UMKM:

$$NPF_{umkm} = \frac{NPF_{MK\ umkm} + NPF_{I\ umkm}}{P\ umkm} \times 100\%$$

NPF umkm : NPF BUS Sektor UMKM (dalam persentase (%))

NPF MKumkm : NPF JP Modal Kerja GD UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

NPF Iumkm : NPF JP Investasi GD UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

P umkm : Pembiayaan BUS Sektor UMKM (nominal dalam Miliar Rp)

Aplikasikan rumus di atas pada setiap provinsi dan setiap bulan sesuai periode penelitian dihasilkan dalam bentuk persentase (%).

3. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya

Pembiayaan BUS Sektor UMKM saat ini adalah t maka periode sebelumnya adalah $t-1$. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada periode $t-1$ per bulan per provinsi yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma (\log). Khusus untuk data pertama berdasarkan data SPS bulan Juni 2018 karena periode t pertama adalah Bulan Juli 2018.

4. Suku Bunga Dasar Kredit Mikro

SBDK Mikro adalah suku bunga terendah yang digunakan oleh Bank Konvensional sebagai dasar untuk menentukan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabahnya. (SEBI No 15/1/DPNP Perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, 2013) Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Rata-Rata dari SBDK Mikro semua Bank Konvensional setiap bulan sesuai periode penelitian dalam bentuk persentase (%)

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderator adalah jenis variabel yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Secara lebih spesifik, variabel moderator dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, tergantung pada sifat dan arah dari variabel moderator tersebut. Variabel moderator juga dikenal sebagai variabel kontingensi karena perannya yang krusial dalam mengubah arah hubungan antara variabel lainnya (Sugiono, 2004). Adapun variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu Keuangan Inklusif yang di proksikan oleh Indeks Inklusi Keuangan Syariah.

Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari IFI (Sarma, 2012) kemudian dikembangkan menjadi Index of Syariah Financial Inclusion (selanjutnya disingkat ISFI) oleh Umar (2017). Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan menyesuaikan berdasarkan ketersediaan data. Adapun Indeks Inklusi Keuangan Syariah terdiri dari 3 dimensi yakni *banking penetration*, *availability of banking services*, dan *usage*. Berikut perhitungan Indeks Inklusi Keuangan Syariah setiap provinsi per bulan berdasarkan data BUS sebagai berikut:

1. Mencari nilai masing-masing dimensi:

$$d_i = w_i \frac{D_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Dimana

d_i adalah dimensi; w_i adalah bobot yang digunakan (weight attached) untuk seluruh dimensi bernilai sama ($w_i = 1$); m_i adalah batas terendah nilai dimensi i (nilai $m_i = 0$); M_i adalah batas tertinggi nilai dimensi i (nilai D_i tertinggi dari

33 provinsi per bulan); dan D_i adalah nilai aktual dimensi i . Adapun untuk menghitung D_i menggunakan ketentuan berikut:

- a. Dimensi *Banking Penetration* adalah Rasio Jumlah DPK BUS dalam Jutaan rupiah setiap bulan per 1.000 jumlah penduduk.

Rumus:

$$D_1 = \frac{\text{Jumlah DPK BUS (bulan}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk (bulan}_t\text{)}} \times 1.000$$

- b. Dimensi Availability of banking services adalah Rasio Jumlah KC, KCP, KK dari BUS setiap bulan per 100.000 jumlah penduduk

Rumus:

$$D_2 = \frac{\text{Jumlah KC, KCP, KK BUS (bulan}_t\text{)}}{\text{Jumlah Penduduk (bulan}_t\text{)}} \times 100.000$$

- c. Dimensi *Usage* adalah Rasio dari Jumlah Pembiayaan BUS setiap bulan terhadap PDRB.

Rumus:

$$D_3 = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan BUS (bulan}_t\text{)}}{\text{Nilai PDRB (bulan}_t\text{)}} \times 1.000$$

2. Menghitung nilai X_1 dan X_2

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

3. Menghitung nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI)

$$\text{Indeks Inklusi Keuangan Syariah} = \frac{1}{2} [X_1 + X_2]$$

Rumus Akhir yang digunakan sebagai berikut:

$$ISFI = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{n}} \right) + \left(1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \right) \right]$$

Hasil akhir kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (log).

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Hipotesis Operasional

1. Dana Pihak Ketiga

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari DPK (X1) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Terdapat pengaruh positif dari DPK (X1) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

2. *Non Performing Financing*

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari NPF (X2) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Terdapat pengaruh negatif dari NPF (X2) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

3. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari Pembiayaan BUS Sektor UMKM t-1 (X3) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Terdapat pengaruh positif dari Pembiayaan BUS Sektor UMKM t-1 (X3) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

4. Suku Bunga Dasar Kredit Mikro

Ho : SBDK Mikro tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM

Ha : SBDK Mikro (X4) berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan bahwa pembiayaan BUS Sektor UMKM tidak sepenuhnya independensi

5. Keuangan Inklusif

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari Keuangan Inklusif (Z) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Terdapat pengaruh positif dari Keuangan Inklusif (Z) secara parsial terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

6. Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK

Ho : Interaksi Keuangan Inklusif (Z) dengan DPK tidak memengaruhi hubungan DPK (X1) terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Interaksi Keuangan Inklusif (Z) dengan DPK memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan DPK (X1) terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

7. Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF

Ho : Interaksi Keuangan Inklusif (Z) dengan NPF tidak memengaruhi hubungan NPF (X2) terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

Ha : Interaksi Keuangan Inklusif (Z) dengan NPF memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan dari NPF (X2) terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM (Y)

3.4.2 Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data silang (cross-section) dan data runtut waktu (time series). Jenis data longitudinal ini memiliki obeservasi atas unit cross-section yang terulang secara teratur. Adapun provinsi digunakan sebagai unit cross-section. Sedangkan, observasi atas unit time series dibuat dalam bentuk interval waktu yakni bulanan, dimana informasi interval waktu menunjukkan perubahan pada subjek waktu, dan informasi antar unit, yang menunjukkan perbedaan antar subjek, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan data panel.

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel karena memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan perkiraan parameter model yang lebih dapat diandalkan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengukur efek-efek yang tidak dapat diidentifikasi dan diukur secara individual menggunakan data cross-sectional atau time-series.
3. Untuk mengontrol faktor-faktor yang tidak teramati yang bervariasi di antara unit-unit dan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan manfaat di atas ini, model ini dapat secara signifikan mengurangi bias estimasi. Selain itu, analisis regresi data panel biasanya memiliki tingkat *multi kolineritas* yang lebih rendah di antara variabel-variabel penjelas dibandingkan dengan data time-series atau cross-section saja. Sehingga, model empiris akan memiliki perkiraan parameter yang lebih presisi (Sriyana, 2015)

Model regresi data panel dalam penelitian ini dengan indeks i merujuk pada provinsi i dan indeks t merujuk pada periode bulanan, di estimasi sebagai berikut:

$$\text{Log}(Pumkm)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{SBDK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana β_0 adalah koefisiensi regresi dan ε_{it} adalah Error

3.4.2.1 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi regresi data panel, terdapat 3 jenis model sebagai berikut:

1. Metode *Common Effect*

Common Effect mengasumsikan bahwa set data panel tidak memiliki efek berdasarkan unit dan periode waktu yang berbeda. Model umum menyatakan bahwa tidak ada intercept yang berbeda karena efek individu dan periode waktu. Dengan kata lain, model ini dianggap berlaku untuk semua individu pada setiap waktu, sama seperti dalam regresi linier klasik. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa karakteristik individu yang bervariasi antar unit dan waktu tidak memengaruhi perkiraan koefisien (Sriyana, 2015).

2. Metode *Fixed Effect*

Fixed Effect mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang tidak teramati di antara unit dan periode waktu pengamatan dapat diakomodasi melalui perbedaan dalam konstanta. Dalam model *Fixed Effect*, model yang diestimasi memiliki intercept yang berbeda karena perbedaan unit dan periode waktu (Sriyana, 2015).

3. Metode *Random Effect*

Random Effect memiliki efek acak yang tidak teramati tidak berkorelasi dengan variabel penjelas. Faktor ini mempengaruhi intercept melalui sisa sebagai efek

acak. *Random Effect* lebih disukai secara luas karena mencakup karakteristik data berdasarkan unit lintas dan periode waktu melalui efek acak dari kesalahan. Dalam model ini, hasil estimasi tidak kehilangan derajat kebebasan, sebagaimana terjadi pada *Common Effect* dan *Random Effect* (Sriyana, 2015).

3.4.2.2 Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel

1. Uji F

Uji F digunakan untuk memilih uji model mana yang lebih baik antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* (Widarjono, 2018). Adapun hipotesis yang digunakan:

H₀: Model *Common Effect* lebih tepat

H_a: Model *Fixed Effect* lebih tepat

Jika hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas $F >$ taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka model yang dipilih adalah *Common Effects*.

Jika probabilitas $F <$ taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka model yang dipilih adalah *Fixed Effects*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model mana yang lebih baik antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Dalam hal ini, menentukan ketepatan metode yang digunakan terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu pertama adalah apakah ada atau tidak korelasi antara *error terms* ε_{it} dan variabel independen X.

Jika dianggap ada korelasi antara keduanya, maka model *Random Effect* lebih tepat, tetapi jika tidak ada, maka model *Fixed Effect* lebih tepat. Kedua adalah jika sampel yang diambil hanya merupakan sebagian kecil dari populasi, maka peneliti akan

mendapatkan *error terms* ε_{it} yang bersifat acak, sehingga model *Random Effect* lebih tepat digunakan. Adapun Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H0: Model *Random Effect* lebih tepat

Ha: Model *Fixed Effect* lebih tepat

Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistic dari chi squares dengan degree of freedom sebanyak jumlah dari variabel independent. Jika menolak H0, nilai statistik Hausman > nilai kritisnya maka *Fixed Effect* lebih tepat. Sebaliknya, jika gagal menolak H0, nilai Uji Hausman < nilai kritisnya maka *Random Effect* lebih tepat (Widarjono, 2018).

3. Uji LM

Uji LM digunakan untuk memilih uji model mana yang lebih baik antara *Random Effect* dengan *Common Effect*. Adapun jika diketahui Uji F dan Uji Hausman memilih model *Fixed Effect* sebagai model yang tepat, maka Uji ini tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, Uji ini digunakan ketika Hasil dari Uji F memilih Model *Fixed Effect* lebih baik dan Uji Hausman memilih Model *Random Effect* lebih baik. Sehingga Uji LM diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah model yang tepat adalah *Random Effect* atau *Common Effect*. Adapun Hipotesis yang digunakan:

H0: Model *Common Effect* lebih tepat

Ha: Model *Random Effect* lebih tepat

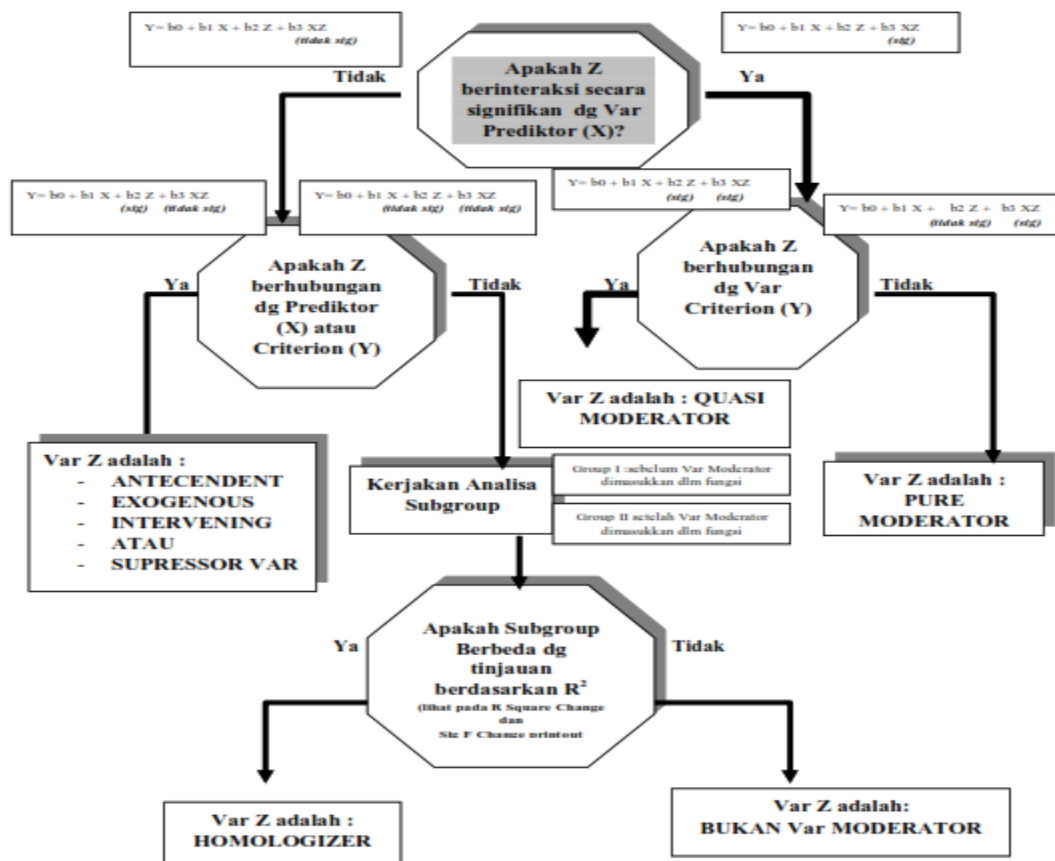
Uji LM didasarkan pada *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistic > nilai kritis statistik *chi-squares* maka menolak H0. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dari pada model *Common Effect*. Sebaliknya, Jika nilai LM statistik

< nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis maka gagal menolak H_0 yang berarti estimasi yang lebih tepat menggunakan metode *Common Effect* (Widarjono, 2018).

3.4.3 Model *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tahap pertama adalah mencari jenis dari Variabel Moderasi. Didasarkan pada hubungan dimensi ada tidaknya hubungan antara variabel moderator dan variabel independen atau ada tidaknya hubungan dengan variabel dependen. Adapun dalam penelitian ini perlu dilakukan pendekatan *Moderated Regression* untuk menentukan jenis variabel moderasi dilakukan sebagaimana Gambar III.1.

GAMBAR III.1 Kerangka Kerja Identifikasi Variabel



Sumber: (Sugiono, 2004)

Menentukan Jenis Variabel Moderasi dengan Analisis Regresi Moderat (MRA)

1. Persamaan 1

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{SBDK}_{it} + \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \\ & \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

2. Persamaan 2

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{SBDK}_{it} + \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \\ & \beta_6 \text{Log}(DPK)_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it} + \beta_7 \text{NPFumkm}_{it} \times \\ & \text{Log}(ISFI)_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Kesimpulan:

1. Jika diketahui β_5 dalam persamaan 1 signifikan, β_6 dan β_7 pada persamaan 2 tidak signifikan maka Variabel Keuangan Inklusi bukan merupakan variabel moderasi melainkan variabel independen, *intervening*, *entecedent*, *exogenous*, atau predictor.
2. Jika diketahui β_5 dalam persamaan 1 tidak signifikan, β_6 dan β_7 pada persamaan 2 signifikan maka Variabel Keuangan Inklusi merupakan *Pure Moderator*.
3. Jika diketahui β_5 dalam persamaan 1 signifikan, β_6 dan β_7 pada persamaan 2 signifikan maka Variabel Keuangan Inklusi merupakan *Quads Moderator*.

Tahap Kedua adalah Estimasi Regresi Data Panel berdasarkan hasil Analisis Regresi Moderat (MRA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika diketahui bahwa Variabel Z (Keuangan Inklusif yang diproksikan oleh Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI)) adalah *Pure Moderator* maka Estimasi yang digunakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{Log}(SBDK)_{it} + \\ & \beta_5 (\text{Log}(DPK)_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it}) + \beta_6 (\text{NPFumkm}_{it} \times \\ & \text{Log}(ISFI)_{it}) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

2. Jika diketahui bahwa Variabel Z (Keuangan Inklusif yang diproksikan oleh Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI)) adalah *Quasi Moderator* maka Estimasi yang digunakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{Log}(SBDK)_{it} + \\ & \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \beta_6 (\text{Log}(DPK)_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it}) + \\ & \beta_7 (\text{NPFumkm}_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it}) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Pengujian t-test

Pengujian ini untuk menjawab hipotesis operasional apakah terdapat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Jika Nilai probability t-statistik $> \alpha = 0,05$ sehingga menolak H_0 , berarti terdapat pengaruh secara parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Jika Nilai probability t-statistik $< \alpha = 0,05$ sehingga gagal menolak H_0 , Tidak terdapat pengaruh secara parsial Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

3.4.4.2 Pengujian F-test

Pengujian ini untuk menjawab apakah variabel independen yang ada di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak signifikan.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

H_a : Terdapat pengaruh secara simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Jika Nilai F-statistik $> \alpha = 0,05$ sehingga menolak H_0 , berarti terdapat pengaruh secara simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Jika Nilai F-statistik $< \alpha = 0,05$ sehingga gagal menolak H_0 , Tidak terdapat pengaruh secara simultan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi (uji R^2) merupakan uji untuk mengukur presentase total variabel dependen yang dijelaskan oleh garis regresi atau mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya. Adapun nilai dari Koefisien Determinasi berada di antara 0 dan 1 yakni $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika angka R^2 semakin mendekati 1 maka semakin bagus garis regresi karena dapat menjelaskan data secara aktual, begitu pula sebaliknya (Widarjono, 2018).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Profil Objek Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan dengan fokus pada pengaruh variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Beberapa variabel tersebut meliputi Pembiayaan BUS Sektor UMKM, Dana Pihak Ketiga, NPF Pembiayaan UMKM, Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya, Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro sebagai Proksi dari Independensi Pembiayaan BUS dan Keuangan Inklusif yang diproksikan dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan kurun waktu setiap bulan mulai dari Juli 2018 s.d. Desember 2022. Dari populasi tersebut, Sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini dengan total observasi sebanyak 1782 observasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu pengambilan sumber data dari situs resmi website OJK dan BPS.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan disesuaikan sesuai dengan variabel operasional dan satuan pengukuran variabel sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis, mulai dari pendefinisian hipotesis operasional, Penentuan Model Regresi Data Panel, Estimasi Regresi Data Panel, Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel, Model Moderated Regression Analysis (MRA) diperlukan untuk menentukan jenis variabel moderasi, meregresikan variabel moderasi berdasarkan hasil analisis Uji MRA ke dalam

regresi data panel sesuai teknik terbaik yang telah terpilih kemudian menjadi sebuah estimasi model terbaik. Terakhir dilakukan pengujian hipotesis dengan Uji T-Test, Uji F-Test, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Hasil pengujian hipotesis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta analisis data dan implikasi hasil penelitian di dalam pembahasan bab ini. Adapun dalam melakukan analisis data dan pengujian hipotesis digunakan program aplikasi Eviews 12 dan Microsoft Office Excel 16.

4.2. Analisis Data

Metode analisis data adalah prosedur sederhana untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk tabel, GAMBAR, atau diagram.

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL II.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Pumkm	DPK	NPFumkm	Pumkm _{t-1}	SBDKm	ISFI
Mean	1714.524	9506.658	5.232800	1700.502	9.595386	0.131007
Median	776.8823	2372.711	4.492819	775.0218	9.282008	0.086727
Maximum	21743.04	172623.8	30.76407	21743.04	13.09034	0.843777
Minimum	1.756355	76.76130	0.000000	1.756355	6.588947	0.008451
Std. Dev.	2876.852	22687.82	3.514765	2861.307	2.126635	0.155017
Observations	1782	1782	1782	1782	1782	1782

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2023

4.2.2. Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel dalam penelitian ini dengan indeks i merujuk pada provinsi i dan indeks t merujuk pada periode bulanan, di estimasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{SBDKm}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Dimana β_0 adalah koefisiensi regresi dan ε_{it} adalah Error

4.2.2.1. Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan model regresi data panel di atas, kemudian dilakukan estimasi kepada 3 model diperoleh hasil estimasi regresi data panel sebagai berikut:

TABEL III.2 Hasil Estimasi Model dari *Common Effects*, *Fixed Effects*, dan *Random Effect*

Variabel Independen	<i>Common Effects Model</i>		<i>Fixed Effects Model</i>		<i>Random Effects Model</i>	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
<i>Constant</i>	-0.044813	-2.385797**	-0.239275	-2.506189**	-0.044813	-2.466482**
Log(DPK)	0.013637	3.512898***	0.116707	9.364721***	0.013637	3.631700***
NPFumkm	-0.000542	-0.739001	-0.000513	-0.518221	-0.000542	-0.763993
Log(Pumkm _{t-1})	0.991723	297.2810***	0.894730	88.05953***	0.991723	307.3347***
SBDKm	-0.000376	-0.310477	-0.001724	-1.447037	-0.000376	-0.320977
Adjusted R ²	0.996587		0.996807		0.996587	
F-statistic	130014.9		15444.01		130014.9	

Catatan: *, **, ***= masing-masing signifikan pada 0,10; 0,05; dan 0,01

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2023

4.2.2.2. Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel

Setelah memperoleh estimasi dari 3 (tiga) model regresi data panel, kemudian dilakukan pemilihan model yang paling baik. Adapun hasil pengujian diperoleh Model yang terbaik yaitu *Fixed Effects Model* sebagaimana tabel berikut:

TABEL IV.3 Hasil Pengujian Pemilihan Model Regresi Data Panel

Jenis Pengujian	Prob. dari Persamaan Regresi Data Panel	Keterangan
Uji F	0.0000	Hasil signifikan maka pilih FEM
Uji Hausman	0.0000	Hasil signifikan maka pilih FEM
Uji LM	-	Karena Uji F dan Uji Hausman memilih FEM maka Uji ini tidak perlu dilakukan
Kesimpulan	Fixed Effect Model	

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2023

4.2.3. Model Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini, Model *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk menentukan jenis variabel moderasi dengan menggunakan 2 persamaan sebagai berikut:

1. Persamaan 1

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 NPFumkm_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 SBDK_{it} + \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \\ & \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

2. Persamaan 2

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 NPFumkm_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 SBDK_{it} + \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \\ & \beta_6 (\text{Log}(DPK)_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it}) + \beta_7 (NPFumkm_{it} \times \\ & \text{Log}(ISFI)_{it}) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Kedua Persamaan diatas kemudian diaplikasikan pada model regresi data panel dengan *Fixed Effects Model* sehingga diperoleh *Model Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan hasil berikut:

TABEL IV.4 Hasil Estimasi Model *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Pembiayaan UMKM			
	Persamaan 1 Uji MRA		Persamaan 2 Uji MRA	
	Koefisien	t-statistik	Koefisien	t-statistik
Constant	-0.228511	-2.434006**	0.337409	2.308842**
Log(DPK)	0.162293	11.95802***	0.142132	7.870842***
NPFumkm	-0.003155	-3.063832***	-0.026569	-8.259760***
LOG(Pumkm _{t-1})	0.870264	83.12396***	0.836066	75.16986***
SBDKm	-0.000739	-0.627799	-0.001329	-1.145171
Log(ISFI)	0.087689	7.812144***	0.353759	5.870514***
Log(DPK)*Log(ISFI)			-0.025868	-3.583947***
NPFumkm*Log(ISFI)			-0.008826	-7.525533***
Adjusted R ²	0.996913		0.997025	
F-statistic	15545.18		15303.88	

Catatan: *, **, *** = masing-masing signifikan pada 0,10; 0,05; dan 0,01

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil estimasi MRA maka dapat diketahui bahwa:

1. Persamaan 1 diperoleh bahwa Variabel Log(ISFI) positif signifikan.
2. Persamaan 2 diperoleh bahwa Variabel Log(DPK)*Log(ISFI) negative signifikan dan NPFumkm*Log(ISFI) negative signifikan

Dapat disimpulkan bahwa Variabel Keuangan Inklusif yang diprosikan oleh ISFI merupakan Variabel Quasi Moderator, dimana ISFI merupakan Variabel Independen sekaligus Variabel Moderator.

4.2.4. Interpretasi Model Terbaik

Berdasarkan hasil estimasi Uji *Model Moderated Regression Analysis* (MRA), diketahui jenis Variabel Moderator merupakan Quasi Moderator. Kemudian Variabel Keuangan Inklusif dimasukkan ke dalam Persamaan Regresi Data Panel sehingga diperoleh Persamaan Model Terbaik dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Log}(Pumkm)_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(DPK)_{it} + \beta_2 \text{NPFumkm}_{it} + \\ & \beta_3 \text{Log}(Pumkm)_{i(t-1)} + \beta_4 \text{SBDK}_{it} + \beta_5 \text{Log}(ISFI)_{it} + \\ & \beta_6 (\text{Log}(DPK)_{it} \times \text{Log}(ISFI)_{it}) + \beta_7 (\text{NPFumkm}_{it} \times \\ & \text{Log}(ISFI)_{it}) + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Dimana β_0 adalah koefisiensi regresi dan ε_{it} adalah Error

Hasil Estimasi dari Persamaan Model Terbaik dengan menggunakan Model Regresi Data

Panel, sebagai berikut:

TABEL IVI.5 Hasil Estimasi Persamaan Model Terbaik

Variabel	Pembiayaan UMKM	
	<i>Fixed Effects Model</i>	
	Koefisien	t-statistik
Constant	0.337409	2.308842**
Log(DPK)	0.142132	7.870842***
NPFumkm	-0.026569	-8.259760***
LOG(Pumkm _{t-1})	0.836066	75.16986***
SBDK _m	-0.001329	-1.145171
Log(ISFI)	0.353759	5.870514***
Log(DPK)*Log(ISFI)	-0.025868	-3.583947***
NPFumkm*Log(ISFI)	-0.008826	-7.525533***
Adjusted R ²	0.997025	
F-statistic	15303.88	

Catatan: *, **, *** = masing-masing signifikan pada 0,10; 0,05; dan 0,01

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2023

4.2.5. Pengujian Hipotesis

4.2.5.1. Pengujian t-test

Berdasarkan TABEL IV.5 dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan DPK sebesar 1 Milyar Rupiah maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM sebesar 0.142132 Milyar Rupiah.
2. NPF UMKM berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara negatif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan NPF umkm sebesar 1% menyebabkan penurunan Pembiayaan BUS Sektor UMKM sebesar 0.026569 Milyar Rupiah.
3. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada periode sebelumnya sebesar 1 Milyar maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM sebesar 0.836066 Milyar Rupiah.
4. Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro tidak berpengaruh pada semua level signifikan secara negatif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya Pembiayaan BUS Sektor UMKM telah Independen karena tidak dipengaruhi oleh Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro.
5. Keuangan Inklusif berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan indeks

ISFI sebesar 0,1 maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM sebesar 0.353759 Milyar Rupiah.

6. Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara negatif terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK akan memperlemah pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM sebesar 0.025868 atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM sebesar 0.025868.
7. Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF berpengaruh signifikan pada level 0,01 secara negatif terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF akan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM sebesar 0.008826 atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM sebesar 0.008826.

4.2.5.2. Pengujian F-test

Berdasarkan TABEL IV.5 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic sebesar 15303.88 yang berarti Nilai F-statistic $> \alpha = 0,05$ sehingga menolak H_0 , menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu DPK, NPF, Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya, SBDKm, Keuangan Inklusif terhadap Variabel Dependen yakni Pembiayaan BUS Sektor UMKM.

4.2.5.3. Uji Koefisien Determinasi (uji R²)

Berdasarkan TABEL IV.5 dapat diketahui nilai Adjusted R2 sebesar 0.997025 yang berarti model mampu menjelaskan Pembiayaan BUS Sektor UMKM sebesar 99,70%.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan sebelumnya, dapat diringkas sebagai berikut:

TABEL IV.6 Ringkasan Hasil dan Kesesuaian dengan Hipotesis Utama

No	Hipotesis	Hasil Regresi	Kesesuaian dengan Hipotesis Utama
1	H1: DPK memengaruhi Pembiayaan BUS sektor UMKM secara positif	Positif Signifikan	Sesuai
2	H2: NPF memengaruhi Pembiayaan BUS sektor UMKM secara negatif	Negatif signifikan	Sesuai
3	H3: Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya memengaruhi Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif	Positif Signifikan	Sesuai
4	H0: SBDK Mikro tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan independensi pembiayaan BUS Sektor UMKM	Gagal Menolak H0, Tidak Berpengaruh	Sesuai
	H4: SBDK Mikro berpengaruh terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM, membuktikan bahwa pembiayaan BUS Sektor UMKM tidak sepenuhnya independensi	Menolak H4	
5	H5: Keuangan Inklusif memengaruhi Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif	Positif Signifikan	Sesuai
6	H6: Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK memperkuat pengaruh	Negatif Signifikan	Tidak Sesuai

	hubungan DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM		
7	H7: Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF memperlemah pengaruh hubungan NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM	Negatif Signifikan	Sesuai

Sumber: Data Diolah Eviews 12, 2023

Berdasarkan TABEL IV.6 di atas, maka pembahasan dijelaskan, sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil Estimasi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif. Hal ini mengimplikasikan ketika dana pihak ketiga yang diperoleh dari nasabah berupa tabungan, giro, deposito atau yang setara dengan itu meningkat pada BUS maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh BUS kepada UMKM baik untuk pembiayaan Modal Kerja maupun Investasi akan bertambah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Effendi et al., (2018), Indrawati & Basuki, (2017), dan Pradesyah & Triandhini, (2021).

Namun temuan ini berbeda dengan penelitian oleh (Saputri & Wibowo, 2018; Suhel et al., 2018) yang menemukan hasil berkebalikan dengan hasil penelitian ini dan (I. Setiawan et al., 2023) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh DPK terhadap distribusi pembiayaan UMKM. Lebih lanjut ada pula temuan dari (I. Effendi & RS, 2020) tentang dampak covid-19 terhadap Bank Syariah menjelaskan tidak ada tanda-tanda kecemasan atau panik dari nasabah dalam situasi pandemic saat ini dimana tingkat kepercayaan dari para nasabah, baik yang menyimpan maupun yang

meminjam, tetap tinggi meskipun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Permintaan akan pinjaman masih tetap stabil, begitu pula dengan simpanan yang dipegang oleh nasabah.

Kembali pada konsistensi hasil penelitian, bahwa ketika DPK bertambah maka Pembiayaan BUS Sektor UMKM akan meningkat. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah DPK pada BUS sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada Perbankan Syariah yang menerapkan nilai-nilai Syariah dalam bisnisnya. Sehingga dalam menjaga kepercayaan dari nasabah, BUS sebagai Lembaga intermediasi menyalurkan DPK untuk meningkatkan penyaluran dana kepada Sektor UMKM yang merupakan Sektor Produktif yang menyumbang sekitar 60,51% terhadap PDB dan menyerap hampir 96,92% dari total angkatan kerja nasional. (Limanseto, 2023b)

Hal tersebut di atas, sejalan dengan target yang dicanangkan oleh Presiden RI bahwa pembiayaan kepada Sektor UMKM pada tahun 2024 minimal 30 persen dalam rangka meningkatkan akses UMKM (Limanseto, 2023a). Sehingga dalam rangka memenuhi target tersebut diantaranya telah diterbitkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai tonggak baru dalam reformasi regulasi sektor keuangan Indonesia.

4.3.2. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa NPF UMKM berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara negatif. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan persentase dari NPF UMKM menyebabkan penurunan Pembiayaan BUS

Sektor UMKM. Penyebab hal tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari NPF UMKM dapat mempengaruhi likuiditas BUS yang akhirnya mengurangi jumlah alokasi pembiayaan BUS pada Sektor UMKM. Lebih lanjut, diperlukan sebuah diversifikasi risiko seperti mengalokasikan ke pembiayaan korporasi, pembiayaan lainnya, SBIS, PUAS, dan instrumen moneter syariah lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa dana yang diberikan kepada nasabah pembiayaan juga merupakan penyaluran dari dana pihak ketiga, disisi lain juga mempertimbangkan profitabilitas Lembaga.

Selain itu, dengan naiknya risiko gagal bayar membuat syarat-syarat pemberian pembiayaan UMKM menjadi lebih ketat yang mengakibatkan UMKM terjebak dengan persyaratan seperti catatan pembiayaan yang baik, jaminan, laporan keuangan yang baik, dll seperti hasil temuan dari (Aldaba, 2012; Santoso, 2022) Namun, dari sisi BUS hal tersebut merupakan langkah pengamanan dari risiko gagal bayar sebagai mana peraturan OJK dan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aset dan Kesehatan Bank untuk menghindari risiko sistemik dimana rasio NPF dikatakan baik jika berada dibawah 5 persen. Masalah tersebut, justru menjadi hambatan besar UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Seakan-akan menjadi sebuah dilema ketika BUS dihadapkan untuk mendorong percepatan pembiayaan UMKM namun tak bisa terlepas dari risiko gagal bayar. Apalagi usaha UMKM yang sedang dirintis atau *start up* yang membutuhkan modal kerja dan investasi dalam pengembangan bisnis mereka.

Kembali kepada konsistensi Hasil penelitian, bahwasanya BUS akan mengurangi jumlah pembiayaan Sektor UMKM jika persentase dari NPF mengalami kenaikan

telah sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya dari (A'yun, 2020; Ernawati et al., 2021; Indrawati & Basuki, 2017; Pradesyah & Triandhini, 2021; Pramono et al., 2019; Saputri & Wibowo, 2018; D. Setiawan et al., 2022; Suhel et al., 2018). Namun penelitian ini berkebalikan dengan hasil temuan dari (I. Setiawan et al., 2023) dalam paparannya menjelaskan Bank dengan NPF tinggi akan memilih pembiayaan dengan lebih hati-hati. Adapun NPF semakin meningkat diikuti dengan pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM yang tumbuh secara konsisten seiring dukungan untuk pemulihan UMKM dari dampak Covid-19.

Dalam hasil penelitian lain oleh (I. Effendi & RS, 2020) memaparkan bahwa Keterlambatan pembayaran pembiayaan tentu akan berdampak pada performa keseluruhan bank, namun dari perspektif Non-Performing Financing (NPF), bank syariah masih menunjukkan ketahanan terhadap dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian, jika melihat gambaran keseluruhan, bank syariah masih tetap dalam kondisi yang sehat karena tingkat NPF masih berada di bawah 5%. Selain itu, tingkat kepercayaan nasabah terhadap penyimpanan dan peminjaman tetap tinggi, meskipun menghadapi krisis akibat Covid-19. Permintaan akan pinjaman dan simpanan masih tetap stabil, menunjukkan kondisi yang positif. Tidak ada tanda-tanda kepanikan dari nasabah dalam situasi ini.

Adapun dalam masa covid 19, Pemerintah dalam hal ini OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan scheduling pembiayaan sebagai upaya ekonomi yang diberikan oleh OJK bertujuan untuk mendorong optimalisasi peran perbankan sebagai Lembaga intermediasi keuangan, menjaga stabilitas sistem finansial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jika penerima pembiayaan tidak

merespons dengan baik pada rangsangan ekonomi ini dan tidak memenuhi tanggung jawab pembayaran angsuran, situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan di sektor perbankan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tindakan stimulus kelonggaran pembiayaan yang diberikan harus diterima dengan sikap yang cermat. Masyarakat diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan demi kepentingan ekonomi bersama. (OJK, 2020b)

4.3.3. Pengaruh Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil Estimasi menunjukkan bahwa Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM secara positif. Hal ini berarti setiap kenaikan Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada periode sebelumnya, maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode selanjutnya. Hal tersebut, sejalan dengan implikasi dari pola pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh catatan historis pendanaan sebelumnya, terutama yang menunjukkan jejak positif. Keberhasilan catatan baik ini membangun keyakinan dan peluang bagi lembaga keuangan untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada UMKM.

Hal diatas menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan perkembangan UMKM. Sebagai contoh dalam konteks bank Syariah yang menggunakan riwayat pertumbuhan pendanaan sebagai acuan untuk menjaga pertumbuhan pendanaan UMKM di masa mendatang. Apabila rata-rata pendanaan

di setiap cabang pada periode sebelumnya mengalami peningkatan, maka bisa diasumsikan bahwa pendanaan bagi UMKM juga akan bertambah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, hal ini berpotensi memengaruhi pendanaan UMKM di masa depan terjadi penurunan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Indriani & Priyanto, (2018) dan Suhel et al., (2018).

4.3.4. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit Mikro terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro tidak berpengaruh pada semua level signifikan secara negatif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya Pembiayaan BUS Sektor UMKM telah berjalan dengan Independen karena tidak dipengaruhi oleh Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro pada Bank Konvensional dimana peran penting yang dimiliki SBDK yakni dalam memberikan kejelasan kepada nasabah dan mempermudah mereka dalam menilai manfaat dan biaya dari kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional pada segmen mikro.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Azizuddin, 2022) dimana Suku Bunga kebijakan (BI 7 days Repo Rate) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana untuk pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena bank syariah tidak mengadopsi sistem bunga yang melibatkan riba. Selain itu, (Mubarok & Rusdianto, 2019) menemukan bahwa tidak ada hubungan dua arah atau satu arah antara variabel pembiayaan dengan variabel suku bunga yang berarti dalam penyaluran pembiayaan bank Syariah menerapkan prinsip Syariah. Selain itu, pembiayaan

UMKM yang diberikan oleh perbankan syariah lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM yang diberikan oleh perbankan konvensional saat terjadi guncangan moneter (Ramadhan & Beik, 2013).

Sebaliknya, Hasil penelitian lain dengan studi kasus di negara Malaysia menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito dan pembiayaan bank Islam di Malaysia dipengaruhi oleh kedua tingkat suku bunga konvensional dan kebijakan Bank Negara Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa bank Islam melayani pelanggan yang didorong oleh keuntungan (Saeed et al., 2023). Temuan lain dengan studi kasus di negara Pakistan menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek antara volatilitas suku bunga dan pembiayaan industri perbankan Islam, memberikan bukti signifikan untuk pergerakan bersama dan konvergensi. Oleh karena itu, meskipun beroperasi berdasarkan ideologi bebas bunga, pembiayaan bank Islam yang beroperasi dalam sistem perbankan ganda terkena risiko suku bunga, terutama karena penggunaan acuan suku bunga, yang pada gilirannya membuat bank Islam rentan terhadap risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan (Nouman et al., 2022).

Hal serupa juga dipaparkan berdasarkan bukti adanya keterkaitan jangka panjang antara tingkat pembiayaan Islam dan tingkat pinjaman konvensional ditemukan. Namun, bukannya simetris, keterkaitan antara keduanya bersifat asimetris. Penentuan harga asimetris pada tingkat pembiayaan Islam dan beberapa kontrak spesifik seperti tingkat Mudharaba dan Murabaha di Indonesia secara kuat mengikuti penurunan tingkat pinjaman konvensional, tetapi cenderung kurang responsif terhadap peningkatan tingkat pinjaman konvensional. Penentuan harga

asimetris pada tingkat pembiayaan Islam di Malaysia jelas terikat pada tingkat pinjaman konvensional. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa peminjam bank Islam adalah peminjam yang didorong oleh keuntungan dalam sistem perbankan ganda. Oleh karena itu, tingkat pembiayaan Islam dipengaruhi untuk mengikuti tingkat pinjaman konvensional karena tingkat pembiayaan Islam yang tidak kompetitif. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan Islam dengan jelas mengikuti tingkat pinjaman konvensional dalam sistem perbankan ganda (Widarjono & Rafik, 2023).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang kontra dapat diketahui adanya indikasi bahwa negara yang menerapkan *dual banking system* rentan dipengaruhi oleh suku bunga dimana masyarakat menjadikan bank Syariah sebagai substitusi dari bank konvensional yang merefleksikan masyarakat lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan dengan konsep yang sesuai dengan Syariah. Namun, dibalik temuannya (Nouman et al., 2022) menyarankan agar bank-bank Islam memiliki acuan sendiri yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terlalu terkait dengan acuan konvensional. Ini dapat digunakan sebagai indikator yang kuat dari biaya rata-rata yang diharapkan dari pendanaan pasar antar bank jangka pendek. Selain itu, hal ini akan membantu menyelesaikan masalah paparan bank Islam terhadap risiko suku bunga, risiko tingkat pengembalian, dan risiko penarikan. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam menetapkan identitas unik bank Islam, tetapi juga akan memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian akibat krisis keuangan di masa depan.

Adapun terdapat hal yang menarik ditengah pemulihan setelah pandemic yakni Indonesia mampu mempertahankan peringkat ketiga dalam *Islamic Finance Development Indicator 2022*. Menjadi salah satu negara yang paling unggul dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi Syariah (ICD & REFINITIV, 2022; OJK, 2023). Sehingga kembali pada konsistensi hasil penelitian, hal tersebut ikut mendukung bukti tentang keunikan Bank Syariah yang menerapkan nilai-nilai Syariah dalam pengelolaan bisnisnya tercermin dari pembiayaan BUS Sektor UMKM yang menerapkan akad berbasis aset dan ekuitas sehingga tidak terpengaruh oleh Suku Bunga. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini, Bank Umum Syariah sudah memperlihatkan Independensinya dalam memberikan pembiayaan kepada Sektor UMKM.

4.3.5. Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Keuangan Inklusif berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan indeks ISFI maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada setiap provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahyar, 2019; Isrowiyah, 2019) menunjukkan Keuangan inklusif yang mencakup akses yang lebih mudah dan lebih terjangkau terhadap layanan keuangan oleh segmen masyarakat yang lebih luas, berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keuangan inklusif di suatu daerah atau negara, maka diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah dan aksesibilitas pembiayaan yang diberikan kepada UMKM di wilayah tersebut.

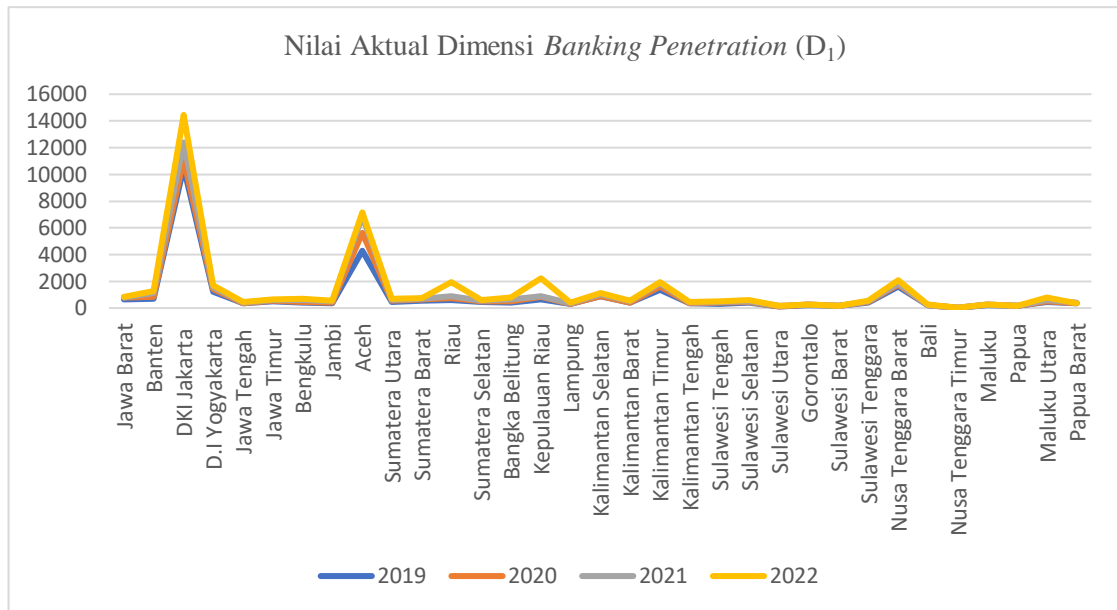
Adapun Indeks Inklusi Keuangan Syariah terdiri dari 3 dimensi yakni *banking penetration*, *availability of banking services*, dan *usage*. Lebih lanjut, statistic deskriptif dari masing-masing dimensi sebagai berikut:

TABEL IVIII.7 Statistik Deskriptif Dimensi Keuangan inklusif (D)

Nilai Aktual Dimensi <i>Banking Penetration</i> (D ₁)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	21,68	23,93	26,57	30,10	25,57
Max.	10537,03	11119,07	12392,40	14452,23	12125,18
Avg.	913,66	1038,10	1174,98	1379,20	1126,48
Nilai Aktual Dimensi <i>Avaibility of Banking Services</i> (D ₂)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
Max.	3,30	4,25	6,79	6,01	5,09
Avg.	0,75	0,78	0,83	0,80	0,79
Nilai Aktual Dimensi <i>Usage</i> (D ₃)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	17,67	16,57	18,17	18,15	17,64
Max.	1064,75	1685,12	1917,89	1825,02	1623,19
Avg.	153,40	182,08	193,95	199,30	182,18

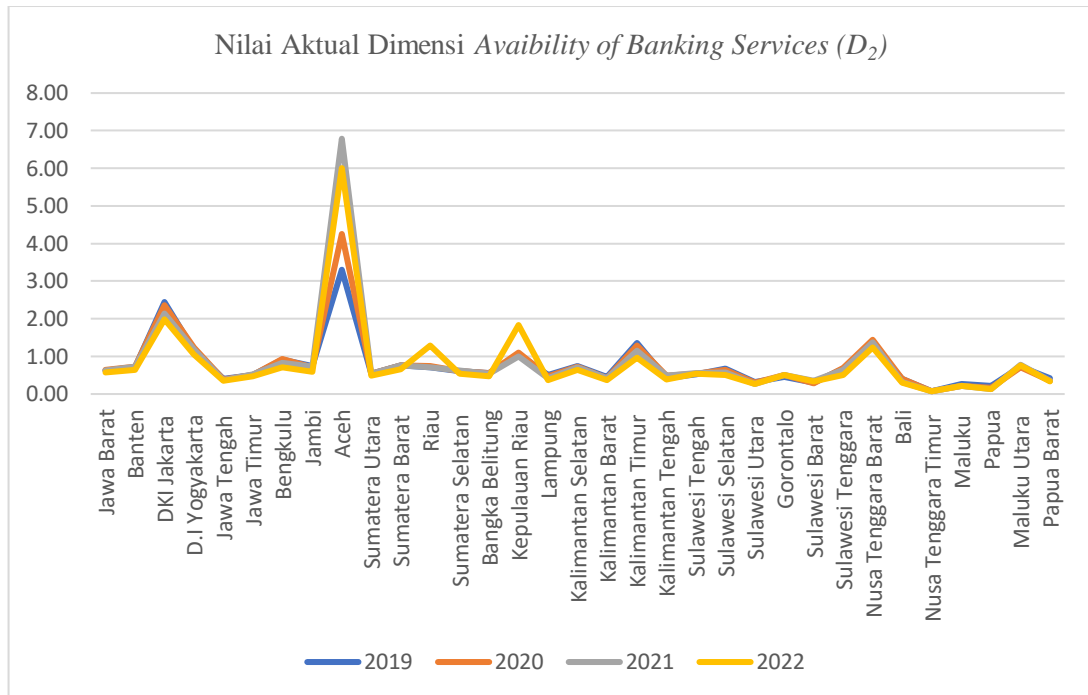
Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki sebanyak mungkin pengguna, karena itu harus memiliki banyak pengguna. Berdasarkan TABEL IV.7 di atas diketahui Dimensi *Banking Penetration* (D₁) pada tahun 2019 – 2022 menunjukkan Jumlah DPK perbankan syariah rata-rata per 1000 orang di Indonesia adalah 1126,48 Juta Rupiah atau 1,126 Milyar rupiah. Adapun dari 33 Provinsi di Indonesia yang memperoleh jumlah DPK perbankan syariah rata-rata per 1000 orang tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta dengan 12.125 Juta rupiah atau 12,125 Milyar Rupiah per 1000 penduduk (Lihat GAMBAR IV.1).

GAMBAR IV.1 Nilai Aktual Dimensi *Banking Penetration* (D1)

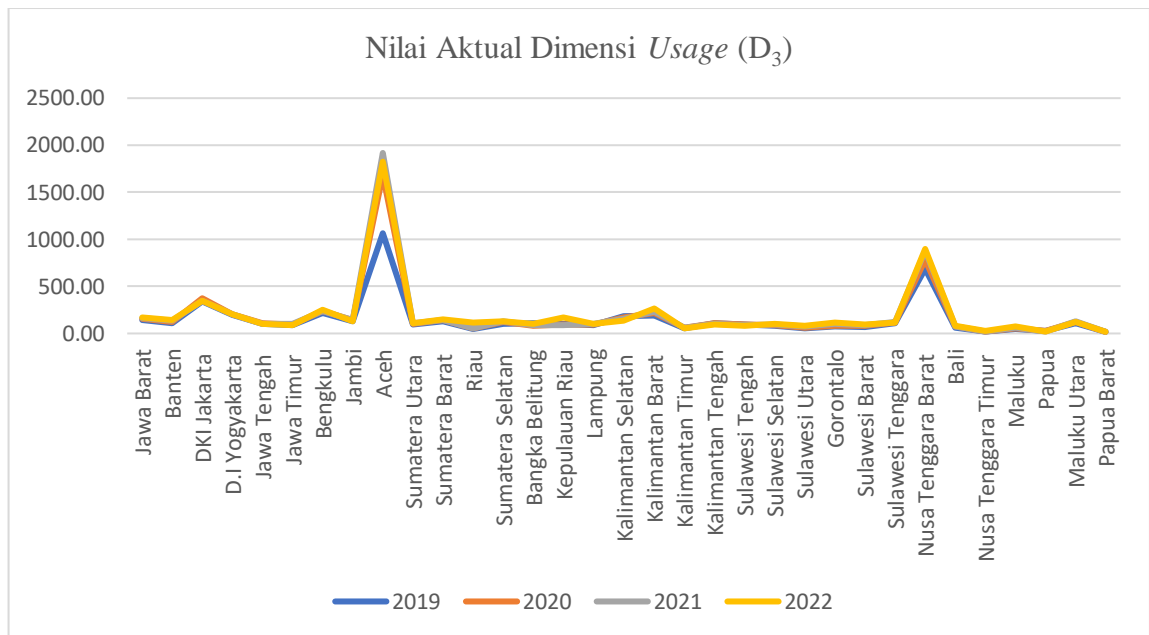
Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Selain memiliki banyak pengguna, ketersediaan jasa perbankan juga diperlukan dalam keuangan inklusif mengacu pada luasnya layanan perbankan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya di mana pun mereka berada. Berdasarkan TABEL IV.7 di atas Dimensi *Availability of Banking Services* pada Tahun 2019 – 2022 menunjukkan perbankan syariah rata-rata memiliki 0,79 unit untuk setiap 100.000 orang Indonesia atau 79 unit untuk setiap 10 juta penduduk yang digunakan untuk pelayanan dengan kata lain 1 unit digunakan untuk melayani 126.582 penduduk. Adapun dari 33 Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah ketersediaan jasa perbankan Syariah tertinggi yakni Provinsi Aceh dengan rata-rata 5 unit untuk setiap 100.000 penduduk (Lihat GAMBAR IV.2).

GAMBAR IV.2 Nilai Aktual Dimensi *Availability of Banking Services* (D_2)

Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Selanjutnya, penggunaan jasa Perbankan Syariah harus bermanfaat pada masyarakat. Berdasarkan TABEL IV.7 di atas Dimensi *Usage* pada Tahun 2019 – 2022 memiliki rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 182,18 Milyar Rupiah. Adapun dari 33 Provinsi di Indonesia yang memiliki rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah tertinggi yakni Provinsi Aceh dalam hal penggunaan jasa layanan perbankan Syariah oleh masyarakat (Lihat GAMBAR IV.3).

GAMBAR IVI.3 Nilai Aktual Dimensi *Usage* (D₃)

Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

TABEL IX.8 Statistik Deskriptif Indeks Keuangan inklusif Syariah (d)

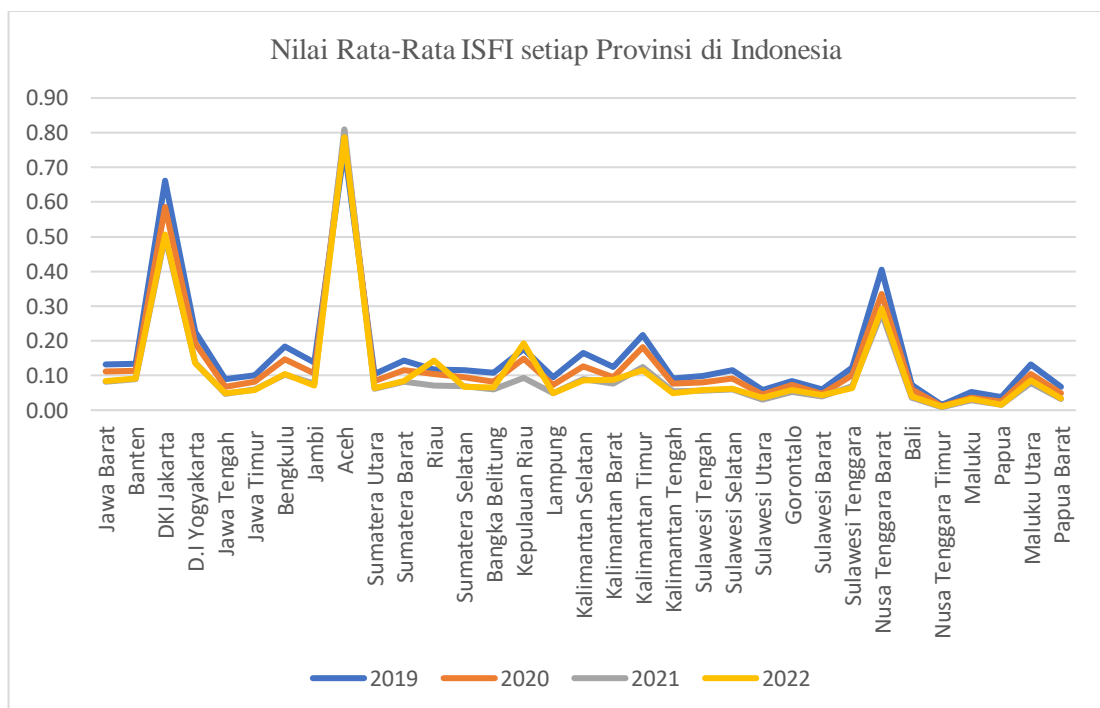
Indeks <i>Banking Penetration</i> (d ₁)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Max.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Avg.	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
Indeks <i>Avaibility of Banking Services</i> (d ₂)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Max.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Avg.	0,23	0,19	0,12	0,13	0,17
Indeks dimensi <i>Usage</i> (d ₃)					
Stat.	2019	2020	2021	2022	Average
Min.	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Max.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Avg.	0,14	0,11	0,10	0,11	0,12

Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Berdasarkan TABEL IV.8 di atas diketahui bahwa dimensi *Avaibility of Banking Services* memiliki nilai rata-rata tertinggi selama periode tahun 2019-2022. Pada

posisi berikutnya dimensi *Usage* dan pada posisi terakhir dimensi *Banking Penetration*. Adapun dimensi *Availability of Banking Services* dan dimensi *Usage* diketahui memiliki nilai lebih tinggi dari dimensi *Banking Penetration* sehingga bisa disimpulkan, kedua dimensi tersebut memiliki pengaruh lebih besar dalam konteks keuangan inklusif syariah di Indonesia. Selain itu, dimensi *Usage* juga mencerminkan nilai indeks yang cukup positif. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga perbankan syariah telah berperan penting sebagai perantara keuangan bagi masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai keperluan penggunaan, sektor, dan industri.

GAMBAR IVII.4 Nilai Rata-Rata ISFI setiap Provinsi di Indonesia



Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Terdapat tiga kategori hasil pengukuran ISFI diantara yaitu pertama, Nilai ISFI dianggap rendah bila nilai ISFI < 0,3; kedua, Nilai ISFI dianggap medium atau

sedang bila nilainya antara 0,3 s.d. 0,6; dan ketiga, nilai ISFI dianggap tinggi jika nilainya antara 0,6 s.d. 1 (Sarma, 2012). Berdasarkan GAMBAR IV.4 di atas diketahui bahwa yang memiliki indeks ISFI kategori tinggi yakni Provinsi Aceh yakni dengan nilai ISFI sebesar 0,79. Dilanjutkan dengan Indeks ISFI kategori medium yakni Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan selain 3 Provinsi tersebut memiliki kategori nilai ISFI yang rendah yakni dibawah 0,3 (Lihat TABEL IV.9). Selain itu, terdapat hal menarik lain bila dilihat dari GAMBAR IV.4, diketahui bahwa Indeks ISFI DKI Jakarta mengalami penurunan dari kategori Tinggi ke Medium. Hal tersebut berdasarkan nilai dimensi *Availability of Banking Services* dan dimensi *Usage* mengalami penurunan. Adapun hal ini berbanding terbalik dengan nilai dimensi *Banking Penetration* capaian tertinggi di Indonesia.

Provinsi Riau dan Provinsi Kep. Riau terlihat menarik meskipun memiliki indeks ISFI kategori rendah, karena telah terjadi lonjakan signifikan pada Tahun 2022 melampaui Indeks ISFI periode sebelum-sebelumnya ternyata hal ini disebabkan oleh Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau berhasil menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Syariah (Perseroda) atau PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Hal tersebut menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam kemajuan sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia (Putra, 2022). Diketahui pula, Nilai ISFI terjadi penurunan dari tahun 2019 s.d. 2021 dan mulai stabil pada tahun 2022 menunjukkan pengaruh dari masa pandemic Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

TABEL IV.9 Nilai ISFI di Setiap Provinsi di Indonesia

Provinsi	2019	2020	2021	2022	Average
Aceh	0,75	0,79	0,81	0,79	0,79
DKI Jakarta	0,66	0,59	0,50	0,51	0,56
Nusa Tenggara Barat	0,40	0,34	0,28	0,29	0,33
D.I Yogyakarta	0,23	0,19	0,14	0,14	0,17
Kalimantan Timur	0,22	0,18	0,12	0,12	0,16
Kepulauan Riau	0,18	0,15	0,09	0,19	0,15
Bengkulu	0,18	0,15	0,10	0,10	0,13
Kalimantan Selatan	0,17	0,13	0,09	0,09	0,12
Riau	0,12	0,10	0,07	0,14	0,11
Banten	0,13	0,11	0,09	0,09	0,11
Sumatera Barat	0,14	0,12	0,08	0,08	0,11
Jawa Barat	0,13	0,11	0,08	0,08	0,10
Maluku Utara	0,13	0,10	0,08	0,09	0,10
Jambi	0,14	0,11	0,08	0,07	0,10
Kalimantan Barat	0,13	0,09	0,08	0,09	0,10
Sulawesi Tenggara	0,12	0,10	0,07	0,06	0,09
Sumatera Selatan	0,11	0,09	0,07	0,07	0,09
Sulawesi Selatan	0,12	0,09	0,06	0,06	0,08
Bangka Belitung	0,11	0,08	0,06	0,06	0,08
Sumatera Utara	0,10	0,08	0,06	0,06	0,08
Jawa Timur	0,10	0,08	0,06	0,06	0,08
Sulawesi Tengah	0,10	0,08	0,06	0,06	0,07
Kalimantan Tengah	0,09	0,08	0,05	0,05	0,07
Gorontalo	0,08	0,07	0,05	0,06	0,07
Lampung	0,10	0,07	0,05	0,05	0,07
Jawa Tengah	0,09	0,07	0,05	0,05	0,06
Bali	0,07	0,06	0,04	0,04	0,05
Sulawesi Barat	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05
Papua Barat	0,07	0,05	0,03	0,03	0,05
Sulawesi Utara	0,06	0,05	0,03	0,04	0,04
Maluku	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04
Papua	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Average Total	0,16	0,13	0,11	0,11	0,13

Sumber: Data diolah, Microsoft Office Excel 16

Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Keuangan inklusif dapat memfasilitasi akses yang mudah dan terjangkau terhadap produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal, sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas masyarakat khususnya terhadap akses pembiayaan BUS Sektor UMKM, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. (PERPRES 114/2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2020; Puspitaningrum, 2021)

4.3.6. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK akan memperlemah pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM.

Adapun hasil temuan ini memiliki hasil berlawanan, dimana sebelumnya diduga akan memperkuat pengaruh namun ternyata hasilnya sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suhel et al., 2018) mengindikasikan bahwa kemampuan bank syariah untuk menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada masyarakat dan investor mengalami kesulitan, sehingga wajar jika peningkatan simpanan akan ditampung dalam simpanan berjangka atau rekening yang dimiliki oleh bank syariah di Bank Indonesia. Hal serupa ditemukan oleh (Saputri & Wibowo, 2018) memaparkan bahwa Bank syariah mungkin menolak permintaan pembiayaan

modal untuk UMKM karena catatan pembiayaan yang buruk, jaminan yang tidak mencukupi, arus kas dan penjualan yang tidak memadai, dan kondisi bisnis yang tidak stabil. Di samping itu, DPK yang terkumpul dapat dialihkan ke sektor selain UMKM.

Kembali pada konsistensi hasil, ketika upaya keuangan inklusif ditingkatkan, akan ada peningkatan dalam jumlah DPK, sehingga UMKM semakin mudah mendapatkan akses ke layanan keuangan pada pembiayaan baik modal kerja maupun investasi. Oleh karena itu, menyebabkan semakin banyak jumlah UMKM yang memperoleh manfaat pembiayaan, namun seiring dengan kondisi dimasa covid-19 menyebabkan UMKM terkena dampak dari pembatasan kegiatan yang diberlakukan pemerintah sehingga pendapatan UMKM mengalami penurunan.

Adapun diketahui pada bulan Desember 2022 bahwa porsi pembiayaan berbasis piutang lebih besar dibandingkan dengan berbasis bagi hasil dengan rasio 60% : 39% dari total pembiayaan BUS berdasarkan akad. Hal ini menyebabkan banyak UMKM harus membayar angsuran pembiayaan yang *fixed* karena perjanjian akad berbasis piutang. Akibatnya akad berbasis piutang yang semula merupakan pembiayaan yang rendah risiko karena pembayaran angsuran yang *fixed* tidak seperti bagi hasil, menjadi pemilik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbasis bagi hasil ketika terkena dampak covid-19. Sehingga terjadi peningkatan risiko gagal bayar oleh UMKM.

Sebagaimana hasil pembahasan sebelumnya, jika rasio NPF meningkat maka BUS akan mengurangi jumlah penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan akses pembiayaan justru akan memperlemah hubungan pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM.

4.3.7. Pengaruh Keuangan Inklusif dalam memoderasi *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF akan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Implikasinya yakni dengan adanya keuangan inklusif maka akan mengatasi NPF yang tinggi, sehingga dengan memperlemah rasio NPF maka pembiayaan BUS Sektor UMKM dapat meningkat. Sehingga Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pembiayaan pada sektor UMKM dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal bagi pelaku UMKM. Keberadaan Kantor Cabang Bank memberikan pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan perbankan oleh UMKM, dan banyaknya cabang bank syariah di daerah terpencil dapat mempermudah akses UMKM, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kinerja, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam menyediakan pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah, membantu UMKM mengatasi tantangan bisnis, dan mengelola risiko NPF dengan

lebih efektif. (Beck et al., 2010; Degryse & Ongena, 2005; Evanoff, 1988; Nugroho, 2021; Ono et al., 2016)

Peran keuangan inklusif terlihat dari hasil temuan (I. Setiawan et al., 2023) dalam paparannya menjelaskan Bank dengan NPF tinggi akan memilih pembiayaan dengan lebih hati-hati. Adapun NPF semakin meningkat diikuti dengan pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM yang tumbuh secara konsisten seiring dukungan untuk pemulihan UMKM dari dampak Covid-19. Selain itu, adanya kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional telah diterbitkan 3 kali oleh OJK. Diketahui hingga tanggal 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit telah mencapai Rp 936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah ini terdiri dari 5,8 juta debitur UMKM dengan nilai restrukturisasi sekitar Rp371,1 triliun (OJK, 2020a).

Sampai 31 Maret 2023, bank umum syariah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini termasuk penetapan kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk pembiayaan dengan plafon hingga Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar untuk pembiayaan yang direstrukturisasi, dan penetapan kualitas pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas yang ada. Hal ini berdasarkan POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19 (OJK, 2021). Kembali pada hasil penelitian, kebijakan stimulus tersebut merupakan peran keuangan inklusif yang kemudian mengatasi NPF yang tinggi, sehingga dengan memperlemah rasio NPF maka pembiayaan BUS Sektor UMKM dapat meningkat. Membuktikan bahwa dengan meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan DPK maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM.
2. NPF UMKM berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan NPF umkm menyebabkan penurunan Pembiayaan BUS Sektor UMKM.
3. Pembiayaan BUS Sektor UMKM periode sebelumnya berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada periode sebelumnya maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM.
4. Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro tidak berpengaruh secara negatif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya Pembiayaan BUS Sektor UMKM telah Independen karena tidak dipengaruhi oleh Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro.
5. Keuangan Inklusif berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya setiap kenaikan indeks ISFI maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM.

6. Interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK berpengaruh signifikan memperlemah pengaruh hubungan positif DPK terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK akan memperlemah pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM.
7. Interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF memperlemah pengaruh hubungan negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Artinya meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF akan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM.

5.2. Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan DPK maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah DPK pada BUS sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada Perbankan Syariah yang menerapkan nilai-nilai Syariah dalam bisnisnya. Sehingga dalam menjaga kepercayaan dari nasabah, BUS sebagai Lembaga intermediasi menyalurkan DPK untuk meningkatkan penyaluran dana kepada Sektor UMKM yang merupakan Sektor Produktif yang menyumbang sekitar 60,51% terhadap PDB dan menyerap hampir 96,92% dari total angkatan kerja nasional. Hal tersebut, mendukung target yang

dicanangkan oleh Presiden RI bahwa pembiayaan kepada Sektor UMKM pada tahun 2024 minimal 30 persen dalam rangka meningkatkan akses UMKM. Adapun dalam rangka memenuhi target tersebut diantaranya telah diterbitkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai tonggak baru dalam reformasi regulasi sektor keuangan Indonesia.

2. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan NPF UMKM menyebabkan penurunan Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Penyebab hal tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari NPF UMKM dapat mempengaruhi likuiditas BUS yang akhirnya mengurangi jumlah alokasi pembiayaan BUS pada Sektor UMKM. Lebih lanjut, BUS mengambil langkah yang diperlukan yaitu diversifikasi risiko dan lebih selektif dalam memberikan fasilitas pembiayaan UMKM supaya tidak terjadi *adverse selection*. Adapun dalam masa covid 19, OJK mengeluarkan POJK Stimulus COVID-19 untuk menjaga risiko pembiayaan BUS.
3. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan Pembiayaan BUS Sektor UMKM pada periode sebelumnya maka akan meningkatkan Pembiayaan Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Hal tersebut, sejalan dengan pola pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipengaruhi oleh catatan historis pendanaan sebelumnya, terutama yang menunjukkan jejak positif. Keberhasilan catatan baik ini membangun keyakinan dan peluang bagi lembaga keuangan untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada UMKM.

4. Penelitian ini menemukan bahwa Pembiayaan BUS Sektor UMKM telah Independen karena tidak dipengaruhi oleh Suku Bunga Dasar Kredit segmen Mikro atau Suku Bunga Bank Konvensional. Adapun ditengah pemulihan setelah pandemic, Indonesia mampu mempertahankan peringkat ketiga dalam *Islamic Finance Development Indicator 2022* hasil tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling unggul dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi Syariah. Hal tersebut ikut mendukung bukti tentang keunikan Bank Syariah yang menerapkan nilai-nilai Syariah dalam pengelolaan bisnisnya tercermin dari pembiayaan BUS Sektor UMKM yang menerapkan akad berbasis aset dan ekuitas sehingga tidak terpengaruh oleh Suku Bunga.
5. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan indeks ISFI maka akan meningkatkan Pembiayaan BUS Sektor UMKM. Hal tersebut mengimplikasikan semakin tinggi tingkat keuangan inklusif di suatu daerah atau negara, maka diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah dan aksesibilitas pembiayaan yang diberikan kepada UMKM di wilayah tersebut. Diketahui bahwa Aceh menjadi Provinsi yang memiliki Nilai ISFI tertinggi, sedangkan DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat memiliki Nilai ISFI medium, serta 30 provinsi lainnya memiliki Nilai ISFI yang rendah. Hal menarik lain, Provinsi Riau dan Provinsi Kep. Riau mengalami lonjakan nilai ISFI yang disebabkan oleh Konversi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau berhasil menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Syariah (Perseroda) atau PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Hal

tersebut menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam kemajuan sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.

6. Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan DPK akan memperlemah pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh positif DPK terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Diketahui seiring dengan kondisi dimasa covid-19 menyebabkan UMKM terkena dampak dari pembatasan kegiatan yang diberlakukan pemerintah sehingga pendapatan UMKM mengalami penurunan. Adapun diketahui pada bulan Desember 2022 bahwa porsi pembiayaan berbasis piutang lebih besar dibandingkan dengan berbasis bagi hasil dengan rasio 60% : 39% dari total pembiayaan BUS berdasarkan akad. Akibatnya akad berbasis piutang yang semula merupakan pembiayaan yang rendah risiko karena pembayaran angsuran yang fixed tidak seperti bagi hasil, menjadi pemilik risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbasis bagi hasil ketika terkena dampak covid-19. Sehingga terjadi peningkatan risiko gagal bayar oleh UMKM. Selain itu, dapat terjadi ketika BUS melakukan *screening* calon nasabah pembiayaan baru supaya terhindar dari *adverse selection* akibatnya calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak pengajuannya. Selain itu, nasabah yang tidak memiliki kategori lancar akan ditinjau ulang dan ada kemungkinan ditolak pengajuan pembiayaannya jika mengajukan pembiayaan ulang. Di sisi lain, BUS melakukan diversifikasi risiko sehingga tidak menambah

alokasi pada pembiayaan sector UMKM. Tentu perlu diketahui bahwa Nilai ISFI rata-rata di Indonesia rendah yakni 0,13 dan pada periode penelitian juga termasuk dalam masa pandemic yakni Maret 2020 s.d. Desember 2022.

7. Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya interaksi Keuangan Inklusif dengan NPF akan memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM atau meningkatnya Indeks ISFI akan memperlemah hubungan pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan BUS sektor UMKM. Dimana Keuangan inklusif memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pembiayaan pada sektor UMKM dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal bagi pelaku UMKM. Keberadaan Kantor Cabang Bank memberikan pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan perbankan oleh UMKM, dan banyaknya cabang bank syariah di daerah terpencil dapat mempermudah akses pembiayaan UMKM berbasis syariah, mengurangi biaya transportasi, meningkatkan kinerja, membantu UMKM mengatasi tantangan bisnis, dan mengelola risiko NPF. Adapun dalam mengurangi rasio NPF, OJK adanya kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional telah diterbitkan 3 kali oleh OJK yakni penetapan kualitas lancar untuk pembiayaan yang direstrukturisasi.

5.3. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian sehingga diperoleh data aktual dilapangan. Selain itu, perlu adanya perluasan tidak hanya BUS namun bisa UUS dan BPRS untuk melihat skala Bank Syariah di Indonesia.

2. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan untuk melihat peran inklusivitas dan independensi dari *Microfinance Syariah*.
3. Adapun kekurangan pada penelitian ini menggunakan Variabel Pembiayaan UMKM pada periode sebelumnya dimana merupakan Lag dari variabel dependen. Sehingga model dengan memasukkan lag variabel dependen sebagai variabel independen akan melanggar asumsi exogeneity sehingga metode panel statis (PLS, FE, dan RE) akan menghasilkan estimasi yang bias. Secara teori, model yang tepat jika memasukkan lag variabel dependen adalah Panel dinamis dengan metode GMM. Sehingga bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan Variabel Pembiayaan UMKM pada periode sebelumnya disarankan menggunakan Panel Dinamis dengan metode GMM.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, H., Osama, F., & Ahmed, A. (2017). Islamic banking for small and medium enterprises (SMEs): A glance at challenges and prospects in Pakistan “Islamic banking for small and medium enterprises (SMEs): A glance at challenges and prospects in Pakistan.” In *International Journal of Development and Sustainability* (Vol. 6, Issue 12). www.isdsnet.com/ijds
- Ahyar, M. K. (2019). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 5(1), 19–36. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>
- Aldaba, R. M. (2012). *Small and Medium Enterprises' (SMEs) Access to Finance: Philippines* (2012–05). <https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps1205.pdf>
- Amalia, M., & Azizuddin, I. (2022). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Pembiayaan Sektor UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Stability: Journal of Management and Business*, 5(2), 31–46. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/stability>
- A'yun, A. 'Aina. (2020). Micro, Small and Medium Enterprises Financing in Islamic Rural Banks in Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1188>
- Lampiran SEBI No.9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, (2007).
- SEBI No 15/1/DPNP perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, (2013).
- Bank Indonesia. (2023a). *Buku Pedoman Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Subsisten*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023b, June 30). *Akses Pembiayaan UMKM*. [Www.Bi.Go.Id](http://www.Bi.Go.Id). <https://www.bi.go.id/id/umkm/pembiayaan/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2023c, June 30). *Pengembangan UMKM*. [Www.Bi.Go.Id](http://www.Bi.Go.Id). <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/pengembangan-umkm/default.aspx>

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Merrouche, O., & World Bank, T. (2010). *Islamic vs. Conventional Banking Business Model, Efficiency and Stability*. <http://econ.worldbank.org>.
- Bowo Setiyono. (2011). A Model of Micro, Small and Medium Enterprise Financing in Indonesia. *Review of Indonesian Economic and Business Studies*, 2(2), 45–69.
- Degryse, H., & Ongena, S. (2005). Distance, Lending Relationships, and Competition. In *THE JOURNAL OF FINANCE* •: Vol. LX (Issue 1).
- Disli, M., Aysan, A. F., & Abdelsalam, O. (2023). Favoring the small and the plenty: Islamic banking for MSMEs. *Economic Systems*, 47(1), 101051. <https://doi.org/10.1016/J.ECOSYS.2022.101051>
- Effendi, I., & RS, P. H. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(2), 221–230. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.5553>
- Effendi, J., Kamilia, S., Sabiti, M. B., & Nursyamsiah, T. (2018). The determinant of equity financing in sharia banking and sharia business units. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(1), 111–120. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art12>
- Ernawati, Tajuddin, & Asri, M. (2021). Micro, Small and Medium Enterprises Financing of Islamic Banking in Indonesia During The Covid-19 Pandemic. *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 22–33. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihatifaz/article/view/6019#>
- Evanoff, D. D. (1988). Branch Banking and Service Accessibility. In *Source: Journal of Money, Credit and Banking* (Vol. 20, Issue 2). <http://www.jstor.org/stable/1992110>
- Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>
- ICD, & REFINITIV. (2022). *Islamic Finance Development Indicator Report 2022*. <http://bit.ly/IFDI2022>.
- Indrawati, E., & Basuki, A. T. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences Indrawati*, 1(2), 144–153.

- Indriani, S., & Priyanto, T. (2018). Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 91–100.
- Isrowiyah, N. (2019). *Indeks Inklusi Keuangan Syariah serta Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*.
https://eprints.walisongo.ac.id/12672/1/Skripsi_1505036037_Novatul%20Isrowiyah.pdf
- Lestari, L. B. (2020). *Analisis Pengaruh Karakteristik Bank dan Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Sektor UMKM pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2020* [Tesis]. Universitas Islam Negeri.
- Limanseto, H. (2023a, March 9). *Berorientasi Pada Sektor Produktif, Pemerintah Optimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM*.
<https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5004/Berorientasi-Pada-Sektor-Produktif-Pemerintah-Optimalkan-Penyialuran-Pembiayaan-Umkm>.
- Limanseto, H. (2023b, March 21). *Menko Airlangga: Potensi UMKM Menjadi Modal Dalam Ekosistem Pengembangan Ekonomi*. www.Ekon.Go.Id.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5047/menko-airlangga-potensi-umkm-menjadi-modal-dalam-ekosistem-pengembangan-ekonomi#:~:text=Jakarta%2C%202021%20Maret%202023,dari%20total%20tenaga%20kerja%20nasional>.
- Malaysia International Islamic Finance Centre. (2016). *Islamic Finance: Bridging the Funding Gaps of SMEs and MSMEs*. <https://www.mifc.com/-/islamic-finance-bridging-the-funding-gaps-of-smes-and-msmes>
- Mubarok, F., & Rusdianto. (2019). Kendala Pembiayaan Bank Syariah: Pendekatan Granger Causality. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 169–178.
- Nendi, I. (2022). *Interest of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Choosing Banking Financing and Its Impact on Business Performance*.
<https://woc.greenpublisher.id/index.php/woc/article/view/33>
- Nouman, M., Hashim, M., Trifan, V. A., Spinu, A. E., Siddiqi, M. F., & Khan, F. U. (2022). Interest rate volatility and financing of Islamic banks. *PLoS ONE*, 17(7 July). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268906>
- Nugroho, M. A. S. (2021). *Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* [Disertasi]. Universitas Islam Indonesia.

- OJK. (2019). *Buku 8 - Industri Jasa Keuangan Syariah* (8th ed.).
- OJK. (2020a, December 11). *Siaran Pers: OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus Covid-19*. <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19.aspx>.
- OJK. (2020b, December 22). *Stimulus OJK terkait Restrukturisasi Kredit di Bank*. <https://Kontak157.Ojk.Go.Id/Appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>.
- OJK. (2021). *Ringkasan POJK 17/POJK.03/2021 Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19*.
- POJK 2 - 03 - 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (2022).
- OJK. (2023, June 30). *OJK Luncurkan Buku Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*. [https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Info-Terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2022.aspx](https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Info-Terkini/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022.aspx).
- OJK, D. P. dan I. P. (2015). *Metadata Statistik Perbankan Syariah Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)*.
- Ono, A., Saito, Y., Sakai, K., & Uesugi, I. (2016). *Does Geographical Proximity Matter in Small Business Lending? Evidence from Changes in Main Bank Relationships Grant-in-Aid for Scientific Research (S) Working Paper Series No.40*. <http://www.ier.hit-u.ac.jp/hit-refined/>
- PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 1 (2021).
- PERPRES 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, (2020).
- Pradesyah, R., & Triandhini, Y. (2021). The Effect of Third-Party Funds (DPK), Non-Performing Financing (NPF) and Indonesian Sharia Bank Certificates (SBIS) on Sharia Banking Financing Distribution in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(2), 72–77.
- Pramono, I. P., Hartanto, R., & Apriliana, T. (2019). Determinant Factors of Msme Financing In Islamic Bank (Study Case in Indonesia). *Akuntansi Dewantara*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.4309>
- UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah, 1 (2008).

- Puspitaningrum, R. (2021). Empirical Evidence of the Impact of Islamic Financial Inclusion on Human Welfare of Maqashid Sharia Perspective in Indonesia. *RIEF: Review of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 39–50.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Putra, I. (2022, August 25). *Peresmian BRK Syariah sekaligus Pelantikan KDEKS Provinsi Riau*. <https://kneks.go.id/Berita/479/Peresmian-Brk-Syariah-Sekaligus-Pelantikan-Kdeks-Provinsi-Riau?Category=3>.
- Racheal, J.-A., & Uju, M. (2018). Role of Small & Medium Enterprises in Poverty Eradication in Nigeria. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 6(2), 33–49. www.idpublications.org
- Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(2), 175–190.
- Reswita, Andi Irawan, & Ketut Sukiyono. (2021). The Role of Small and Medium Enterprises (SME) on the Economy. *International Journal of Social Science*, 1(4), 467–472. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.743>
- Saeed, S. M., Abdeljawad, I., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2023). Dependency of Islamic bank rates on conventional rates in a dual banking system: A trade-off between religious and economic fundamentals. *International Review of Economics & Finance*, 86, 1003–1021. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2021.09.013>
- Samad, A., & Hassan, M. K. (2018). The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984–1997: An Exploratory Study. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3263331>
- Santoso, B. (2022). *Laporan Kajian Kesenjangan Sisi Permintaan (demand) dan Penawaran (supply) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. www.kompak.or.id
- Saputri, S., & Wibowo, M. G. (2018). Determinan Pembiayaan UMKM di Indonesia Tahun 2011-2015: Pendekatan Generalized Method Of Moment (GMM). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2809>

- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion - A measure of financial sector inclusiveness* (7). https://finance-and-trade.htw-berlin.de/fileadmin/HTW/Forschung/Money_Finance_Trade_Development/working_paper_series/wp_07_2012_Sarma_Index-of-Financial-Inclusion.pdf
- Setiawan, D., Febriansyah, M., & Ardian. (2022). The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 –2022. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–24. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Setiawan, I., Gojali, D., Adisaputra, A. K., Wardiyah, M. L., Ponirah, A., & Sakinah, G. (2023). Determining Factors Affecting MSME Financing: Efforts to Increase the Macroprudential Inclusive Financing Ratio. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 3, 75–84.
- Shelly, R., Sharma, T., & Bawa, S. S. (2020). Role of Micro, Small and Medium Enterprises in Indian Economy. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 84–91. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10459>
- Sriyana, J. (2015). Fiscal Capacity and Poverty Alleviation: A Panel Data Analysis for Yogyakarta Special Province, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.23917/jep.v16i1.956>
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, 1(2), 61–70. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/smo>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhel, Asngari, I., Mardalena, & Andaiyani, S. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues The Economic Scale of Small-Medium Enterprises Financing in Sharia Banking. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 112–117. <http://www.econjournals.com>
- Sulastrri. (2022, December 6). *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*. [Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126. <https://www.bmebi.org/index.php/BEMP/article/view/726/629>

- Uyun, A. (2022). Peran Perbankan Syariah dan Eksistensi UMKM di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.476>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A., & Rafik, A. (2023). Do Islamic banks have their benchmarks for financing rates in the dual-banking system? *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2209954>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Nilai Aktual Dimensi 1

Nilai Aktual Dimensi 1	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	584,26	597,55	599,05	599,73	599,70	627,76	615,83	624,45	629,46	627,96	649,02	660,56	677,10	679,70	688,90	698,71	712,77	718,93
Banten	598,24	615,55	606,55	624,70	624,89	628,29	620,39	647,01	651,48	656,72	673,06	676,81	687,26	716,36	741,61	754,14	763,85	790,37
DKI Jakarta	10.363,08	10.306,52	10.361,81	10.318,15	10.339,76	10.953,70	10.738,93	10.740,05	10.831,74	10.607,92	10.285,24	10.418,49	10.359,80	10.083,32	10.150,45	10.448,22	10.266,88	11.513,26
D.I Yogyakarta	1.147,11	1.088,75	1.088,63	1.083,26	1.074,94	1.095,60	1.117,40	1.135,81	1.127,65	1.127,83	1.182,65	1.197,50	1.224,49	1.251,90	1.244,42	1.262,77	1.268,31	1.243,38
Jawa Tengah	310,05	314,75	318,63	322,44	323,50	341,75	336,90	339,91	344,77	337,13	332,22	358,71	354,50	342,43	371,62	373,56	373,58	383,61
Jawa Timur	453,88	458,67	468,65	473,58	464,76	485,05	484,06	487,23	483,28	476,83	476,91	485,81	494,62	506,49	520,47	527,25	533,15	552,88
Bengkulu	386,27	382,11	379,26	385,80	386,02	410,15	390,84	385,89	374,24	370,03	384,28	394,96	407,17	422,20	429,22	431,50	441,25	460,31
Jambi	313,86	315,84	321,08	326,56	326,51	349,03	345,56	344,93	344,55	339,93	351,07	351,87	367,75	373,33	378,57	379,71	382,80	393,06
Aceh	4.179,76	3.938,03	4.523,25	4.364,52	4.307,55	3.900,54	3.835,00	3.991,56	4.084,10	4.115,75	3.828,67	4.784,43	4.451,01	4.183,91	4.096,96	4.768,38	4.692,63	4.553,17
Sumatera Utara	412,31	415,42	418,38	426,10	425,83	439,41	432,87	440,39	444,13	441,79	447,51	470,41	463,60	469,72	471,22	477,62	490,63	512,80
Sumatera Barat	518,12	515,06	513,61	509,53	509,53	530,36	530,24	534,64	529,18	539,93	546,24	565,90	582,03	586,83	586,09	588,25	598,47	621,12
Riau	529,60	532,24	536,68	554,88	554,53	566,99	571,17	577,06	580,97	579,35	591,74	591,51	608,10	625,78	631,46	642,48	650,85	676,14
Sumatera Selatan	372,01	381,19	378,68	369,75	385,22	398,80	389,60	390,70	408,83	410,58	434,26	455,05	455,78	459,71	463,41	447,26	436,29	442,17
Bangka Belitung	346,50	355,76	334,48	360,57	362,52	349,72	339,75	366,87	361,23	355,09	359,95	441,54	371,07	454,61	453,99	470,51	502,87	488,96
Kepulauan Riau	601,62	553,09	582,85	585,40	628,32	619,36	592,24	620,45	622,18	628,43	670,59	682,14	683,06	672,49	663,65	667,76	693,90	749,29
Lampung	274,72	277,51	282,13	227,57	284,31	296,97	304,20	305,83	300,41	301,57	305,58	315,02	326,10	329,05	326,94	325,64	330,84	340,86
Kalimantan Selatan	776,88	781,56	782,24	788,02	799,83	827,78	815,77	868,38	887,44	867,49	887,38	891,49	912,25	959,06	1.002,31	866,31	825,01	901,61
Kalimantan Barat	361,73	368,62	377,67	372,34	378,55	384,03	379,34	378,41	378,91	362,16	365,34	378,10	385,25	376,66	409,31	400,47	390,72	424,65
Kalimantan Timur	1.159,48	1.160,69	1.180,26	1.199,02	1.222,50	1.259,06	1.254,35	1.258,67	1.272,31	1.278,07	1.318,04	1.344,37	1.386,40	1.378,33	1.420,96	1.419,45	1.427,76	1.444,41
Kalimantan Tengah	339,90	342,25	344,77	305,10	311,00	323,46	321,73	321,36	388,55	390,33	396,16	324,26	334,45	332,80	334,86	342,15	347,81	348,65
Sulawesi Tengah	275,44	280,12	280,22	289,06	295,42	318,48	309,87	304,02	311,66	303,16	326,99	337,02	340,36	346,42	343,44	356,77	362,46	373,04
Sulawesi Selatan	346,41	350,80	354,49	351,15	351,43	365,13	368,03	375,69	371,57	368,19	373,52	382,41	396,89	404,65	414,90	425,49	442,45	448,34
Sulawesi Utara	102,68	101,34	103,82	103,70	105,68	120,03	113,68	117,26	116,43	116,46	113,96	117,60	116,74	114,77	118,10	118,60	119,26	134,39
Gorontalo	222,34	223,03	223,44	221,10	65,83	199,73	209,83	211,95	204,38	223,56	229,34	236,54	237,03	237,97	236,61	237,67	241,80	220,51
Sulawesi Barat	140,09	142,36	140,60	138,72	137,35	147,61	149,13	150,15	151,52	144,51	143,95	149,86	149,27	158,61	155,79	156,35	161,85	172,25
Sulawesi Tenggara	326,03	332,87	339,40	340,85	343,21	355,91	358,21	363,97	366,69	368,68	394,79	397,26	404,50	420,70	429,74	426,87	398,43	422,86
Nusa Tenggara Barat	225,33	235,68	1.646,12	1.645,97	1.585,97	1.211,97	1.358,06	1.433,07	1.535,97	1.665,81	1.439,08	1.504,33	1.443,65	1.605,05	1.716,55	2.028,77	1.939,03	1.585,89
Bali	216,32	218,19	211,02	224,58	222,95	227,33	224,86	223,60	226,80	224,95	225,70	222,17	221,84	218,43	214,30	220,01	226,14	228,78
Nusa Tenggara Timur	21,88	22,84	22,64	22,27	22,65	23,78	22,08	21,52	21,08	21,17	20,58	20,94	21,91	22,12	21,94	21,93	21,49	23,44
Maluku	215,54	218,43	217,66	216,96	207,09	219,44	221,11	226,35	227,41	222,61	226,46	231,51	231,20	230,09	231,51	237,32	239,72	239,84
Papua	180,88	176,49	190,79	178,04	179,33	187,06	189,22	189,44	189,67	186,29	186,60	187,09	186,29	186,77	186,31	188,08	191,26	200,99
Maluku Utara	424,95	357,95	374,03	370,70	379,37	401,91	392,74	394,02	401,81	395,59	426,93	437,35	451,16	453,67	459,59	462,51	452,44	461,94
Papua Barat	338,05	338,73	334,12	335,12	333,78	364,13	367,71	363,14	369,67	361,41	356,73	355,80	362,05	368,19	365,57	377,81	381,04	419,53

Lanjutan lampiran 1

Prov	2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	727,38	738,05	744,02	736,59	753,93	787,50	793,97	808,22	820,71	829,42	850,92	867,49
Banten	835,21	840,88	818,90	801,74	802,78	792,87	816,61	822,05	843,11	856,83	867,36	895,79
DKI Jakarta	11.412,95	11.544,12	11.231,32	11.337,96	10.963,08	10.930,41	10.380,14	10.309,75	11.211,26	11.299,14	11.081,36	11.727,36
D.I Yogyakarta	1.355,46	1.393,60	1.383,59	1.363,50	1.381,37	1.383,90	1.392,55	1.451,33	1.478,48	1.495,80	1.511,11	1.516,72
Jawa Tengah	362,42	372,37	368,19	361,65	358,52	364,80	363,89	370,95	382,81	387,22	397,51	413,05
Jawa Timur	534,56	542,53	531,64	528,97	517,19	518,49	523,88	532,31	552,54	564,84	583,91	591,37
Bengkulu	444,24	438,86	445,01	443,87	441,98	462,88	457,78	477,71	485,94	492,73	508,97	551,76
Jambi	397,48	400,25	401,54	402,81	407,94	416,09	413,78	420,42	431,06	433,95	447,85	455,83
Aceh	4.300,65	4.425,64	4.697,30	4.603,92	4.614,92	5.484,24	5.721,09	6.587,95	6.754,48	6.892,82	6.777,85	6.738,94
Sumatera Utara	500,90	508,21	511,36	509,96	510,15	517,17	532,49	546,49	557,07	548,53	553,66	564,36
Sumatera Barat	621,91	619,36	615,21	606,27	615,24	625,40	625,76	638,05	645,00	642,34	651,70	664,01
Riau	720,31	734,17	718,78	708,11	714,30	743,01	740,49	763,42	798,73	799,87	820,68	835,08
Sumatera Selatan	449,54	449,00	450,25	454,12	458,96	474,77	528,16	528,83	635,40	591,35	588,08	601,60
Bangka Belitung	470,63	454,54	459,25	506,62	570,71	544,48	615,43	493,98	529,24	500,25	491,55	547,18
Kepulauan Riau	797,52	821,38	824,42	831,70	855,66	853,91	858,31	852,68	871,35	891,67	911,64	929,45
Lampung	320,44	330,64	322,72	317,51	323,39	324,56	325,50	326,63	336,44	342,48	356,59	361,59
Kalimantan Selatan	875,26	920,64	890,35	884,03	904,97	918,46	889,25	897,09	919,11	930,46	939,00	928,64
Kalimantan Barat	381,58	376,22	397,31	412,38	400,51	420,22	423,99	421,40	440,81	446,68	449,53	471,16
Kalimantan Timur	1.392,46	1.452,41	1.469,52	1.465,63	1.498,42	1.511,12	1.610,17	1.787,37	1.859,57	1.947,27	1.877,07	1.558,81
Kalimantan Tengah	352,38	354,61	347,56	352,63	355,23	369,23	370,19	375,39	387,82	386,46	399,67	406,34
Sulawesi Tengah	383,46	387,87	383,81	398,32	399,90	406,85	424,16	421,63	435,78	424,37	424,25	395,56
Sulawesi Selatan	443,25	448,62	445,04	440,55	442,73	452,77	450,54	454,22	471,00	470,00	480,45	490,81
Sulawesi Utara	125,02	125,85	125,34	121,00	122,11	132,73	129,62	136,62	136,17	135,79	150,70	147,22
Gorontalo	234,64	238,30	254,41	255,54	256,40	266,93	256,67	260,87	278,33	272,96	268,70	243,35
Sulawesi Barat	158,53	156,64	158,23	160,23	160,78	65,88	162,73	169,62	171,54	170,26	164,55	171,68
Sulawesi Tenggara	437,92	445,85	447,13	448,75	455,38	469,39	484,83	489,13	498,83	499,78	510,40	521,00
Nusa Tenggara Barat	1.579,43	1.637,00	1.780,08	1.801,60	1.749,40	1.832,10	1.678,95	1.613,93	1.836,81	1.792,92	2.073,71	1.704,15
Bali	224,65	225,87	223,90	221,51	219,33	223,39	219,22	220,57	221,33	216,39	226,53	224,43
Nusa Tenggara Timur	22,58	22,12	23,05	22,62	22,83	23,54	23,97	24,72	25,50	25,19	25,02	25,96
Maluku	234,45	224,16	232,93	233,09	233,68	230,96	234,14	238,78	249,73	254,25	257,50	260,21
Papua	157,91	160,46	162,15	152,89	154,45	156,30	159,62	162,40	160,50	160,02	165,43	168,50
Maluku Utara	469,16	484,76	478,29	514,03	492,96	537,10	512,79	550,62	559,94	568,49	560,64	557,48
Papua Barat	379,52	370,00	364,73	368,95	369,10	373,53	371,43	372,70	372,53	374,17	377,92	408,50

Lanjutan lampiran 1

Nilai Aktual Dimensi 1	2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prov												
Jawa Barat	821,23	816,13	788,44	817,75	817,09	815,42	809,59	794,30	793,64	796,52	812,68	853,32
Banten	1.100,37	1.133,46	1.099,11	1.090,12	1.106,74	1.092,06	1.101,40	1.108,30	1.127,77	1.155,65	1.133,78	1.166,24
DKI Jakarta	11.430,77	11.412,81	11.406,85	11.637,57	12.032,96	12.628,12	12.821,36	12.780,13	12.767,14	12.702,39	13.286,06	13.802,67
D.I Yogyakarta	1.510,47	1.509,56	1.502,98	1.471,93	1.465,59	1.474,94	1.517,55	1.571,84	1.557,56	1.564,02	1.613,58	1.658,01
Jawa Tengah	403,47	402,35	403,14	396,05	394,90	403,76	420,80	429,60	433,92	440,14	433,99	469,83
Jawa Timur	589,69	583,92	584,07	581,34	576,38	598,51	599,00	600,79	609,91	611,71	613,62	650,54
Bengkulu	564,03	583,25	379,23	642,43	616,18	656,60	664,87	663,49	653,03	660,50	667,21	653,98
Jambi	452,31	453,58	455,43	459,66	471,93	475,67	484,18	486,43	494,56	499,69	507,11	530,46
Aceh	6.437,86	6.566,60	6.561,90	7.008,04	6.879,03	6.899,55	6.844,10	6.698,15	6.662,22	7.342,78	7.157,88	7.154,40
Sumatera Utara	546,30	543,58	553,46	561,25	584,84	592,08	594,53	621,71	624,01	622,64	632,23	675,10
Sumatera Barat	657,30	652,75	645,46	651,89	661,67	667,20	674,94	684,81	686,72	704,97	708,14	748,04
Riau	822,61	810,34	836,33	838,45	855,21	797,28	820,72	870,39	875,01	887,69	1.007,87	1.049,42
Sumatera Selatan	568,62	538,96	525,45	526,85	519,38	512,32	537,13	520,16	518,69	533,35	544,01	554,05
Bangka Belitung	589,78	571,02	612,65	615,97	643,44	682,72	666,14	678,86	696,25	733,40	666,96	702,65
Kepulauan Riau	899,84	892,38	888,20	904,97	923,48	928,41	929,72	909,89	919,08	934,20	878,86	910,35
Lampung	353,21	347,84	357,39	351,62	351,36	357,34	364,01	367,78	369,29	366,70	377,52	396,44
Kalimantan Selatan	971,31	965,39	971,80	983,74	987,25	1.008,84	1.008,09	1.020,27	1.030,01	1.030,93	1.033,58	1.072,00
Kalimantan Barat	493,01	472,81	474,00	484,35	464,72	484,37	483,22	472,79	482,05	485,73	482,50	512,76
Kalimantan Timur	1.928,81	1.907,26	1.865,05	1.889,82	1.904,85	1.901,43	1.936,65	1.910,19	1.909,25	1.734,82	1.701,39	1.715,67
Kalimantan Tengah	400,32	399,33	394,51	402,05	403,08	409,82	406,52	401,11	407,69	403,80	418,22	435,45
Sulawesi Tengah	410,14	404,71	403,60	421,51	427,89	429,18	441,20	455,50	456,38	457,97	474,73	482,65
Sulawesi Selatan	488,70	482,39	485,16	476,89	483,52	500,29	509,64	512,00	543,03	546,91	559,47	588,41
Sulawesi Utara	141,81	136,14	136,99	137,97	139,71	144,77	146,28	148,05	144,48	145,74	148,76	159,73
Gorontalo	242,76	246,85	241,13	245,21	241,48	252,19	253,09	254,05	253,84	251,00	259,14	264,15
Sulawesi Barat	170,20	171,92	172,11	184,45	186,86	185,12	189,67	189,04	189,99	193,58	183,51	197,13
Sulawesi Tenggara	513,06	516,70	518,15	518,42	531,78	536,42	532,64	542,18	502,72	509,96	505,44	568,34
Nusa Tenggara Barat	1.750,97	1.839,73	1.786,77	1.853,92	1.790,10	1.831,90	1.807,43	1.790,53	1.864,52	1.921,48	2.050,93	1.914,36
Bali	219,00	215,33	219,97	222,22	220,56	217,89	224,00	226,27	221,83	224,61	223,94	239,09
Nusa Tenggara Timur	25,87	25,03	25,40	25,28	26,07	26,00	26,80	27,09	27,18	27,12	27,50	29,56
Maluku	257,33	258,02	260,69	262,91	267,44	270,36	275,54	277,80	271,90	272,89	276,83	278,19
Papua	168,58	165,60	166,73	165,31	171,05	179,49	166,91	169,47	170,32	170,38	174,73	180,47
Maluku Utara	540,27	579,44	549,66	551,29	592,96	610,33	602,05	628,23	605,66	615,51	612,84	605,97
Papua Barat	410,06	410,22	395,46	397,43	395,81	385,84	387,14	397,06	391,40	388,98	393,21	415,61

Lanjutan Lampiran 1

Nilai Aktual Dimensi 1	2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prov												
Jawa Barat	842,15	835,96	829,92	842,41	847,25	864,76	867,17	872,70	865,20	864,76	868,16	912,71
Banten	1.151,67	1.136,06	1.114,03	1.102,39	1.247,97	1.438,49	1.439,56	1.379,23	1.350,13	1.325,03	1.400,84	1.386,39
DKI Jakarta	14.015,37	14.019,69	13.908,98	13.767,03	14.064,14	14.217,34	14.314,63	14.826,90	14.803,17	14.464,51	14.861,73	16.163,28
D.I Yogyakarta	1.667,14	1.682,62	1.698,38	1.664,46	1.694,21	1.670,97	1.710,18	1.722,70	1.713,51	1.649,58	1.669,40	1.689,09
Jawa Tengah	461,67	463,34	457,51	447,73	454,97	460,10	463,34	462,95	471,33	476,10	483,14	522,98
Jawa Timur	637,84	638,70	639,40	633,59	639,74	645,48	651,82	656,64	662,80	664,28	668,58	696,06
Bengkulu	641,30	693,70	700,49	695,34	706,16	744,54	736,14	725,68	740,90	746,37	733,10	701,75
Jambi	510,30	503,38	511,43	527,32	531,29	533,18	539,59	542,89	544,83	548,58	558,64	592,73
Aceh	6.753,22	6.817,17	6.832,90	7.264,45	7.242,72	7.355,09	7.314,06	7.110,06	7.083,15	7.632,52	7.377,22	7.106,73
Sumatera Utara	662,07	657,39	678,77	679,93	678,40	692,88	705,23	680,54	672,13	678,89	692,96	725,89
Sumatera Barat	730,21	729,58	737,31	735,10	735,67	743,57	766,69	763,37	758,63	753,45	762,98	781,47
Riau	1.040,92	1.025,59	1.078,87	1.039,93	1.054,54	1.054,33	1.057,07	3.020,82	3.285,50	3.577,75	3.257,98	2.955,12
Sumatera Selatan	538,95	540,41	564,19	572,52	622,22	545,57	556,56	555,17	592,74	654,75	685,20	743,52
Bangka Belitung	717,73	778,07	918,83	851,15	768,51	825,51	831,71	797,00	813,04	812,95	804,66	807,04
Kepulauan Riau	886,57	883,54	874,25	904,95	899,55	888,59	902,38	4.781,87	4.001,64	4.151,71	3.874,50	3.771,78
Lampung	387,70	381,11	378,13	386,31	390,53	398,14	402,27	401,99	402,62	405,06	409,95	419,09
Kalimantan Selatan	1.052,28	1.046,37	1.055,68	1.080,03	1.105,25	1.120,90	1.119,88	1.111,54	1.149,32	1.140,15	1.149,67	1.235,96
Kalimantan Barat	498,47	488,25	502,77	513,53	501,19	516,06	532,80	529,92	620,21	556,66	581,16	600,72
Kalimantan Timur	1.777,24	1.760,67	1.919,12	2.000,24	2.024,60	1.998,52	1.968,23	1.981,75	1.995,98	2.018,18	2.042,57	1.956,00
Kalimantan Tengah	429,06	423,88	434,95	433,40	434,31	445,24	453,36	444,99	446,21	445,58	447,66	472,59
Sulawesi Tengah	467,66	457,02	469,13	499,94	504,74	486,82	488,12	495,00	489,70	482,76	501,97	527,00
Sulawesi Selatan	585,27	582,53	570,35	560,51	563,91	577,92	584,28	571,06	572,92	576,15	581,98	598,44
Sulawesi Utara	155,17	151,96	153,47	154,21	151,58	159,81	159,53	159,05	153,97	155,67	156,28	167,11
Gorontalo	259,85	260,69	257,41	259,82	259,48	269,54	270,62	284,75	289,58	282,50	294,85	290,66
Sulawesi Barat	191,67	187,02	188,16	191,23	190,33	187,22	190,70	189,07	190,55	191,41	193,69	204,73
Sulawesi Tenggara	558,93	561,47	550,81	558,51	565,17	577,78	552,04	556,57	547,10	565,25	569,47	595,14
Nusa Tenggara Barat	1.945,81	2.032,34	2.037,60	1.993,85	1.934,02	2.121,62	2.030,03	2.039,26	2.129,64	2.318,66	2.172,48	2.101,82
Bali	233,86	245,29	249,65	252,36	248,96	253,18	248,96	245,67	244,98	243,96	252,45	261,12
Nusa Tenggara Timur	29,17	27,67	27,85	28,65	28,75	29,90	30,34	34,39	31,45	31,01	29,75	32,32
Maluku	281,14	279,55	275,37	281,05	283,20	283,62	288,14	287,63	294,61	292,73	291,81	301,25
Papua	182,55	180,88	179,39	182,58	184,61	183,84	182,72	186,11	186,39	182,97	179,98	207,84
Maluku Utara	611,88	682,97	763,27	769,71	768,13	787,81	758,73	816,06	802,76	875,81	845,12	772,91
Papua Barat	410,06	407,92	393,79	389,14	382,34	370,19	378,43	360,39	359,19	350,95	359,44	381,44

Lampiran 2

Nilai Aktual Dimensi 2

Nilai Aktual Dimensi 2	2018						2019											
Prov	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63
Banten	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,70	0,70	0,70	0,71	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
DKI Jakarta	2,45	2,32	2,43	2,42	2,42	2,43	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,46	2,46	2,46	2,47	2,45	2,44	2,42
D.I Yogyakarta	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,19	1,19	1,19	1,19
Jawa Tengah	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42
Jawa Timur	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,51	0,51	0,52	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52
Bengkulu	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Jambi	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Aceh	3,13	3,11	3,15	3,17	3,18	3,20	3,22	3,22	3,22	3,22	3,20	3,33	3,33	3,33	3,33	3,35	3,46	3,46
Sumatera Utara	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55
Sumatera Barat	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Riau	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Sumatera Selatan	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bangka Belitung	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Kepulauan Riau	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Lampung	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Kalimantan Selatan	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Kalimantan Barat	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Kalimantan Timur	1,37	1,37	1,37	1,40	1,37	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Kalimantan Tengah	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sulawesi Tengah	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Sulawesi Selatan	0,66	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Sulawesi Utara	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Gorontalo	0,43	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Sulawesi Barat	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Sulawesi Tenggara	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Nusa Tenggara Barat	0,55	0,55	1,28	1,28	1,28	1,30	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,30	1,32	1,34	1,34	1,34	1,38
Bali	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,44	0,44	0,44	0,44
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Maluku	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,23	0,23
Papua	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Maluku Utara	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Papua Barat	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Lampiran 3

Nilai Aktual Dimensi 3

Prov	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	144,62	146,08	145,87	148,29	150,02	147,19	142,71	143,08	144,26	138,03	141,21	141,17	139,05	140,47	142,47	146,59	149,24	152,72
Banten	102,32	103,85	106,25	104,66	105,26	107,31	107,55	109,16	110,23	108,64	110,93	110,77	106,56	109,57	111,27	108,80	112,90	116,75
DKI Jakarta	329,68	334,79	332,41	330,98	332,64	338,13	330,08	332,63	347,85	339,88	344,20	351,65	338,93	337,88	346,32	342,54	344,82	352,44
D.I Yogyakarta	217,05	206,87	213,22	209,85	209,64	215,18	198,59	198,79	199,20	200,69	202,14	202,31	191,64	191,01	192,78	193,17	193,99	194,59
Jawa Tengah	107,09	107,52	109,21	110,34	109,18	111,94	110,48	108,45	105,57	103,89	105,44	107,91	99,56	95,93	101,41	104,19	104,67	106,88
Jawa Timur	90,61	91,46	91,73	91,66	91,68	94,22	92,55	93,26	94,13	90,26	91,10	91,47	88,98	89,47	90,46	91,85	92,28	93,98
Bengkulu	194,73	197,94	200,71	199,48	202,98	204,89	202,30	207,54	210,22	209,55	213,04	214,01	212,82	216,87	221,48	221,33	223,94	225,94
Jambi	121,91	123,33	124,90	121,98	122,54	123,55	128,59	130,55	132,69	131,20	131,87	133,36	134,48	136,10	136,94	130,48	130,49	130,23
Aceh	1.041,60	1.046,96	1.063,61	1.037,43	1.040,16	1.052,07	1.071,22	1.072,96	1.084,05	1.031,93	1.037,96	1.037,80	1.026,65	1.046,04	1.078,21	1.064,57	1.081,89	1.143,69
Sumatera Utara	86,54	86,92	87,68	87,27	90,48	89,33	94,06	93,52	94,58	92,97	94,22	94,09	91,03	91,79	93,18	93,74	94,45	95,40
Sumatera Barat	121,62	122,30	122,51	121,79	122,99	125,88	127,80	128,84	130,16	125,43	127,21	127,40	125,27	127,04	129,76	130,27	131,17	135,21
Riau	43,63	43,83	44,04	45,18	45,65	46,59	48,31	48,55	48,72	48,28	49,63	49,41	49,22	49,58	49,81	48,76	48,68	52,72
Sumatera Selatan	83,40	83,95	88,96	92,33	94,76	96,30	94,80	96,77	98,13	100,12	104,73	104,58	102,41	104,24	105,18	109,77	111,85	113,43
Bangka Belitung	58,30	58,12	59,70	60,70	60,77	61,39	61,54	61,96	63,17	59,65	138,19	151,89	149,58	149,33	149,22	149,28	71,28	73,18
Kepulauan Riau	112,88	110,29	112,87	109,04	106,80	107,14	106,32	105,95	105,48	102,93	102,24	101,16	98,88	98,79	98,09	93,77	93,28	92,28
Lampung	81,08	80,96	81,44	83,32	89,96	90,46	85,31	86,01	87,01	84,17	86,67	86,35	84,53	85,14	87,03	95,70	95,80	96,44
Kalimantan Selatan	152,93	156,36	158,47	164,89	163,89	168,98	177,52	192,35	201,27	181,32	180,92	178,41	173,71	187,79	200,65	173,08	171,55	171,60
Kalimantan Barat	201,16	201,91	205,25	201,51	202,09	204,50	191,39	192,86	195,30	197,47	198,85	197,69	185,51	187,62	196,46	192,19	192,24	196,25
Kalimantan Timur	51,72	52,09	53,04	51,29	52,76	53,58	53,48	54,31	54,64	55,19	55,26	54,91	55,25	55,40	56,14	56,13	57,71	57,92
Kalimantan Tengah	105,19	106,22	106,37	104,28	105,18	106,39	105,68	106,94	106,91	107,20	108,04	107,35	106,90	107,62	108,29	105,61	108,68	108,67
Sulawesi Tengah	92,10	93,09	93,66	91,15	91,94	93,32	95,87	96,52	98,26	93,28	94,45	95,22	90,26	91,25	92,36	89,07	89,29	90,54
Sulawesi Selatan	86,01	85,48	83,82	87,52	87,62	88,60	86,84	87,22	89,04	82,29	82,37	81,75	77,97	78,50	78,84	84,68	85,60	86,78
Sulawesi Utara	42,58	43,22	44,14	41,27	41,81	43,81	49,24	51,28	52,74	50,44	51,30	52,97	51,46	51,80	53,59	49,94	50,61	51,19
Gorontalo	78,73	78,95	79,32	78,50	59,79	79,23	77,57	78,00	77,85	76,20	75,99	76,84	74,18	74,51	75,51	74,22	74,83	75,50
Sulawesi Barat	59,33	61,12	61,87	60,41	61,27	62,60	69,20	71,45	73,50	70,45	71,56	72,67	69,64	70,26	71,17	68,04	68,42	69,84
Sulawesi Tenggara	102,21	102,59	103,49	101,65	101,85	102,03	108,11	109,15	109,90	103,27	104,38	104,77	102,09	104,06	106,90	104,75	104,91	106,14
Nusa Tenggara Barat	197,19	196,31	678,13	652,91	654,06	662,94	673,70	681,44	691,77	663,99	671,84	672,23	657,17	665,83	696,72	706,35	711,92	716,31
Bali	60,39	60,65	60,64	61,01	60,62	62,11	63,34	62,94	62,12	60,78	61,21	61,13	58,75	59,37	59,54	59,56	59,71	61,38
Nusa Tenggara Timur	18,44	18,49	19,03	18,85	19,08	19,40	20,38	20,60	20,89	19,49	18,89	18,66	18,05	17,92	17,99	17,54	17,59	17,45
Maluku	47,92	48,71	49,32	48,46	48,84	49,40	50,34	51,36	52,50	51,61	52,09	52,06	50,67	49,09	49,07	47,72	48,15	48,42
Papua	24,01	22,84	25,37	28,55	28,72	28,94	31,90	31,16	31,42	30,28	29,95	30,08	27,03	26,75	26,51	27,04	27,00	26,98
Maluku Utara	88,17	90,59	92,07	91,41	94,64	97,06	98,55	101,21	107,78	108,21	112,33	113,49	114,23	114,69	117,78	115,34	115,73	117,33
Papua Barat	19,54	19,89	20,13	19,21	19,12	19,01	19,59	19,40	19,28	18,80	18,61	18,37	17,12	16,90	16,73	15,85	15,67	15,73

Lanjutan Lampiran 3

Prov	2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	153,13	153,94	155,00	160,38	162,59	159,94	156,28	157,83	160,36	162,92	165,66	166,59
Banten	117,74	116,95	117,24	128,75	126,06	121,16	116,95	117,41	119,08	115,56	116,65	117,89
DKI Jakarta	352,98	351,93	360,13	404,28	413,03	403,49	368,28	364,52	371,48	361,90	365,83	365,65
D.I Yogyakarta	199,09	202,07	201,52	214,95	213,96	215,59	197,53	199,93	202,14	196,86	200,09	200,35
Jawa Tengah	105,31	105,57	105,51	108,14	107,82	108,12	101,49	101,85	103,13	105,74	107,00	106,96
Jawa Timur	94,64	94,58	95,55	101,16	103,45	101,37	95,48	96,23	97,81	99,90	101,56	101,33
Bengkulu	223,02	223,95	227,51	234,78	233,72	237,37	234,19	236,81	242,54	244,82	249,06	249,76
Jambi	135,55	136,33	137,13	150,84	150,26	151,48	145,90	147,42	149,46	145,17	146,75	147,01
Aceh	1.182,58	1.246,28	1.321,17	1.433,20	1.445,42	1.858,26	1.869,71	1.899,41	1.989,38	1.979,15	1.992,05	2.004,79
Sumatera Utara	95,26	95,08	96,20	100,59	100,70	100,40	97,07	98,61	100,64	101,11	102,05	107,67
Sumatera Barat	137,10	136,56	137,99	146,43	145,34	146,77	140,65	142,38	144,65	142,48	143,55	143,55
Riau	52,71	52,07	52,18	58,84	58,69	58,82	53,72	54,39	55,37	53,74	56,31	56,30
Sumatera Selatan	111,38	113,04	116,42	119,99	119,89	121,40	117,35	118,55	121,17	125,86	128,81	130,01
Bangka Belitung	75,28	74,43	77,21	79,15	91,42	91,45	87,32	86,98	91,44	87,15	87,83	88,68
Kepulauan Riau	95,92	96,29	99,16	104,83	103,41	102,79	98,69	98,75	99,83	94,86	94,28	94,40
Lampung	90,38	91,58	92,75	92,63	92,49	92,26	89,01	90,69	93,22	103,78	105,21	105,40
Kalimantan Selatan	177,78	174,74	177,40	175,65	174,48	173,39	169,14	170,53	173,44	173,92	174,50	165,18
Kalimantan Barat	200,17	200,71	203,50	222,42	221,98	225,84	217,38	220,30	223,91	216,90	218,28	220,12
Kalimantan Timur	58,19	58,45	59,32	65,87	65,61	65,78	67,07	67,28	69,10	65,95	66,81	66,07
Kalimantan Tengah	108,98	109,27	109,85	117,95	117,54	117,60	111,98	113,39	113,69	107,82	108,89	107,98
Sulawesi Tengah	92,18	92,99	93,84	94,35	94,30	95,79	94,03	95,53	97,32	93,44	94,87	94,79
Sulawesi Selatan	86,27	87,00	87,90	88,32	88,15	89,32	83,35	84,74	86,26	92,02	94,27	95,11
Sulawesi Utara	57,90	58,99	60,99	63,74	64,58	66,92	62,95	65,11	66,79	63,30	65,30	66,23
Gorontalo	75,68	76,34	76,65	80,72	81,92	79,92	78,88	81,01	84,12	87,78	90,68	92,23
Sulawesi Barat	76,49	77,47	78,11	79,59	79,88	68,19	81,44	82,69	83,60	82,06	82,66	83,63
Sulawesi Tenggara	114,43	114,82	115,72	115,90	115,33	117,25	112,37	113,83	115,37	114,53	117,68	118,10
Nusa Tenggara Barat	751,84	758,60	767,07	766,80	768,72	779,51	760,56	768,97	788,96	811,91	828,02	838,56
Bali	66,77	66,47	67,13	73,31	73,23	74,10	73,21	74,10	75,00	74,94	75,14	75,58
Nusa Tenggara Timur	18,49	18,64	19,84	19,63	19,88	19,63	19,25	19,77	20,13	20,31	20,66	20,92
Maluku	49,32	49,43	49,70	50,99	51,19	52,15	51,99	53,35	54,09	54,61	55,89	57,23
Papua	28,80	29,19	29,34	28,40	28,41	28,78	26,77	26,74	27,00	25,81	26,22	25,90
Maluku Utara	121,20	121,50	123,49	128,58	128,52	130,18	122,65	124,31	127,05	119,49	123,31	125,08
Papua Barat	16,67	16,65	16,73	17,11	17,02	16,69	16,28	16,29	16,60	16,11	16,23	16,44

Lanjutan Lampiran 3

Nilai Aktual Dimensi 3 Prov	2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	167,52	167,63	165,51	164,68	165,03	168,67	165,76	165,41	167,91	164,05	159,23	164,16
Banten	129,78	130,63	133,28	132,79	132,83	138,80	140,13	138,65	140,28	134,18	130,32	132,32
DKI Jakarta	354,41	349,07	355,50	350,61	352,37	350,04	347,34	344,30	353,61	337,17	319,48	330,60
D.I Yogyakarta	202,91	204,52	205,79	209,74	208,15	210,58	207,02	208,80	209,59	200,09	206,56	208,95
Jawa Tengah	104,20	103,60	103,83	103,67	103,30	105,39	104,69	106,05	108,60	106,84	98,99	101,34
Jawa Timur	100,99	102,20	103,83	101,94	101,60	106,47	101,28	99,81	100,14	96,03	90,05	90,86
Bengkulu	249,86	251,30	161,36	240,54	240,19	245,26	246,10	248,03	250,72	239,63	242,13	245,56
Jambi	149,98	151,09	151,88	142,44	142,80	143,14	137,91	138,60	140,03	135,52	134,79	138,68
Aceh	2.043,03	2.063,20	2.083,23	1.934,67	1.933,82	1.934,55	1.835,75	1.859,79	1.890,56	1.795,70	1.809,02	1.831,31
Sumatera Utara	107,50	107,99	109,75	107,50	108,24	112,73	110,81	111,79	112,88	113,02	110,13	110,88
Sumatera Barat	144,55	145,65	146,38	145,91	145,81	147,54	145,36	146,37	148,68	144,57	144,98	147,57
Riau	54,61	54,75	55,58	54,73	54,83	51,15	48,54	48,37	49,46	47,15	51,20	52,09
Sumatera Selatan	129,83	133,59	137,32	132,80	133,40	133,41	126,94	127,52	126,50	127,32	128,18	128,40
Bangka Belitung	87,25	87,28	87,82	83,93	83,79	92,74	91,00	91,45	93,43	89,59	79,64	80,36
Kepulauan Riau	92,39	92,28	93,39	92,42	91,25	93,67	91,30	91,11	91,69	85,35	82,91	83,91
Lampung	101,72	102,71	103,75	99,36	99,57	102,24	96,96	97,29	99,10	105,32	105,05	106,22
Kalimantan Selatan	180,78	181,86	184,22	170,94	169,92	148,79	140,70	140,32	140,31	138,13	137,65	137,84
Kalimantan Barat	223,91	224,42	225,97	220,75	220,48	221,80	222,36	235,13	235,15	223,34	228,08	258,68
Kalimantan Timur	62,17	61,96	62,42	59,89	59,62	66,59	63,90	64,18	64,88	63,76	63,68	65,58
Kalimantan Tengah	110,83	111,67	112,14	108,01	107,65	107,80	105,28	105,17	104,96	94,36	93,85	93,64
Sulawesi Tengah	96,30	97,65	99,18	87,45	87,53	90,63	89,79	90,18	91,18	83,20	87,36	87,85
Sulawesi Selatan	96,71	97,09	98,64	91,18	91,23	93,84	90,38	90,24	91,03	92,14	92,71	100,84
Sulawesi Utara	71,91	73,00	74,91	73,71	74,33	75,82	74,53	74,94	76,61	71,37	72,33	73,54
Gorontalo	93,23	96,61	102,10	103,44	104,80	107,05	105,37	108,33	111,17	110,40	105,43	106,04
Sulawesi Barat	85,00	85,74	88,36	87,74	88,05	89,33	91,72	92,48	93,37	91,43	85,11	87,31
Sulawesi Tenggara	126,26	127,75	130,55	125,54	124,38	125,55	120,30	121,86	122,69	116,72	116,13	117,18
Nusa Tenggara Barat	863,48	878,75	894,73	846,29	848,33	858,57	860,12	870,21	882,53	889,34	899,04	908,27
Bali	75,24	75,94	76,84	72,07	72,05	72,29	74,80	75,94	76,14	72,56	70,28	70,53
Nusa Tenggara Timur	22,29	22,38	22,61	21,17	21,15	21,24	21,42	21,85	22,32	22,19	22,03	22,93
Maluku	58,82	60,55	62,78	61,16	61,72	62,74	63,51	64,34	65,94	65,05	65,96	67,25
Papua	25,71	25,75	26,19	25,37	24,45	24,81	21,28	21,41	21,81	20,02	19,97	19,97
Maluku Utara	126,25	127,20	131,80	127,11	128,03	129,49	126,24	128,89	132,52	114,52	118,05	123,49
Papua Barat	16,51	16,48	16,72	19,36	19,11	19,71	19,20	19,34	18,94	18,05	17,40	17,25

Lanjutan Lampiran 3

Nilai Aktual Dimensi 3 Prov	2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	157,98	158,88	163,00	159,55	163,88	168,30	166,98	169,15	172,74	172,02	174,11	177,93
Banten	134,95	136,45	139,44	134,99	136,27	140,04	137,75	140,66	142,60	139,15	144,35	149,50
DKI Jakarta	315,77	326,78	342,19	330,98	336,84	362,78	355,59	359,53	363,55	351,25	360,00	364,50
D.I Yogyakarta	203,71	204,71	209,72	203,94	205,70	210,56	207,88	209,18	209,30	202,86	206,89	212,57
Jawa Tengah	97,67	97,92	99,96	100,14	100,86	102,77	100,05	102,33	104,15	103,51	104,90	105,75
Jawa Timur	87,71	88,48	90,37	88,76	89,21	90,96	87,95	89,26	91,57	92,86	93,42	94,83
Bengkulu	250,20	254,08	260,50	239,93	240,69	245,32	249,86	254,21	260,10	252,41	258,34	261,08
Jambi	136,77	133,13	135,30	124,23	124,84	126,44	123,28	125,17	127,80	127,91	130,44	133,19
Aceh	1.898,88	1.911,18	1.959,23	1.830,01	1.840,23	1.859,08	1.790,91	1.803,96	1.828,19	1.709,46	1.728,78	1.740,37
Sumatera Utara	110,16	113,19	113,51	110,53	111,32	112,91	110,67	111,82	112,12	110,90	112,04	111,99
Sumatera Barat	147,30	150,49	154,61	150,59	151,41	154,73	151,21	153,20	155,24	151,18	153,47	155,61
Riau	49,55	48,37	49,88	49,82	49,99	51,46	51,65	191,25	219,01	213,88	225,28	227,14
Sumatera Selatan	128,45	131,86	133,74	118,64	119,52	122,90	118,97	120,81	124,41	130,31	133,13	134,54
Bangka Belitung	81,64	83,05	106,35	103,88	103,95	104,80	107,22	108,31	109,37	106,35	106,20	108,03
Kepulauan Riau	84,64	85,26	86,05	82,60	82,17	83,31	81,62	383,19	301,81	284,63	256,26	258,89
Lampung	102,46	102,97	104,80	96,64	97,12	98,32	97,62	98,81	103,46	110,36	111,48	113,58
Kalimantan Selatan	139,41	148,58	152,08	130,53	132,74	133,71	128,35	130,74	132,95	132,16	130,51	134,34
Kalimantan Barat	256,28	253,62	257,36	253,32	253,03	259,95	257,73	260,13	277,36	291,59	293,34	295,51
Kalimantan Timur	65,94	65,72	67,43	54,93	55,63	56,93	52,27	52,91	54,03	54,07	55,46	55,43
Kalimantan Tengah	95,25	93,67	98,63	92,79	93,29	93,81	96,40	97,29	98,48	93,66	94,22	93,94
Sulawesi Tengah	86,83	87,50	89,63	77,37	77,75	75,39	77,51	79,08	79,32	74,93	76,93	78,23
Sulawesi Selatan	106,03	109,11	109,37	101,57	102,31	105,32	101,98	101,90	103,26	105,80	107,67	107,46
Sulawesi Utara	80,83	81,60	83,66	80,07	80,33	82,98	81,32	82,57	84,35	79,84	81,95	83,05
Gorontalo	110,79	111,98	113,72	109,91	111,19	114,07	112,03	114,74	117,24	116,92	118,59	122,34
Sulawesi Barat	92,67	94,22	95,07	90,32	90,53	91,56	91,21	92,20	92,74	91,40	91,91	93,89
Sulawesi Tenggara	127,51	124,41	126,74	117,89	119,05	120,63	114,83	116,18	118,89	113,02	114,09	114,60
Nusa Tenggara Barat	890,03	888,11	907,52	861,65	873,52	892,72	878,47	899,89	914,90	921,80	931,89	936,65
Bali	72,84	89,45	90,82	83,63	84,34	85,51	82,86	82,40	83,11	80,61	81,14	82,57
Nusa Tenggara Timur	25,13	25,62	26,52	24,80	25,50	26,27	26,15	27,00	27,71	27,52	28,17	28,92
Maluku	71,32	73,44	75,71	72,62	73,15	75,42	74,82	76,75	79,69	80,02	82,23	83,30
Papua	20,05	20,21	20,41	20,30	20,46	20,65	21,43	21,80	22,26	20,91	21,07	22,01
Maluku Utara	117,64	120,31	124,39	120,74	120,47	123,88	124,45	124,12	128,77	121,20	125,74	130,24
Papua Barat	17,42	17,85	17,76	17,98	17,96	17,82	17,75	18,16	18,23	18,17	18,65	20,04

Lampiran 4

Nilai dimensi 1

dimensi 1	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Banten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D.I Yogyakarta	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Jawa Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Jawa Timur	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Bengkulu	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Jambi	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Aceh	0,40	0,38	0,44	0,42	0,42	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39	0,37	0,46	0,43	0,41	0,40	0,46	0,46	0,40
Sumatera Utara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Sumatera Barat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Riau	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sumatera Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Bangka Belitung	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04
Kepulauan Riau	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
Lampung	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kalimantan Selatan	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08
Kalimantan Barat	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kalimantan Timur	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
Kalimantan Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Sulawesi Selatan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sulawesi Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sulawesi Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
Sulawesi Tenggara	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Nusa Tenggara Barat	0,02	0,02	0,16	0,16	0,15	0,11	0,13	0,13	0,14	0,16	0,14	0,14	0,14	0,16	0,17	0,19	0,19	0,14
Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Papua	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Maluku Utara	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Papua Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Lanjutan Lampiran 4

dimensi 1	2020											
Prov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07
Banten	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D.I Yogyakarta	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13
Jawa Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Jawa Timur	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Bengkulu	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Jambi	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aceh	0,38	0,38	0,42	0,41	0,42	0,50	0,55	0,64	0,60	0,61	0,61	0,57
Sumatera Utara	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sumatera Barat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Riau	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sumatera Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
Bangka Belitung	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Kepulauan Riau	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Lampung	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kalimantan Selatan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Kalimantan Barat	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kalimantan Timur	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,13
Kalimantan Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03
Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Sulawesi Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sulawesi Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Sulawesi Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Sulawesi Tenggara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04
Nusa Tenggara Barat	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	0,15
Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Papua	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Maluku Utara	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Papua Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Lanjutan Lampiran 4

dimensi 1	2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Banten	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D.I Yogyakarta	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jawa Tengah	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jawa Timur	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Bengkulu	0,05	0,05	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Jambi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aceh	0,56	0,58	0,58	0,60	0,57	0,55	0,53	0,52	0,52	0,58	0,54	0,52
Sumatera Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sumatera Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Riau	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Sumatera Selatan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Bangka Belitung	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Kepulauan Riau	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Lampung	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kalimantan Selatan	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Kalimantan Barat	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kalimantan Timur	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12
Kalimantan Tengah	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sulawesi Tengah	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Sulawesi Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sulawesi Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sulawesi Barat	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Sulawesi Tenggara	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Nusa Tenggara Barat	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Papua	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maluku Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Papua Barat	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Lanjutan Lampiran 4

dimensi 1	2022											
Prov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Banten	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
DKI Jakarta	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D.I Yogyakarta	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
Jawa Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jawa Timur	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
Bengkulu	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Jambi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aceh	0,48	0,49	0,49	0,53	0,51	0,52	0,51	0,48	0,48	0,53	0,50	0,44
Sumatera Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Sumatera Barat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Riau	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,20	0,22	0,25	0,22	0,18
Sumatera Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Bangka Belitung	0,05	0,06	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
Kepulauan Riau	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,32	0,27	0,29	0,26	0,23
Lampung	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Kalimantan Selatan	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Kalimantan Barat	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Kalimantan Timur	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	0,12
Kalimantan Tengah	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sulawesi Tengah	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sulawesi Selatan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Sulawesi Utara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gorontalo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sulawesi Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sulawesi Tenggara	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Nusa Tenggara Barat	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,16	0,15	0,13
Bali	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Papua	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maluku Utara	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05
Papua Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Lampiran 5

Nilai dimensi 2

dimensi 2	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
Banten	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
DKI Jakarta	0,78	0,75	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,70	0,70
D.I Yogyakarta	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,34	0,34
Jawa Tengah	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jawa Timur	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Bengkulu	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
Jambi	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
Aceh	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sumatera Utara	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Sumatera Barat	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22
Riau	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
Sumatera Selatan	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Bangka Belitung	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
Kepulauan Riau	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
Lampung	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Kalimantan Selatan	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
Kalimantan Barat	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Kalimantan Timur	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39
Kalimantan Tengah	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sulawesi Tengah	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
Sulawesi Selatan	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Sulawesi Utara	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Gorontalo	0,14	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sulawesi Barat	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulawesi Tenggara	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,18	0,41	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40
Bali	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Nusa Tenggara Timur	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Maluku	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Papua	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Maluku Utara	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
Papua Barat	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Lampiran 6

Nilai dimensi 3

Prov	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	144,62	146,08	145,87	148,29	150,02	147,19	142,71	143,08	144,26	138,03	141,21	141,17	139,05	140,47	142,47	146,59	149,24	152,72
Banten	102,32	103,85	106,25	104,66	105,26	107,31	107,55	109,16	110,23	108,64	110,93	110,77	106,56	109,57	111,27	108,80	112,90	116,75
DKI Jakarta	329,68	334,79	332,41	330,98	332,64	338,13	330,08	332,63	347,85	339,88	344,20	351,65	338,93	337,88	346,32	342,54	344,82	352,44
D.I Yogyakarta	217,05	206,87	213,22	209,85	209,64	215,18	198,59	198,79	199,20	200,69	202,14	202,31	191,64	191,01	192,78	193,17	193,99	194,59
Jawa Tengah	107,09	107,52	109,21	110,34	109,18	111,94	110,48	108,45	105,57	103,89	105,44	107,91	99,56	95,93	101,41	104,19	104,67	106,88
Jawa Timur	90,61	91,46	91,73	91,66	91,68	94,22	92,55	93,26	94,13	90,26	91,10	91,47	88,98	89,47	90,46	91,85	92,28	93,98
Bengkulu	194,73	197,94	200,71	199,48	202,98	204,89	202,30	207,54	210,22	209,55	213,04	214,01	212,82	216,87	221,48	221,33	223,94	225,94
Jambi	121,91	123,33	124,90	121,98	122,54	123,55	128,59	130,55	132,69	131,20	131,87	133,36	134,48	136,10	136,94	130,48	130,49	130,23
Aceh	1.041,60	1.046,96	1.063,61	1.037,43	1.040,16	1.052,07	1.071,22	1.072,96	1.084,05	1.031,93	1.037,96	1.037,80	1.026,65	1.046,04	1.078,21	1.064,57	1.081,89	1.143,69
Sumatera Utara	86,54	86,92	87,68	87,27	90,48	89,33	94,06	93,52	94,58	92,97	94,22	94,09	91,03	91,79	93,18	93,74	94,45	95,40
Sumatera Barat	121,62	122,30	122,51	121,79	122,99	125,88	127,80	128,84	130,16	125,43	127,21	127,40	125,27	127,04	129,76	130,27	131,17	135,21
Riau	43,63	43,83	44,04	45,18	45,65	46,59	48,31	48,55	48,72	48,28	49,63	49,41	49,22	49,58	49,81	48,76	48,68	52,72
Sumatera Selatan	83,40	83,95	88,96	92,33	94,76	96,30	94,80	96,77	98,13	100,12	104,73	104,58	102,41	104,24	105,18	109,77	111,85	113,43
Bangka Belitung	58,30	58,12	59,70	60,70	60,77	61,39	61,54	61,96	63,17	59,65	138,19	151,89	149,58	149,33	149,22	149,28	71,28	73,18
Kepulauan Riau	112,88	110,29	112,87	109,04	106,80	107,14	106,32	105,95	105,48	102,93	102,24	101,16	98,88	98,79	98,09	93,77	93,28	92,28
Lampung	81,08	80,96	81,44	83,32	89,96	90,46	85,31	86,01	87,01	84,17	86,67	86,35	84,53	85,14	87,03	95,70	95,80	96,44
Kalimantan Selatan	152,93	156,36	158,47	164,89	163,89	168,98	177,52	192,35	201,27	181,32	180,92	178,41	173,71	187,79	200,65	173,08	171,55	171,60
Kalimantan Barat	201,16	201,91	205,25	201,51	202,09	204,50	191,39	192,86	195,30	197,47	198,85	197,69	185,51	187,62	196,46	192,19	192,24	196,25
Kalimantan Timur	51,72	52,09	53,04	51,29	52,76	53,58	53,48	54,31	54,64	55,19	55,26	54,91	55,25	55,40	56,14	56,13	57,71	57,92
Kalimantan Tengah	105,19	106,22	106,37	104,28	105,18	106,39	105,68	106,94	106,91	107,20	108,04	107,35	106,90	107,62	108,29	105,61	108,68	108,67
Sulawesi Tengah	92,10	93,09	93,66	91,15	91,94	93,32	95,87	96,52	98,26	93,28	94,45	95,22	90,26	91,25	92,36	89,07	89,29	90,54
Sulawesi Selatan	86,01	85,48	83,82	87,52	87,62	88,60	86,84	87,22	89,04	82,29	82,37	81,75	77,97	78,50	78,84	84,68	85,60	86,78
Sulawesi Utara	42,58	43,22	44,14	41,27	41,81	43,81	49,24	51,28	52,74	50,44	51,30	52,97	51,46	51,80	53,59	49,94	50,61	51,19
Gorontalo	78,73	78,95	79,32	78,50	59,79	79,23	77,57	78,00	77,85	76,20	75,99	76,84	74,18	74,51	75,51	74,22	74,83	75,50
Sulawesi Barat	59,33	61,12	61,87	60,41	61,27	62,60	69,20	71,45	73,50	70,45	71,56	72,67	69,64	70,26	71,17	68,04	68,42	69,84
Sulawesi Tenggara	102,21	102,59	103,49	101,65	101,85	102,03	108,11	109,15	109,90	103,27	104,38	104,77	102,09	104,06	106,90	104,75	104,91	106,14
Nusa Tenggara Barat	197,19	196,31	678,13	652,91	654,06	662,94	673,70	681,44	691,77	663,99	671,84	672,23	657,17	665,83	696,72	706,35	711,92	716,31
Bali	60,39	60,65	60,64	61,01	60,62	62,11	63,34	62,94	62,12	60,78	61,21	61,13	58,75	59,37	59,54	59,56	59,71	61,38
Nusa Tenggara Timur	18,44	18,49	19,03	18,85	19,08	19,40	20,38	20,60	20,89	19,49	18,89	18,66	18,05	17,92	17,99	17,54	17,59	17,45
Maluku	47,92	48,71	49,32	48,46	48,84	49,40	50,34	51,36	52,50	51,61	52,09	52,06	50,67	49,09	49,07	47,72	48,15	48,42
Papua	24,01	22,84	25,37	28,55	28,72	28,94	31,90	31,16	31,42	30,28	29,95	30,08	27,03	26,75	26,51	27,04	27,00	26,98
Maluku Utara	88,17	90,59	92,07	91,41	94,64	97,06	98,55	101,21	107,78	108,21	112,33	113,49	114,23	114,69	117,78	115,34	115,73	117,33
Papua Barat	19,54	19,89	20,13	19,21	19,12	19,01	19,59	19,40	19,28	18,80	18,61	18,37	17,12	16,90	16,73	15,85	15,67	15,73

Lanjutan Lampiran 6

Prov	2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	153,13	153,94	155,00	160,38	162,59	159,94	156,28	157,83	160,36	162,92	165,66	166,59
Banten	117,74	116,95	117,24	128,75	126,06	121,16	116,95	117,41	119,08	115,56	116,65	117,89
DKI Jakarta	352,98	351,93	360,13	404,28	413,03	403,49	368,28	364,52	371,48	361,90	365,83	365,65
D.I Yogyakarta	199,09	202,07	201,52	214,95	213,96	215,59	197,53	199,93	202,14	196,86	200,09	200,35
Jawa Tengah	105,31	105,57	105,51	108,14	107,82	108,12	101,49	101,85	103,13	105,74	107,00	106,96
Jawa Timur	94,64	94,58	95,55	101,16	103,45	101,37	95,48	96,23	97,81	99,90	101,56	101,33
Bengkulu	223,02	223,95	227,51	234,78	233,72	237,37	234,19	236,81	242,54	244,82	249,06	249,76
Jambi	135,55	136,33	137,13	150,84	150,26	151,48	145,90	147,42	149,46	145,17	146,75	147,01
Aceh	1.182,58	1.246,28	1.321,17	1.433,20	1.445,42	1.858,26	1.869,71	1.899,41	1.989,38	1.979,15	1.992,05	2.004,79
Sumatera Utara	95,26	95,08	96,20	100,59	100,70	100,40	97,07	98,61	100,64	101,11	102,05	107,67
Sumatera Barat	137,10	136,56	137,99	146,43	145,34	146,77	140,65	142,38	144,65	142,48	143,55	143,55
Riau	52,71	52,07	52,18	58,84	58,69	58,82	53,72	54,39	55,37	53,74	56,31	56,30
Sumatera Selatan	111,38	113,04	116,42	119,99	119,89	121,40	117,35	118,55	121,17	125,86	128,81	130,01
Bangka Belitung	75,28	74,43	77,21	79,15	91,42	91,45	87,32	86,98	91,44	87,15	87,83	88,68
Kepulauan Riau	95,92	96,29	99,16	104,83	103,41	102,79	98,69	98,75	99,83	94,86	94,28	94,40
Lampung	90,38	91,58	92,75	92,63	92,49	92,26	89,01	90,69	93,22	103,78	105,21	105,40
Kalimantan Selatan	177,78	174,74	177,40	175,65	174,48	173,39	169,14	170,53	173,44	173,92	174,50	165,18
Kalimantan Barat	200,17	200,71	203,50	222,42	221,98	225,84	217,38	220,30	223,91	216,90	218,28	220,12
Kalimantan Timur	58,19	58,45	59,32	65,87	65,61	65,78	67,07	67,28	69,10	65,95	66,81	66,07
Kalimantan Tengah	108,98	109,27	109,85	117,95	117,54	117,60	111,98	113,39	113,69	107,82	108,89	107,98
Sulawesi Tengah	92,18	92,99	93,84	94,35	94,30	95,79	94,03	95,53	97,32	93,44	94,87	94,79
Sulawesi Selatan	86,27	87,00	87,90	88,32	88,15	89,32	83,35	84,74	86,26	92,02	94,27	95,11
Sulawesi Utara	57,90	58,99	60,99	63,74	64,58	66,92	62,95	65,11	66,79	63,30	65,30	66,23
Gorontalo	75,68	76,34	76,65	80,72	81,92	79,92	78,88	81,01	84,12	87,78	90,68	92,23
Sulawesi Barat	76,49	77,47	78,11	79,59	79,88	68,19	81,44	82,69	83,60	82,06	82,66	83,63
Sulawesi Tenggara	114,43	114,82	115,72	115,90	115,33	117,25	112,37	113,83	115,37	114,53	117,68	118,10
Nusa Tenggara Barat	751,84	758,60	767,07	766,80	768,72	779,51	760,56	768,97	788,96	811,91	828,02	838,56
Bali	66,77	66,47	67,13	73,31	73,23	74,10	73,21	74,10	75,00	74,94	75,14	75,58
Nusa Tenggara Timur	18,49	18,64	19,84	19,63	19,88	19,63	19,25	19,77	20,13	20,31	20,66	20,92
Maluku	49,32	49,43	49,70	50,99	51,19	52,15	51,99	53,35	54,09	54,61	55,89	57,23
Papua	28,80	29,19	29,34	28,40	28,41	28,78	26,77	26,74	27,00	25,81	26,22	25,90
Maluku Utara	121,20	121,50	123,49	128,58	128,52	130,18	122,65	124,31	127,05	119,49	123,31	125,08
Papua Barat	16,67	16,65	16,73	17,11	17,02	16,69	16,28	16,29	16,60	16,11	16,23	16,44

Lanjutan Lampiran 6

Nilai Aktual Dimensi 3 Prov	2022											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	157,98	158,88	163,00	159,55	163,88	168,30	166,98	169,15	172,74	172,02	174,11	177,93
Banten	134,95	136,45	139,44	134,99	136,27	140,04	137,75	140,66	142,60	139,15	144,35	149,50
DKI Jakarta	315,77	326,78	342,19	330,98	336,84	362,78	355,59	359,53	363,55	351,25	360,00	364,50
D.I Yogyakarta	203,71	204,71	209,72	203,94	205,70	210,56	207,88	209,18	209,30	202,86	206,89	212,57
Jawa Tengah	97,67	97,92	99,96	100,14	100,86	102,77	100,05	102,33	104,15	103,51	104,90	105,75
Jawa Timur	87,71	88,48	90,37	88,76	89,21	90,96	87,95	89,26	91,57	92,86	93,42	94,83
Bengkulu	250,20	254,08	260,50	239,93	240,69	245,32	249,86	254,21	260,10	252,41	258,34	261,08
Jambi	136,77	133,13	135,30	124,23	124,84	126,44	123,28	125,17	127,80	127,91	130,44	133,19
Aceh	1.898,88	1.911,18	1.959,23	1.830,01	1.840,23	1.859,08	1.790,91	1.803,96	1.828,19	1.709,46	1.728,78	1.740,37
Sumatera Utara	110,16	113,19	113,51	110,53	111,32	112,91	110,67	111,82	112,12	110,90	112,04	111,99
Sumatera Barat	147,30	150,49	154,61	150,59	151,41	154,73	151,21	153,20	155,24	151,18	153,47	155,61
Riau	49,55	48,37	49,88	49,82	49,99	51,46	51,65	191,25	219,01	213,88	225,28	227,14
Sumatera Selatan	128,45	131,86	133,74	118,64	119,52	122,90	118,97	120,81	124,41	130,31	133,13	134,54
Bangka Belitung	81,64	83,05	106,35	103,88	103,95	104,80	107,22	108,31	109,37	106,35	106,20	108,03
Kepulauan Riau	84,64	85,26	86,05	82,60	82,17	83,31	81,62	383,19	301,81	284,63	256,26	258,89
Lampung	102,46	102,97	104,80	96,64	97,12	98,32	97,62	98,81	103,46	110,36	111,48	113,58
Kalimantan Selatan	139,41	148,58	152,08	130,53	132,74	133,71	128,35	130,74	132,95	132,16	130,51	134,34
Kalimantan Barat	256,28	253,62	257,36	253,32	253,03	259,95	257,73	260,13	277,36	291,59	293,34	295,51
Kalimantan Timur	65,94	65,72	67,43	54,93	55,63	56,93	52,27	52,91	54,03	54,07	55,46	55,43
Kalimantan Tengah	95,25	93,67	98,63	92,79	93,29	93,81	96,40	97,29	98,48	93,66	94,22	93,94
Sulawesi Tengah	86,83	87,50	89,63	77,37	77,75	75,39	77,51	79,08	79,32	74,93	76,93	78,23
Sulawesi Selatan	106,03	109,11	109,37	101,57	102,31	105,32	101,98	101,90	103,26	105,80	107,67	107,46
Sulawesi Utara	80,83	81,60	83,66	80,07	80,33	82,98	81,32	82,57	84,35	79,84	81,95	83,05
Gorontalo	110,79	111,98	113,72	109,91	111,19	114,07	112,03	114,74	117,24	116,92	118,59	122,34
Sulawesi Barat	92,67	94,22	95,07	90,32	90,53	91,56	91,21	92,20	92,74	91,40	91,91	93,89
Sulawesi Tenggara	127,51	124,41	126,74	117,89	119,05	120,63	114,83	116,18	118,89	113,02	114,09	114,60
Nusa Tenggara Barat	890,03	888,11	907,52	861,65	873,52	892,72	878,47	899,89	914,90	921,80	931,89	936,65
Bali	72,84	89,45	90,82	83,63	84,34	85,51	82,86	82,40	83,11	80,61	81,14	82,57
Nusa Tenggara Timur	25,13	25,62	26,52	24,80	25,50	26,27	26,15	27,00	27,71	27,52	28,17	28,92
Maluku	71,32	73,44	75,71	72,62	73,15	75,42	74,82	76,75	79,69	80,02	82,23	83,30
Papua	20,05	20,21	20,41	20,30	20,46	20,65	21,43	21,80	22,26	20,91	21,07	22,01
Maluku Utara	117,64	120,31	124,39	120,74	120,47	123,88	124,45	124,12	128,77	121,20	125,74	130,24
Papua Barat	17,42	17,85	17,76	17,98	17,96	17,82	17,75	18,16	18,23	18,17	18,65	20,04

Lampiran 7

Nilai X1

X1 Prov	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Banten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
DKI Jakarta	0,76	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73
D.I Yogyakarta	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23
Jawa Tengah	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Jawa Timur	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Bengkulu	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19
Jambi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Aceh	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,84	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85
Sumatera Utara	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Sumatera Barat	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Riau	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Sumatera Selatan	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Bangka Belitung	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10
Kepulauan Riau	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Lampung	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kalimantan Selatan	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,16	0,16	0,16
Kalimantan Barat	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Kalimantan Timur	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
Kalimantan Tengah	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulawesi Tengah	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Sulawesi Selatan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Sulawesi Utara	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Gorontalo	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Sulawesi Barat	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sulawesi Tenggara	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Nusa Tenggara Barat	0,15	0,15	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44
Bali	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Nusa Tenggara Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Maluku	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Papua	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Maluku Utara	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Papua Barat	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07

Lampiran 8

Nilai X2

X2 Prov	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Banten	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
DKI Jakarta	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56
D.I Yogyakarta	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
Jawa Tengah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Jawa Timur	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Bengkulu	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
Jambi	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Aceh	0,66	0,64	0,67	0,67	0,66	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,64	0,69	0,67	0,66	0,66	0,69	0,69	0,65
Sumatera Utara	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Sumatera Barat	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Riau	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sumatera Selatan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
Bangka Belitung	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,11	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,09	0,09
Kepulauan Riau	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
Lampung	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Kalimantan Selatan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,15	0,15	0,15
Kalimantan Barat	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Kalimantan Timur	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18
Kalimantan Tengah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Sulawesi Tengah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulawesi Selatan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sulawesi Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Gorontalo	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Sulawesi Barat	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Sulawesi Tenggara	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Nusa Tenggara Barat	0,13	0,13	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,39	0,38	0,36
Bali	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Nusa Tenggara Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maluku	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Papua	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Maluku Utara	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
Papua Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Lampiran 9

Nilai ISFI

ISFI Prov	2018						2019											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jawa Barat	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Banten	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
DKI Jakarta	0,67	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65
D.I Yogyakarta	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22
Jawa Tengah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Jawa Timur	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Bengkulu	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Jambi	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
Aceh	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,74	0,77	0,76	0,76	0,75	0,77	0,77	0,75
Sumatera Utara	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sumatera Barat	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Riau	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Sumatera Selatan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Bangka Belitung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,09
Kepulauan Riau	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Lampung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09
Kalimantan Selatan	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15
Kalimantan Barat	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12
Kalimantan Timur	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
Kalimantan Tengah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulawesi Tengah	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Sulawesi Selatan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
Sulawesi Utara	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Gorontalo	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
Sulawesi Barat	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sulawesi Tenggara	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Nusa Tenggara Barat	0,14	0,14	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,40
Bali	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
Nusa Tenggara Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maluku	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Papua	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Maluku Utara	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Papua Barat	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06

Lampiran 10

Variabel Dependen dan Variabel Independen

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Jawa Barat	2018M7	7.261	28.322	8,44	7.342	8,14	0,14
Jawa Barat	2018M8	7.252	28.967	8,52	7.261	7,63	0,14
Jawa Barat	2018M9	7.219	29.039	7,95	7.252	7,50	0,14
Jawa Barat	2018M10	7.204	29.072	7,05	7.219	12,43	0,14
Jawa Barat	2018M11	7.383	29.071	6,76	7.204	7,54	0,14
Jawa Barat	2018M12	7.185	30.431	5,80	7.383	7,72	0,14
Jawa Barat	2019M1	8.090	30.190	5,15	7.185	7,69	0,13
Jawa Barat	2019M2	7.905	30.613	5,56	8.090	7,82	0,13
Jawa Barat	2019M3	8.023	30.858	5,39	7.905	7,67	0,13
Jawa Barat	2019M4	8.139	30.785	5,71	8.023	7,94	0,13
Jawa Barat	2019M5	8.355	31.817	5,63	8.139	13,09	0,13
Jawa Barat	2019M6	8.290	32.383	5,03	8.355	7,67	0,13
Jawa Barat	2019M7	8.229	33.194	5,35	8.290	7,76	0,13
Jawa Barat	2019M8	8.267	33.321	5,37	8.229	7,82	0,13
Jawa Barat	2019M9	8.364	33.772	5,42	8.267	7,73	0,13
Jawa Barat	2019M10	8.406	34.253	5,07	8.364	7,75	0,13
Jawa Barat	2019M11	8.674	34.942	4,65	8.406	12,97	0,13
Jawa Barat	2019M12	8.982	35.244	4,22	8.674	7,91	0,13
Jawa Barat	2020M1	8.804	35.114	4,65	8.982	8,15	0,13
Jawa Barat	2020M2	9.810	35.629	4,30	8.804	12,76	0,13
Jawa Barat	2020M3	9.737	35.917	4,28	9.810	13,01	0,13
Jawa Barat	2020M4	9.770	35.558	4,29	9.737	12,50	0,12
Jawa Barat	2020M5	10.147	36.395	4,04	9.770	7,52	0,12
Jawa Barat	2020M6	8.888	38.016	5,03	10.147	12,43	0,11
Jawa Barat	2020M7	8.888	38.328	4,90	8.888	7,19	0,11
Jawa Barat	2020M8	8.891	39.016	4,70	8.888	12,27	0,11
Jawa Barat	2020M9	9.048	39.619	4,81	8.891	7,16	0,11
Jawa Barat	2020M10	8.569	40.040	4,86	9.048	12,06	0,10
Jawa Barat	2020M11	8.823	41.078	5,02	8.569	12,11	0,09
Jawa Barat	2020M12	8.814	41.878	4,22	8.823	12,22	0,09
Jawa Barat	2021M1	9.784	40.062	3,91	8.814	11,77	0,08
Jawa Barat	2021M2	9.676	39.813	4,05	9.784	11,67	0,08
Jawa Barat	2021M3	9.526	38.462	4,11	9.676	11,62	0,08
Jawa Barat	2021M4	9.653	39.892	4,31	9.526	11,63	0,08
Jawa Barat	2021M5	9.617	39.859	4,26	9.653	11,91	0,08
Jawa Barat	2021M6	9.643	39.778	4,46	9.617	6,68	0,08
Jawa Barat	2021M7	9.591	39.494	4,27	9.643	6,78	0,08
Jawa Barat	2021M8	9.861	38.748	4,15	9.591	6,81	0,08
Jawa Barat	2021M9	10.032	38.716	3,77	9.861	8,10	0,08
Jawa Barat	2021M10	10.005	38.856	3,70	10.032	8,02	0,08
Jawa Barat	2021M11	9.242	39.644	4,15	10.005	7,85	0,08
Jawa Barat	2021M12	9.313	41.627	4,18	9.242	7,83	0,08
Jawa Barat	2022M1	9.205	41.607	4,55	9.313	6,59	0,08
Jawa Barat	2022M2	9.255	41.301	4,53	9.205	10,78	0,08
Jawa Barat	2022M3	9.371	41.003	4,47	9.255	10,74	0,08
Jawa Barat	2022M4	9.438	41.620	4,82	9.371	10,84	0,08
Jawa Barat	2022M5	9.531	41.859	4,85	9.438	10,61	0,08
Jawa Barat	2022M6	9.678	42.724	4,70	9.531	10,57	0,08
Jawa Barat	2022M7	9.643	42.843	4,65	9.678	10,46	0,08
Jawa Barat	2022M8	9.652	43.116	4,69	9.643	10,51	0,08
Jawa Barat	2022M9	9.757	42.746	4,65	9.652	10,41	0,08
Jawa Barat	2022M10	9.739	42.724	4,51	9.757	10,50	0,09
Jawa Barat	2022M11	9.708	42.892	4,38	9.739	10,63	0,09
Jawa Barat	2022M12	9.730	45.093	4,16	9.708	10,71	0,09
Banten	2018M7	1.216	7.496	7,98	1.218	8,14	0,14
Banten	2018M8	1.197	7.713	7,93	1.216	7,63	0,14
Banten	2018M9	1.193	7.601	7,88	1.197	7,50	0,14
Banten	2018M10	1.167	7.828	7,56	1.193	12,43	0,14
Banten	2018M11	1.069	7.830	8,41	1.167	7,54	0,14
Banten	2018M12	1.104	7.873	4,53	1.069	7,72	0,14
Banten	2019M1	1.193	7.888	5,87	1.104	7,69	0,13
Banten	2019M2	1.262	8.226	5,18	1.193	7,82	0,13
Banten	2019M3	1.402	8.283	4,82	1.262	7,67	0,13
Banten	2019M4	1.478	8.350	5,64	1.402	7,94	0,14
Banten	2019M5	1.461	8.557	5,04	1.478	13,09	0,14
Banten	2019M6	1.438	8.605	4,37	1.461	7,67	0,13
Banten	2019M7	1.327	8.738	4,92	1.438	7,76	0,13
Banten	2019M8	1.400	9.108	4,97	1.327	7,82	0,14
Banten	2019M9	1.358	9.429	4,71	1.400	7,73	0,14
Banten	2019M10	1.356	9.588	4,93	1.358	7,75	0,13
Banten	2019M11	1.364	9.712	4,49	1.356	12,97	0,13
Banten	2019M12	1.452	10.049	4,36	1.364	7,91	0,13
Banten	2020M1	1.365	9.943	4,31	1.452	8,15	0,14
Banten	2020M2	1.392	10.010	3,39	1.365	12,76	0,13
Banten	2020M3	1.359	9.749	3,68	1.392	13,01	0,13
Banten	2020M4	1.425	9.544	2,95	1.359	12,50	0,12
Banten	2020M5	1.147	9.557	3,68	1.425	7,52	0,12
Banten	2020M6	1.131	9.439	3,56	1.147	12,43	0,11
Banten	2020M7	1.115	9.721	4,91	1.131	7,19	0,11

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Banten	2020M8	1.092	9.786	5,14	1.115	12,27	0,11
Banten	2020M9	1.089	10.037	3,73	1.092	7,16	0,11
Banten	2020M10	1.081	10.200	3,79	1.089	12,06	0,10
Banten	2020M11	1.086	10.326	9,80	1.081	12,11	0,09
Banten	2020M12	1.078	10.664	6,70	1.086	12,22	0,09
Banten	2021M1	1.454	13.272	5,94	1.078	11,77	0,09
Banten	2021M2	1.459	13.671	5,56	1.454	11,67	0,09
Banten	2021M3	1.467	13.257	3,85	1.459	11,62	0,09
Banten	2021M4	1.429	13.148	4,02	1.467	11,63	0,09
Banten	2021M5	1.414	13.349	4,01	1.429	11,91	0,09
Banten	2021M6	1.484	13.172	3,71	1.414	6,68	0,09
Banten	2021M7	1.517	13.285	5,10	1.484	6,78	0,09
Banten	2021M8	1.711	13.368	5,85	1.517	6,81	0,09
Banten	2021M9	1.701	13.603	5,57	1.711	8,10	0,09
Banten	2021M10	1.606	13.939	5,48	1.701	8,02	0,09
Banten	2021M11	1.570	13.675	5,57	1.606	7,85	0,09
Banten	2021M12	1.645	14.067	5,58	1.570	7,83	0,09
Banten	2022M1	1.626	14.110	5,58	1.645	6,59	0,09
Banten	2022M2	1.916	13.919	4,53	1.626	10,78	0,09
Banten	2022M3	1.942	13.649	4,49	1.916	10,74	0,09
Banten	2022M4	1.686	13.506	5,62	1.942	10,84	0,09
Banten	2022M5	1.716	15.290	5,34	1.686	10,61	0,09
Banten	2022M6	1.779	17.624	5,07	1.716	10,57	0,10
Banten	2022M7	1.796	17.638	5,29	1.779	10,46	0,10
Banten	2022M8	1.819	16.898	4,85	1.796	10,51	0,09
Banten	2022M9	1.832	16.542	4,39	1.819	10,41	0,09
Banten	2022M10	1.819	16.234	4,72	1.832	10,50	0,09
Banten	2022M11	1.927	17.163	5,77	1.819	10,63	0,09
Banten	2022M12	1.969	16.986	3,81	1.927	10,71	0,09
DKI Jakarta	2018M7	10.602	108.066	2,77	10.245	8,14	0,67
DKI Jakarta	2018M8	10.777	107.476	2,31	10.602	7,63	0,66
DKI Jakarta	2018M9	11.042	108.053	2,78	10.777	7,50	0,67
DKI Jakarta	2018M10	11.085	107.598	2,76	11.042	12,43	0,67
DKI Jakarta	2018M11	9.927	107.823	2,21	11.085	7,54	0,67
DKI Jakarta	2018M12	10.097	114.225	2,59	9.927	7,72	0,67
DKI Jakarta	2019M1	10.805	112.803	2,52	10.097	7,69	0,66
DKI Jakarta	2019M2	10.533	112.815	2,57	10.805	7,82	0,66
DKI Jakarta	2019M3	10.860	113.778	2,84	10.533	7,67	0,67
DKI Jakarta	2019M4	11.267	111.427	2,91	10.860	7,94	0,67
DKI Jakarta	2019M5	11.319	108.037	3,06	11.267	13,09	0,67
DKI Jakarta	2019M6	11.517	109.437	3,03	11.319	7,67	0,67
DKI Jakarta	2019M7	11.453	108.820	3,24	11.517	7,76	0,66
DKI Jakarta	2019M8	11.105	105.916	3,36	11.453	7,82	0,66
DKI Jakarta	2019M9	11.268	106.621	3,02	11.105	7,73	0,66
DKI Jakarta	2019M10	11.327	109.749	3,21	11.268	7,75	0,66
DKI Jakarta	2019M11	10.805	107.844	3,35	11.327	12,97	0,65
DKI Jakarta	2019M12	11.688	120.936	2,98	10.805	7,91	0,65
DKI Jakarta	2020M1	12.136	120.545	3,20	11.688	8,15	0,64
DKI Jakarta	2020M2	18.288	121.930	2,46	12.136	12,76	0,63
DKI Jakarta	2020M3	18.876	118.626	2,55	18.288	13,01	0,63
DKI Jakarta	2020M4	20.047	119.753	2,45	18.876	12,50	0,61
DKI Jakarta	2020M5	21.743	115.793	2,22	20.047	7,52	0,61
DKI Jakarta	2020M6	12.748	115.448	3,39	21.743	12,43	0,59
DKI Jakarta	2020M7	12.248	109.636	3,72	12.748	7,19	0,58
DKI Jakarta	2020M8	12.232	108.893	3,73	12.248	12,27	0,58
DKI Jakarta	2020M9	12.504	118.414	3,90	12.232	7,16	0,57
DKI Jakarta	2020M10	12.616	119.343	3,87	12.504	12,06	0,55
DKI Jakarta	2020M11	12.699	117.042	4,62	12.616	12,11	0,52
DKI Jakarta	2020M12	13.061	123.866	4,49	12.699	12,22	0,51
DKI Jakarta	2021M1	12.614	121.277	5,04	13.061	11,77	0,50
DKI Jakarta	2021M2	12.342	121.087	5,87	12.614	11,67	0,50
DKI Jakarta	2021M3	12.562	121.023	5,29	12.342	11,62	0,50
DKI Jakarta	2021M4	12.586	123.471	5,30	12.562	11,63	0,50
DKI Jakarta	2021M5	12.673	127.666	5,57	12.586	11,91	0,50
DKI Jakarta	2021M6	13.344	133.981	4,71	12.673	6,68	0,50
DKI Jakarta	2021M7	11.597	136.031	4,32	13.344	6,78	0,50
DKI Jakarta	2021M8	11.910	135.593	4,44	11.597	6,81	0,50
DKI Jakarta	2021M9	12.429	135.456	4,26	11.910	8,10	0,50
DKI Jakarta	2021M10	12.788	134.769	4,04	12.429	8,02	0,50
DKI Jakarta	2021M11	12.627	140.961	2,80	12.788	7,85	0,50
DKI Jakarta	2021M12	12.763	146.442	3,03	12.627	7,83	0,50
DKI Jakarta	2022M1	12.700	149.684	3,12	12.763	6,59	0,50
DKI Jakarta	2022M2	12.737	149.730	3,26	12.700	10,78	0,50
DKI Jakarta	2022M3	13.077	148.548	3,23	12.737	10,74	0,50
DKI Jakarta	2022M4	12.570	147.032	3,30	13.077	10,84	0,50
DKI Jakarta	2022M5	11.976	150.205	3,71	12.570	10,61	0,50
DKI Jakarta	2022M6	12.195	151.841	3,46	11.976	10,57	0,51
DKI Jakarta	2022M7	12.171	152.880	4,01	12.195	10,46	0,51
DKI Jakarta	2022M8	12.203	158.351	3,91	12.171	10,51	0,51
DKI Jakarta	2022M9	12.126	158.098	3,87	12.203	10,41	0,51
DKI Jakarta	2022M10	12.268	154.481	4,09	12.126	10,50	0,51
DKI Jakarta	2022M11	12.237	158.723	4,11	12.268	10,63	0,51
DKI Jakarta	2022M12	12.860	172.624	3,19	12.237	10,71	0,51
DI Yogyakarta	2018M7	848	4.380	3,04	857	8,14	0,24
DI Yogyakarta	2018M8	855	4.157	2,75	848	7,63	0,24
DI Yogyakarta	2018M9	853	4.157	2,66	855	7,50	0,24
DI Yogyakarta	2018M10	832	4.136	2,75	853	12,43	0,24
DI Yogyakarta	2018M11	835	4.104	2,68	832	7,54	0,23

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
DI Yogyakarta	2018M12	817	4.183	2,61	835	7,72	0,23
DI Yogyakarta	2019M1	827	4.323	3,03	817	7,69	0,23
DI Yogyakarta	2019M2	823	4.394	3,03	827	7,82	0,23
DI Yogyakarta	2019M3	856	4.362	2,92	823	7,67	0,23
DI Yogyakarta	2019M4	871	4.363	2,75	856	7,94	0,23
DI Yogyakarta	2019M5	887	4.575	4,50	871	13,09	0,23
DI Yogyakarta	2019M6	877	4.633	3,05	887	7,67	0,23
DI Yogyakarta	2019M7	850	4.737	2,73	877	7,76	0,23
DI Yogyakarta	2019M8	834	4.843	2,43	850	7,82	0,23
DI Yogyakarta	2019M9	821	4.814	2,43	834	7,73	0,23
DI Yogyakarta	2019M10	783	4.885	2,61	821	7,75	0,23
DI Yogyakarta	2019M11	824	4.907	2,35	783	12,97	0,22
DI Yogyakarta	2019M12	822	4.810	2,79	824	7,91	0,22
DI Yogyakarta	2020M1	760	4.973	4,69	822	8,15	0,22
DI Yogyakarta	2020M2	797	5.113	5,21	760	12,76	0,22
DI Yogyakarta	2020M3	771	5.076	6,15	797	13,01	0,22
DI Yogyakarta	2020M4	766	5.002	5,83	771	12,50	0,21
DI Yogyakarta	2020M5	750	5.068	6,13	766	7,52	0,20
DI Yogyakarta	2020M6	766	5.077	5,78	750	12,43	0,19
DI Yogyakarta	2020M7	757	5.109	5,73	766	7,19	0,19
DI Yogyakarta	2020M8	763	5.324	5,73	757	12,27	0,19
DI Yogyakarta	2020M9	744	5.424	4,91	763	7,16	0,19
DI Yogyakarta	2020M10	726	5.488	4,87	744	12,06	0,17
DI Yogyakarta	2020M11	723	5.544	4,78	726	12,11	0,15
DI Yogyakarta	2020M12	712	5.564	5,74	723	12,22	0,14
DI Yogyakarta	2021M1	776	5.608	5,17	712	11,77	0,14
DI Yogyakarta	2021M2	795	5.605	4,92	776	11,67	0,14
DI Yogyakarta	2021M3	794	5.580	2,71	795	11,62	0,14
DI Yogyakarta	2021M4	807	5.465	3,74	794	11,63	0,14
DI Yogyakarta	2021M5	780	5.442	3,51	807	11,91	0,14
DI Yogyakarta	2021M6	793	5.476	2,82	780	6,68	0,14
DI Yogyakarta	2021M7	771	5.635	3,91	793	6,78	0,14
DI Yogyakarta	2021M8	775	5.836	2,90	771	6,81	0,14
DI Yogyakarta	2021M9	774	5.783	2,79	775	8,10	0,14
DI Yogyakarta	2021M10	772	5.807	2,78	774	8,02	0,14
DI Yogyakarta	2021M11	831	5.991	2,61	772	7,85	0,14
DI Yogyakarta	2021M12	832	6.156	2,43	831	7,83	0,14
DI Yogyakarta	2022M1	819	6.272	2,33	832	6,59	0,14
DI Yogyakarta	2022M2	809	6.330	2,10	819	10,78	0,14
DI Yogyakarta	2022M3	825	6.389	2,13	809	10,74	0,15
DI Yogyakarta	2022M4	795	6.262	2,84	825	10,84	0,14
DI Yogyakarta	2022M5	805	6.373	2,96	795	10,61	0,14
DI Yogyakarta	2022M6	821	6.286	2,29	805	10,57	0,14
DI Yogyakarta	2022M7	785	6.434	2,10	821	10,46	0,14
DI Yogyakarta	2022M8	790	6.481	2,32	785	10,51	0,14
DI Yogyakarta	2022M9	787	6.446	2,31	790	10,41	0,14
DI Yogyakarta	2022M10	796	6.206	2,91	787	10,50	0,14
DI Yogyakarta	2022M11	804	6.280	3,16	796	10,63	0,13
DI Yogyakarta	2022M12	802	6.354	3,26	804	10,71	0,13
Jawa Tengah	2018M7	3.684	10.653	3,29	3.771	8,14	0,09
Jawa Tengah	2018M8	3.723	10.814	3,55	3.684	7,63	0,09
Jawa Tengah	2018M9	3.762	10.948	3,36	3.723	7,50	0,09
Jawa Tengah	2018M10	3.791	11.079	3,20	3.762	12,43	0,09
Jawa Tengah	2018M11	3.655	11.115	3,29	3.791	7,54	0,09
Jawa Tengah	2018M12	3.634	11.742	3,17	3.655	7,72	0,09
Jawa Tengah	2019M1	3.704	11.641	4,53	3.634	7,69	0,09
Jawa Tengah	2019M2	3.694	11.745	4,85	3.704	7,82	0,09
Jawa Tengah	2019M3	3.761	11.913	4,65	3.694	7,67	0,09
Jawa Tengah	2019M4	3.743	11.649	4,99	3.761	7,94	0,09
Jawa Tengah	2019M5	3.840	11.479	4,91	3.743	13,09	0,09
Jawa Tengah	2019M6	3.852	12.394	5,01	3.840	7,67	0,09
Jawa Tengah	2019M7	3.824	12.249	4,79	3.852	7,76	0,09
Jawa Tengah	2019M8	3.736	11.832	4,62	3.824	7,82	0,09
Jawa Tengah	2019M9	3.854	12.840	4,35	3.736	7,73	0,09
Jawa Tengah	2019M10	3.822	12.908	4,64	3.854	7,75	0,09
Jawa Tengah	2019M11	3.898	12.908	4,45	3.822	12,97	0,09
Jawa Tengah	2019M12	4.007	13.255	4,63	3.898	7,91	0,09
Jawa Tengah	2020M1	3.874	13.234	5,00	4.007	8,15	0,08
Jawa Tengah	2020M2	4.915	13.598	13,30	3.874	12,76	0,08
Jawa Tengah	2020M3	4.807	13.445	13,76	4.915	13,01	0,08
Jawa Tengah	2020M4	4.665	13.206	11,49	4.807	12,50	0,07
Jawa Tengah	2020M5	4.778	13.092	13,98	4.665	7,52	0,07
Jawa Tengah	2020M6	3.903	13.321	5,57	4.778	12,43	0,07
Jawa Tengah	2020M7	4.007	13.288	8,21	3.903	7,19	0,07
Jawa Tengah	2020M8	3.857	13.546	5,03	4.007	12,27	0,07
Jawa Tengah	2020M9	3.894	13.979	4,86	3.857	7,16	0,06
Jawa Tengah	2020M10	3.987	14.140	4,67	3.894	12,06	0,06
Jawa Tengah	2020M11	3.984	14.516	4,21	3.987	12,11	0,05
Jawa Tengah	2020M12	4.020	15.083	4,13	3.984	12,22	0,05
Jawa Tengah	2021M1	4.124	14.824	4,07	4.020	11,77	0,05
Jawa Tengah	2021M2	4.087	14.783	3,95	4.124	11,67	0,05
Jawa Tengah	2021M3	4.088	14.812	3,94	4.087	11,62	0,05
Jawa Tengah	2021M4	4.078	14.552	4,29	4.088	11,63	0,05
Jawa Tengah	2021M5	4.106	14.510	5,13	4.078	11,91	0,05
Jawa Tengah	2021M6	4.197	14.835	5,08	4.106	6,68	0,05
Jawa Tengah	2021M7	4.361	15.461	5,35	4.197	6,78	0,05
Jawa Tengah	2021M8	4.536	15.784	4,79	4.361	6,81	0,05
Jawa Tengah	2021M9	4.570	15.943	4,54	4.536	8,10	0,05

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Jawa Tengah	2021M10	4.536	16.172	3,63	4.570	8,02	0,05
Jawa Tengah	2021M11	4.223	15.946	3,21	4.536	7,85	0,05
Jawa Tengah	2021M12	4.298	17.263	3,21	4.223	7,83	0,05
Jawa Tengah	2022M1	4.272	17.097	3,31	4.298	6,59	0,05
Jawa Tengah	2022M2	4.335	17.159	3,27	4.272	10,78	0,05
Jawa Tengah	2022M3	4.461	16.943	3,64	4.335	10,74	0,05
Jawa Tengah	2022M4	4.549	16.581	3,72	4.461	10,84	0,05
Jawa Tengah	2022M5	4.603	16.849	3,51	4.549	10,61	0,05
Jawa Tengah	2022M6	4.747	17.039	3,14	4.603	10,57	0,05
Jawa Tengah	2022M7	4.805	17.159	3,08	4.747	10,46	0,05
Jawa Tengah	2022M8	4.902	17.144	2,91	4.805	10,51	0,05
Jawa Tengah	2022M9	5.017	17.454	3,06	4.902	10,41	0,05
Jawa Tengah	2022M10	5.060	17.631	3,22	5.017	10,50	0,05
Jawa Tengah	2022M11	5.182	17.892	3,24	5.060	10,63	0,05
Jawa Tengah	2022M12	5.125	19.367	2,89	5.182	10,71	0,05
Jawa Timur	2018M7	5.461	17.938	6,14	5.473	8,14	0,10
Jawa Timur	2018M8	5.567	18.128	6,36	5.461	7,63	0,10
Jawa Timur	2018M9	5.658	18.522	6,19	5.567	7,50	0,10
Jawa Timur	2018M10	5.625	18.717	6,07	5.658	12,43	0,10
Jawa Timur	2018M11	5.729	18.368	5,78	5.625	7,54	0,10
Jawa Timur	2018M12	5.819	19.170	5,66	5.729	7,72	0,10
Jawa Timur	2019M1	5.779	19.239	4,57	5.819	7,69	0,10
Jawa Timur	2019M2	5.815	19.365	4,74	5.779	7,82	0,10
Jawa Timur	2019M3	5.971	19.208	4,43	5.815	7,67	0,10
Jawa Timur	2019M4	6.016	18.952	4,80	5.971	7,94	0,10
Jawa Timur	2019M5	6.266	18.955	5,42	6.016	13,09	0,10
Jawa Timur	2019M6	6.296	19.308	4,89	6.266	7,67	0,10
Jawa Timur	2019M7	6.287	19.659	4,67	6.296	7,76	0,10
Jawa Timur	2019M8	6.281	20.130	4,60	6.287	7,82	0,10
Jawa Timur	2019M9	6.374	20.686	4,62	6.281	7,73	0,10
Jawa Timur	2019M10	6.326	20.955	4,57	6.374	7,75	0,10
Jawa Timur	2019M11	6.429	21.190	3,79	6.326	12,97	0,10
Jawa Timur	2019M12	6.679	21.974	4,09	6.429	7,91	0,10
Jawa Timur	2020M1	6.430	21.738	4,65	6.679	8,15	0,10
Jawa Timur	2020M2	6.714	22.063	3,59	6.430	12,76	0,09
Jawa Timur	2020M3	6.666	21.620	3,82	6.714	13,01	0,09
Jawa Timur	2020M4	6.648	21.511	3,95	6.666	12,50	0,09
Jawa Timur	2020M5	7.025	21.032	3,37	6.648	7,52	0,09
Jawa Timur	2020M6	6.366	21.085	3,85	7.025	12,43	0,08
Jawa Timur	2020M7	6.349	21.304	3,59	6.366	7,19	0,08
Jawa Timur	2020M8	6.266	21.647	3,40	6.349	12,27	0,08
Jawa Timur	2020M9	6.314	22.469	3,24	6.266	7,16	0,08
Jawa Timur	2020M10	6.410	22.970	3,27	6.314	12,06	0,07
Jawa Timur	2020M11	6.510	23.745	3,20	6.410	12,11	0,06
Jawa Timur	2020M12	6.408	24.048	3,17	6.510	12,22	0,06
Jawa Timur	2021M1	6.745	24.106	3,55	6.408	11,77	0,06
Jawa Timur	2021M2	6.917	23.870	3,26	6.745	11,67	0,06
Jawa Timur	2021M3	6.984	23.876	3,53	6.917	11,62	0,06
Jawa Timur	2021M4	7.096	23.764	3,30	6.984	11,63	0,06
Jawa Timur	2021M5	7.074	23.562	2,98	7.096	11,91	0,06
Jawa Timur	2021M6	7.291	24.466	3,15	7.074	6,68	0,06
Jawa Timur	2021M7	7.078	24.487	3,32	7.291	6,78	0,06
Jawa Timur	2021M8	7.283	24.560	3,29	7.078	6,81	0,06
Jawa Timur	2021M9	7.266	24.932	6,79	7.283	8,10	0,06
Jawa Timur	2021M10	7.118	25.006	6,76	7.266	8,02	0,06
Jawa Timur	2021M11	7.183	25.084	6,22	7.118	7,85	0,06
Jawa Timur	2021M12	7.205	26.593	6,23	7.183	7,83	0,06
Jawa Timur	2022M1	7.176	26.247	6,33	7.205	6,59	0,06
Jawa Timur	2022M2	7.264	26.282	6,42	7.176	10,78	0,06
Jawa Timur	2022M3	7.348	26.311	6,06	7.264	10,74	0,06
Jawa Timur	2022M4	7.235	26.072	3,92	7.348	10,84	0,06
Jawa Timur	2022M5	7.279	26.325	3,88	7.235	10,61	0,06
Jawa Timur	2022M6	7.392	26.562	3,76	7.279	10,57	0,06
Jawa Timur	2022M7	7.280	26.822	3,01	7.392	10,46	0,06
Jawa Timur	2022M8	7.272	27.021	2,99	7.280	10,51	0,06
Jawa Timur	2022M9	7.418	27.274	3,12	7.272	10,41	0,06
Jawa Timur	2022M10	7.480	27.335	3,23	7.418	10,50	0,06
Jawa Timur	2022M11	7.552	27.512	2,70	7.480	10,63	0,06
Jawa Timur	2022M12	7.437	28.643	2,83	7.552	10,71	0,06
Bengkulu	2018M7	387	753	9,55	388	8,14	0,18
Bengkulu	2018M8	386	745	9,93	387	7,63	0,18
Bengkulu	2018M9	387	739	9,77	386	7,50	0,18
Bengkulu	2018M10	387	752	9,35	387	12,43	0,18
Bengkulu	2018M11	395	752	9,72	387	7,54	0,18
Bengkulu	2018M12	392	799	9,20	395	7,72	0,18
Bengkulu	2019M1	389	771	9,95	392	7,69	0,18
Bengkulu	2019M2	394	761	10,53	389	7,82	0,18
Bengkulu	2019M3	389	738	10,27	394	7,67	0,18
Bengkulu	2019M4	390	730	11,23	389	7,94	0,18
Bengkulu	2019M5	395	758	11,76	390	13,09	0,19
Bengkulu	2019M6	385	779	12,19	395	7,67	0,18
Bengkulu	2019M7	376	803	12,17	385	7,76	0,18
Bengkulu	2019M8	369	832	12,29	376	7,82	0,18
Bengkulu	2019M9	379	846	12,07	369	7,73	0,18
Bengkulu	2019M10	377	851	10,90	379	7,75	0,18
Bengkulu	2019M11	429	870	9,18	377	12,97	0,18
Bengkulu	2019M12	435	908	8,63	429	7,91	0,18
Bengkulu	2020M1	401	893	10,53	435	8,15	0,17

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Bengkulu	2020M2	405	882	11,33	401	12,76	0,17
Bengkulu	2020M3	397	895	11,29	405	13,01	0,17
Bengkulu	2020M4	400	892	12,23	397	12,50	0,16
Bengkulu	2020M5	395	889	12,71	400	7,52	0,16
Bengkulu	2020M6	436	931	11,93	395	12,43	0,15
Bengkulu	2020M7	431	920	12,12	436	7,19	0,14
Bengkulu	2020M8	428	961	11,40	431	12,27	0,15
Bengkulu	2020M9	432	977	10,16	428	7,16	0,14
Bengkulu	2020M10	436	991	9,24	432	12,06	0,13
Bengkulu	2020M11	450	1.023	8,86	436	12,11	0,11
Bengkulu	2020M12	449	1.109	7,99	450	12,22	0,11
Bengkulu	2021M1	467	1.147	7,65	449	11,77	0,10
Bengkulu	2021M2	474	1.186	7,66	467	11,67	0,10
Bengkulu	2021M3	454	771	7,39	474	11,62	0,08
Bengkulu	2021M4	483	1.306	6,65	454	11,63	0,10
Bengkulu	2021M5	483	1.253	6,47	483	11,91	0,10
Bengkulu	2021M6	484	1.335	6,24	483	6,68	0,10
Bengkulu	2021M7	485	1.352	5,87	484	6,78	0,11
Bengkulu	2021M8	503	1.349	4,94	485	6,81	0,10
Bengkulu	2021M9	513	1.328	3,94	503	8,10	0,11
Bengkulu	2021M10	508	1.343	3,11	513	8,02	0,11
Bengkulu	2021M11	518	1.356	3,26	508	7,85	0,11
Bengkulu	2021M12	530	1.329	3,22	518	7,83	0,10
Bengkulu	2022M1	533	1.321	3,09	530	6,59	0,10
Bengkulu	2022M2	543	1.429	3,30	533	10,78	0,10
Bengkulu	2022M3	560	1.443	3,51	543	10,74	0,10
Bengkulu	2022M4	567	1.432	4,06	560	10,84	0,10
Bengkulu	2022M5	565	1.455	4,23	567	10,61	0,10
Bengkulu	2022M6	579	1.534	4,36	565	10,57	0,10
Bengkulu	2022M7	577	1.517	4,56	579	10,46	0,11
Bengkulu	2022M8	580	1.495	4,24	577	10,51	0,10
Bengkulu	2022M9	591	1.526	3,95	580	10,41	0,11
Bengkulu	2022M10	600	1.538	3,95	591	10,50	0,11
Bengkulu	2022M11	610	1.510	3,76	600	10,63	0,11
Bengkulu	2022M12	608	1.446	3,60	610	10,71	0,11
Jambi	2018M7	651	1.107	6,11	649	8,14	0,14
Jambi	2018M8	658	1.114	6,17	651	7,63	0,14
Jambi	2018M9	659	1.132	6,31	658	7,50	0,14
Jambi	2018M10	659	1.152	5,59	659	12,43	0,14
Jambi	2018M11	584	1.152	5,93	659	7,54	0,14
Jambi	2018M12	596	1.231	5,53	584	7,72	0,14
Jambi	2019M1	592	1.232	5,74	596	7,69	0,14
Jambi	2019M2	599	1.230	5,40	592	7,82	0,14
Jambi	2019M3	602	1.229	5,52	599	7,67	0,14
Jambi	2019M4	603	1.212	5,84	602	7,94	0,14
Jambi	2019M5	619	1.252	5,66	603	13,09	0,14
Jambi	2019M6	603	1.255	5,61	619	7,67	0,14
Jambi	2019M7	594	1.311	7,00	603	7,76	0,14
Jambi	2019M8	597	1.331	6,87	594	7,82	0,14
Jambi	2019M9	601	1.350	7,54	597	7,73	0,14
Jambi	2019M10	599	1.354	7,67	601	7,75	0,13
Jambi	2019M11	636	1.365	6,86	599	12,97	0,13
Jambi	2019M12	622	1.402	6,55	636	7,91	0,13
Jambi	2020M1	604	1.410	6,77	622	8,15	0,13
Jambi	2020M2	606	1.420	6,58	604	12,76	0,12
Jambi	2020M3	590	1.425	6,78	606	13,01	0,12
Jambi	2020M4	579	1.429	7,21	590	12,50	0,11
Jambi	2020M5	580	1.447	7,08	579	7,52	0,11
Jambi	2020M6	594	1.476	7,11	580	12,43	0,11
Jambi	2020M7	591	1.468	7,05	594	7,19	0,11
Jambi	2020M8	588	1.492	6,90	591	12,27	0,11
Jambi	2020M9	586	1.529	6,72	588	7,16	0,10
Jambi	2020M10	589	1.540	5,96	586	12,06	0,10
Jambi	2020M11	589	1.589	5,88	589	12,11	0,08
Jambi	2020M12	583	1.617	5,90	589	12,22	0,08
Jambi	2021M1	685	1.622	4,71	583	11,77	0,08
Jambi	2021M2	693	1.626	4,50	685	11,67	0,08
Jambi	2021M3	691	1.633	4,38	693	11,62	0,08
Jambi	2021M4	690	1.648	4,17	691	11,63	0,08
Jambi	2021M5	691	1.692	4,20	690	11,91	0,08
Jambi	2021M6	694	1.705	4,26	691	6,68	0,07
Jambi	2021M7	697	1.736	4,29	694	6,78	0,08
Jambi	2021M8	731	1.744	4,30	697	6,81	0,07
Jambi	2021M9	754	1.773	3,82	731	8,10	0,08
Jambi	2021M10	774	1.791	3,25	754	8,02	0,08
Jambi	2021M11	785	1.818	3,35	774	7,85	0,08
Jambi	2021M12	858	1.902	2,91	785	7,83	0,08
Jambi	2022M1	872	1.853	3,14	858	6,59	0,07
Jambi	2022M2	778	1.828	3,28	872	10,78	0,07
Jambi	2022M3	789	1.857	3,49	778	10,74	0,07
Jambi	2022M4	791	1.915	3,33	789	10,84	0,07
Jambi	2022M5	798	1.929	3,60	791	10,61	0,07
Jambi	2022M6	818	1.936	3,80	798	10,57	0,07
Jambi	2022M7	824	1.959	3,87	818	10,46	0,07
Jambi	2022M8	838	1.971	3,87	824	10,51	0,07
Jambi	2022M9	855	1.978	3,97	838	10,41	0,07
Jambi	2022M10	880	1.992	3,72	855	10,50	0,07
Jambi	2022M11	902	2.028	3,74	880	10,63	0,07

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Jambi	2022M12	934	2.152	3,44	902	10,71	0,07
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M7	1.569	21.916	13,11	1.577	8,14	0,75
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M8	1.597	20.649	12,72	1.569	7,63	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M9	1.637	23.717	12,47	1.597	7,50	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M10	1.465	22.885	13,74	1.637	12,43	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M11	1.464	22.586	13,58	1.465	7,54	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2018M12	1.532	20.452	9,08	1.464	7,72	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M1	1.389	20.388	10,20	1.532	7,69	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M2	1.297	21.220	11,71	1.389	7,82	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M3	1.168	21.712	12,64	1.297	7,67	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M4	1.187	21.881	13,37	1.168	7,94	0,75
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M5	1.221	20.354	13,04	1.187	13,09	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M6	1.248	25.435	11,83	1.221	7,67	0,77
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M7	1.354	23.663	10,74	1.248	7,76	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M8	1.558	22.243	9,39	1.354	7,82	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M9	1.786	21.781	8,12	1.558	7,73	0,75
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M10	1.872	25.350	7,60	1.786	7,75	0,77
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M11	1.983	24.947	7,49	1.872	12,97	0,77
Nanggroe Aceh Darussalam	2019M12	2.229	24.206	2,95	1.983	7,91	0,75
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M1	2.132	22.685	3,61	2.229	8,15	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M2	3.080	23.345	2,75	2.132	12,76	0,74
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M3	3.153	24.778	3,42	3.080	13,01	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M4	3.844	24.285	3,44	3.153	12,50	0,75
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M5	3.840	24.343	3,73	3.844	7,52	0,76
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M6	6.958	28.929	2,26	3.840	12,43	0,79
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M7	7.659	30.178	2,00	6.958	7,19	0,81
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M8	7.750	34.751	2,34	7.659	12,27	0,84
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M9	7.954	35.629	2,51	7.750	7,16	0,83
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M10	7.970	36.359	2,92	7.954	12,06	0,83
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M11	7.933	35.752	3,56	7.970	12,11	0,83
Nanggroe Aceh Darussalam	2020M12	7.904	35.547	3,43	7.933	12,22	0,82
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M1	7.746	34.338	3,64	7.904	11,77	0,81
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M2	7.891	35.024	4,97	7.746	11,67	0,82
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M3	8.005	34.999	4,04	7.891	11,62	0,82
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M4	8.090	37.379	4,37	8.005	11,63	0,83
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M5	8.048	36.691	4,95	8.090	11,91	0,82
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M6	7.986	36.800	5,39	8.048	6,68	0,81
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M7	7.777	36.504	6,53	7.986	6,78	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M8	8.114	35.726	7,34	7.777	6,81	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M9	8.340	35.534	6,98	8.114	8,10	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M10	8.216	39.164	6,30	8.340	8,02	0,82
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M11	8.123	38.178	5,71	8.216	7,85	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2021M12	8.217	38.159	5,26	8.123	7,83	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M1	8.490	36.521	4,99	8.217	6,59	0,78
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M2	8.527	36.867	5,01	8.490	10,78	0,78
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M3	8.695	36.952	5,16	8.527	10,74	0,79
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M4	8.770	39.285	5,28	8.695	10,84	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M5	8.774	39.168	5,03	8.770	10,61	0,79
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M6	8.962	39.776	4,72	8.774	10,57	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M7	8.920	39.554	4,47	8.962	10,46	0,79
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M8	9.049	38.451	4,57	8.920	10,51	0,78
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M9	9.060	38.305	4,32	9.049	10,41	0,78
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M10	9.111	41.276	4,07	9.060	10,50	0,80
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M11	8.945	39.895	4,22	9.111	10,63	0,79
Nanggroe Aceh Darussalam	2022M12	8.857	38.432	3,80	8.945	10,71	0,77
Sumatera Utara	2018M7	1.619	5.969	9,96	1.634	8,14	0,10
Sumatera Utara	2018M8	1.641	6.014	13,27	1.619	7,63	0,10
Sumatera Utara	2018M9	1.637	6.056	12,46	1.641	7,50	0,10
Sumatera Utara	2018M10	1.598	6.168	10,85	1.637	12,43	0,10
Sumatera Utara	2018M11	1.727	6.164	10,03	1.598	7,54	0,11
Sumatera Utara	2018M12	1.700	6.361	9,57	1.727	7,72	0,10
Sumatera Utara	2019M1	1.718	6.337	9,27	1.700	7,69	0,10
Sumatera Utara	2019M2	1.656	6.447	7,20	1.718	7,82	0,10
Sumatera Utara	2019M3	1.660	6.502	7,29	1.656	7,67	0,10
Sumatera Utara	2019M4	1.671	6.468	11,17	1.660	7,94	0,11
Sumatera Utara	2019M5	1.703	6.551	11,45	1.671	13,09	0,11
Sumatera Utara	2019M6	1.676	6.887	10,30	1.703	7,67	0,10
Sumatera Utara	2019M7	1.655	6.787	10,50	1.676	7,76	0,10
Sumatera Utara	2019M8	1.651	6.876	10,37	1.655	7,82	0,10
Sumatera Utara	2019M9	1.690	6.898	10,64	1.651	7,73	0,10
Sumatera Utara	2019M10	1.709	6.992	10,33	1.690	7,75	0,10
Sumatera Utara	2019M11	1.748	7.182	9,37	1.709	12,97	0,10
Sumatera Utara	2019M12	1.756	7.507	8,83	1.748	7,91	0,10
Sumatera Utara	2020M1	1.727	7.413	9,46	1.756	8,15	0,10
Sumatera Utara	2020M2	1.941	7.521	7,95	1.727	12,76	0,10
Sumatera Utara	2020M3	1.922	7.568	8,15	1.941	13,01	0,10
Sumatera Utara	2020M4	1.898	7.547	8,51	1.922	12,50	0,09
Sumatera Utara	2020M5	1.868	7.550	10,42	1.898	7,52	0,09
Sumatera Utara	2020M6	1.702	7.654	8,48	1.868	12,43	0,08
Sumatera Utara	2020M7	1.675	7.881	8,47	1.702	7,19	0,08
Sumatera Utara	2020M8	1.633	8.088	8,82	1.675	12,27	0,09
Sumatera Utara	2020M9	1.648	8.244	12,41	1.633	7,16	0,08
Sumatera Utara	2020M10	1.669	8.118	12,20	1.648	12,06	0,08
Sumatera Utara	2020M11	1.672	8.194	12,26	1.669	12,11	0,06
Sumatera Utara	2020M12	1.702	8.352	11,87	1.672	12,22	0,06
Sumatera Utara	2021M1	1.760	8.160	17,63	1.702	11,77	0,06
Sumatera Utara	2021M2	1.684	8.119	12,39	1.760	11,67	0,06
Sumatera Utara	2021M3	1.691	8.267	18,14	1.684	11,62	0,06

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sumatera Utara	2021M4	1.689	8.383	17,80	1.691	11,63	0,06
Sumatera Utara	2021M5	1.702	8.735	17,50	1.689	11,91	0,06
Sumatera Utara	2021M6	1.707	8.843	16,59	1.702	6,68	0,06
Sumatera Utara	2021M7	1.896	8.880	14,60	1.707	6,78	0,06
Sumatera Utara	2021M8	1.862	9.286	14,78	1.896	6,81	0,06
Sumatera Utara	2021M9	1.808	9.320	10,79	1.862	8,10	0,06
Sumatera Utara	2021M10	1.760	9.300	11,00	1.808	8,02	0,06
Sumatera Utara	2021M11	1.757	9.443	10,88	1.760	7,85	0,06
Sumatera Utara	2021M12	1.771	10.083	10,43	1.757	7,83	0,06
Sumatera Utara	2022M1	1.772	10.007	8,62	1.771	6,59	0,06
Sumatera Utara	2022M2	1.965	9.937	9,55	1.772	10,78	0,06
Sumatera Utara	2022M3	2.047	10.260	8,97	1.965	10,74	0,07
Sumatera Utara	2022M4	2.088	10.277	4,62	2.047	10,84	0,06
Sumatera Utara	2022M5	2.107	10.254	4,61	2.088	10,61	0,06
Sumatera Utara	2022M6	2.155	10.473	4,56	2.107	10,57	0,06
Sumatera Utara	2022M7	2.185	10.660	4,55	2.155	10,46	0,06
Sumatera Utara	2022M8	2.216	10.286	3,79	2.185	10,51	0,06
Sumatera Utara	2022M9	2.203	10.159	3,71	2.216	10,41	0,06
Sumatera Utara	2022M10	2.271	10.262	3,56	2.203	10,50	0,06
Sumatera Utara	2022M11	2.338	10.474	3,88	2.271	10,63	0,07
Sumatera Utara	2022M12	2.301	10.972	3,78	2.338	10,71	0,06
Sumatera Barat	2018M7	949	2.804	8,60	952	8,14	0,15
Sumatera Barat	2018M8	937	2.787	8,15	949	7,63	0,15
Sumatera Barat	2018M9	906	2.780	8,88	937	7,50	0,15
Sumatera Barat	2018M10	905	2.757	8,88	906	12,43	0,15
Sumatera Barat	2018M11	900	2.757	9,61	905	7,54	0,15
Sumatera Barat	2018M12	902	2.870	7,67	900	7,72	0,15
Sumatera Barat	2019M1	891	2.905	8,34	902	7,69	0,14
Sumatera Barat	2019M2	882	2.930	9,30	891	7,82	0,14
Sumatera Barat	2019M3	882	2.900	8,59	882	7,67	0,14
Sumatera Barat	2019M4	896	2.959	8,38	882	7,94	0,15
Sumatera Barat	2019M5	910	2.993	8,52	896	13,09	0,15
Sumatera Barat	2019M6	901	3.101	9,10	910	7,67	0,14
Sumatera Barat	2019M7	888	3.189	8,82	901	7,76	0,14
Sumatera Barat	2019M8	885	3.216	8,34	888	7,82	0,14
Sumatera Barat	2019M9	866	3.211	8,42	885	7,73	0,14
Sumatera Barat	2019M10	853	3.223	8,35	866	7,75	0,14
Sumatera Barat	2019M11	862	3.279	8,12	853	12,97	0,14
Sumatera Barat	2019M12	882	3.403	7,87	862	7,91	0,14
Sumatera Barat	2020M1	866	3.442	7,96	882	8,15	0,14
Sumatera Barat	2020M2	862	3.428	7,25	866	12,76	0,13
Sumatera Barat	2020M3	836	3.405	6,37	862	13,01	0,13
Sumatera Barat	2020M4	825	3.355	6,34	836	12,50	0,13
Sumatera Barat	2020M5	808	3.405	6,80	825	7,52	0,12
Sumatera Barat	2020M6	832	3.461	7,00	808	12,43	0,12
Sumatera Barat	2020M7	828	3.463	7,32	832	7,19	0,12
Sumatera Barat	2020M8	822	3.531	6,66	828	12,27	0,12
Sumatera Barat	2020M9	833	3.570	6,90	822	7,16	0,11
Sumatera Barat	2020M10	818	3.555	6,34	833	12,06	0,10
Sumatera Barat	2020M11	823	3.607	6,27	818	12,11	0,09
Sumatera Barat	2020M12	815	3.675	5,38	823	12,22	0,09
Sumatera Barat	2021M1	835	3.668	5,23	815	11,77	0,08
Sumatera Barat	2021M2	840	3.642	4,95	835	11,67	0,08
Sumatera Barat	2021M3	831	3.602	4,65	840	11,62	0,08
Sumatera Barat	2021M4	811	3.638	4,21	831	11,63	0,08
Sumatera Barat	2021M5	808	3.692	4,04	811	11,91	0,08
Sumatera Barat	2021M6	807	3.723	4,48	808	6,68	0,08
Sumatera Barat	2021M7	802	3.766	3,94	807	6,78	0,08
Sumatera Barat	2021M8	860	3.821	3,56	802	6,81	0,08
Sumatera Barat	2021M9	874	3.832	3,60	860	8,10	0,08
Sumatera Barat	2021M10	847	3.934	3,92	874	8,02	0,08
Sumatera Barat	2021M11	849	3.952	4,01	847	7,85	0,08
Sumatera Barat	2021M12	861	4.174	3,87	849	7,83	0,08
Sumatera Barat	2022M1	870	4.119	3,91	861	6,59	0,08
Sumatera Barat	2022M2	873	4.115	3,69	870	10,78	0,08
Sumatera Barat	2022M3	905	4.159	4,02	873	10,74	0,08
Sumatera Barat	2022M4	916	4.146	3,62	905	10,84	0,08
Sumatera Barat	2022M5	928	4.150	3,43	916	10,61	0,08
Sumatera Barat	2022M6	947	4.194	3,40	928	10,57	0,08
Sumatera Barat	2022M7	959	4.325	2,90	947	10,46	0,08
Sumatera Barat	2022M8	971	4.306	2,47	959	10,51	0,08
Sumatera Barat	2022M9	989	4.279	2,68	971	10,41	0,08
Sumatera Barat	2022M10	1.006	4.250	3,02	989	10,50	0,08
Sumatera Barat	2022M11	1.033	4.304	2,81	1.006	10,63	0,09
Sumatera Barat	2022M12	1.022	4.408	2,69	1.033	10,71	0,09
Riau	2018M7	993	3.558	5,34	973	8,14	0,12
Riau	2018M8	984	3.575	5,40	993	7,63	0,12
Riau	2018M9	988	3.605	5,55	984	7,50	0,12
Riau	2018M10	960	3.727	4,99	988	12,43	0,12
Riau	2018M11	941	3.725	5,26	960	7,54	0,12
Riau	2018M12	963	3.809	4,96	941	7,72	0,12
Riau	2019M1	976	3.904	5,19	963	7,69	0,12
Riau	2019M2	971	3.944	5,69	976	7,82	0,12
Riau	2019M3	961	3.971	5,55	971	7,67	0,12
Riau	2019M4	957	3.960	5,85	961	7,94	0,12
Riau	2019M5	991	4.045	5,21	957	13,09	0,12
Riau	2019M6	984	4.043	4,36	991	7,67	0,12
Riau	2019M7	962	4.156	4,26	984	7,76	0,12

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Riau	2019M8	974	4.277	4,22	962	7,82	0,12
Riau	2019M9	1.012	4.316	4,23	974	7,73	0,12
Riau	2019M10	1.109	4.391	3,74	1.012	7,75	0,12
Riau	2019M11	1.100	4.449	3,60	1.109	12,97	0,11
Riau	2019M12	1.236	4.621	3,11	1.100	7,91	0,11
Riau	2020M1	1.152	4.606	3,58	1.236	8,15	0,12
Riau	2020M2	1.190	4.694	4,56	1.152	12,76	0,12
Riau	2020M3	1.162	4.596	4,15	1.190	13,01	0,12
Riau	2020M4	1.154	4.528	4,10	1.162	12,50	0,11
Riau	2020M5	1.119	4.567	4,17	1.154	7,52	0,11
Riau	2020M6	1.227	4.751	4,42	1.119	12,43	0,11
Riau	2020M7	1.075	4.735	5,11	1.227	7,19	0,11
Riau	2020M8	1.066	4.881	4,81	1.075	12,27	0,11
Riau	2020M9	1.065	5.107	5,19	1.066	7,16	0,10
Riau	2020M10	1.058	5.114	5,16	1.065	12,06	0,10
Riau	2020M11	1.051	5.248	5,41	1.058	12,11	0,08
Riau	2020M12	1.023	5.340	4,61	1.051	12,22	0,08
Riau	2021M1	1.013	5.342	4,88	1.023	11,77	0,07
Riau	2021M2	1.013	5.262	4,78	1.013	11,67	0,07
Riau	2021M3	1.022	5.431	4,22	1.013	11,62	0,07
Riau	2021M4	1.029	5.445	4,01	1.022	11,63	0,07
Riau	2021M5	1.021	5.553	4,02	1.029	11,91	0,07
Riau	2021M6	953	5.177	3,33	1.021	6,68	0,07
Riau	2021M7	944	5.329	3,31	953	6,78	0,07
Riau	2021M8	965	5.652	2,89	944	6,81	0,07
Riau	2021M9	966	5.682	2,46	965	8,10	0,07
Riau	2021M10	1.033	5.764	2,24	966	8,02	0,07
Riau	2021M11	1.112	6.545	3,22	1.033	7,85	0,07
Riau	2021M12	1.236	6.815	2,74	1.112	7,83	0,07
Riau	2022M1	1.245	6.885	2,76	1.236	6,59	0,07
Riau	2022M2	1.098	6.784	3,02	1.245	10,78	0,07
Riau	2022M3	1.114	7.136	3,24	1.098	10,74	0,07
Riau	2022M4	1.166	6.879	3,40	1.114	10,84	0,07
Riau	2022M5	1.167	6.975	3,53	1.166	10,61	0,07
Riau	2022M6	1.234	6.974	3,50	1.167	10,57	0,07
Riau	2022M7	1.211	6.992	3,08	1.234	10,46	0,07
Riau	2022M8	3.419	19.981	8,52	1.211	10,51	0,24
Riau	2022M9	3.438	21.732	8,43	3.419	10,41	0,25
Riau	2022M10	3.554	23.665	8,24	3.438	10,50	0,26
Riau	2022M11	3.672	21.550	8,80	3.554	10,63	0,25
Riau	2022M12	3.696	19.546	8,63	3.672	10,71	0,24
Sumatera Selatan	2018M7	1.129	3.122	6,10	1.138	8,14	0,11
Sumatera Selatan	2018M8	1.110	3.199	5,57	1.129	7,63	0,11
Sumatera Selatan	2018M9	1.115	3.178	5,67	1.110	7,50	0,11
Sumatera Selatan	2018M10	1.125	3.103	5,15	1.115	12,43	0,11
Sumatera Selatan	2018M11	1.116	3.233	5,11	1.125	7,54	0,11
Sumatera Selatan	2018M12	1.110	3.347	4,60	1.116	7,72	0,12
Sumatera Selatan	2019M1	1.129	3.311	4,83	1.110	7,69	0,11
Sumatera Selatan	2019M2	1.124	3.320	5,00	1.129	7,82	0,11
Sumatera Selatan	2019M3	1.172	3.474	4,75	1.124	7,67	0,12
Sumatera Selatan	2019M4	1.196	3.489	5,03	1.172	7,94	0,12
Sumatera Selatan	2019M5	1.271	3.690	5,37	1.196	13,09	0,12
Sumatera Selatan	2019M6	1.272	3.867	4,86	1.271	7,67	0,12
Sumatera Selatan	2019M7	1.265	3.873	4,86	1.272	7,76	0,11
Sumatera Selatan	2019M8	1.280	3.906	4,75	1.265	7,82	0,11
Sumatera Selatan	2019M9	1.268	3.938	4,75	1.280	7,73	0,11
Sumatera Selatan	2019M10	1.271	3.800	5,03	1.268	7,75	0,11
Sumatera Selatan	2019M11	1.278	3.707	4,22	1.271	12,97	0,11
Sumatera Selatan	2019M12	1.337	3.757	3,94	1.278	7,91	0,11
Sumatera Selatan	2020M1	1.296	3.806	4,30	1.337	8,15	0,11
Sumatera Selatan	2020M2	1.324	3.802	4,28	1.296	12,76	0,11
Sumatera Selatan	2020M3	1.318	3.812	4,40	1.324	13,01	0,11
Sumatera Selatan	2020M4	1.297	3.845	4,78	1.318	12,50	0,10
Sumatera Selatan	2020M5	1.276	3.886	5,09	1.297	7,52	0,10
Sumatera Selatan	2020M6	1.274	4.020	11,06	1.276	12,43	0,09
Sumatera Selatan	2020M7	1.269	4.472	10,96	1.274	7,19	0,09
Sumatera Selatan	2020M8	1.264	4.478	10,81	1.269	12,27	0,09
Sumatera Selatan	2020M9	1.334	5.380	9,42	1.264	7,16	0,09
Sumatera Selatan	2020M10	1.366	5.007	9,08	1.334	12,06	0,09
Sumatera Selatan	2020M11	1.381	4.979	9,43	1.366	12,11	0,07
Sumatera Selatan	2020M12	1.450	5.094	9,08	1.381	12,22	0,07
Sumatera Selatan	2021M1	1.467	4.862	8,89	1.450	11,77	0,07
Sumatera Selatan	2021M2	1.594	4.609	8,22	1.467	11,67	0,07
Sumatera Selatan	2021M3	1.641	4.493	7,90	1.594	11,62	0,07
Sumatera Selatan	2021M4	1.624	4.505	9,85	1.641	11,63	0,07
Sumatera Selatan	2021M5	1.628	4.441	9,75	1.624	11,91	0,07
Sumatera Selatan	2021M6	1.604	4.381	9,60	1.628	6,68	0,07
Sumatera Selatan	2021M7	1.606	4.593	10,28	1.604	6,78	0,07
Sumatera Selatan	2021M8	1.649	4.448	9,98	1.606	6,81	0,07
Sumatera Selatan	2021M9	1.565	4.435	4,52	1.649	8,10	0,07
Sumatera Selatan	2021M10	1.655	4.561	4,88	1.565	8,02	0,07
Sumatera Selatan	2021M11	1.666	4.652	3,75	1.655	7,85	0,07
Sumatera Selatan	2021M12	1.651	4.738	3,83	1.666	7,83	0,07
Sumatera Selatan	2022M1	1.668	4.666	4,02	1.651	6,59	0,07
Sumatera Selatan	2022M2	1.781	4.678	3,70	1.668	10,78	0,07
Sumatera Selatan	2022M3	1.797	4.884	3,59	1.781	10,74	0,07
Sumatera Selatan	2022M4	1.803	4.956	3,58	1.797	10,84	0,07
Sumatera Selatan	2022M5	1.817	5.387	3,58	1.803	10,61	0,07

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sumatera Selatan	2022M6	1.849	4.723	3,59	1.817	10,57	0,07
Sumatera Selatan	2022M7	1.884	4.818	3,50	1.849	10,46	0,07
Sumatera Selatan	2022M8	1.893	4.806	2,89	1.884	10,51	0,07
Sumatera Selatan	2022M9	1.964	5.131	1,92	1.893	10,41	0,07
Sumatera Selatan	2022M10	1.909	5.668	1,60	1.964	10,50	0,07
Sumatera Selatan	2022M11	1.955	5.932	1,47	1.909	10,63	0,07
Sumatera Selatan	2022M12	1.965	6.437	1,41	1.955	10,71	0,07
Bangka Belitung	2018M7	152	496	1,36	103	8,14	0,10
Bangka Belitung	2018M8	152	509	1,74	152	7,63	0,10
Bangka Belitung	2018M9	160	479	1,64	152	7,50	0,10
Bangka Belitung	2018M10	159	516	1,58	160	12,43	0,10
Bangka Belitung	2018M11	160	519	2,00	159	7,54	0,10
Bangka Belitung	2018M12	160	501	1,64	160	7,72	0,10
Bangka Belitung	2019M1	156	493	1,49	160	7,69	0,10
Bangka Belitung	2019M2	156	532	1,51	156	7,82	0,10
Bangka Belitung	2019M3	160	524	1,34	156	7,67	0,10
Bangka Belitung	2019M4	157	515	1,90	160	7,94	0,10
Bangka Belitung	2019M5	156	522	2,37	157	13,09	0,12
Bangka Belitung	2019M6	244	641	0,66	156	7,67	0,12
Bangka Belitung	2019M7	241	538	0,66	244	7,76	0,12
Bangka Belitung	2019M8	239	660	0,73	241	7,82	0,12
Bangka Belitung	2019M9	236	659	0,53	239	7,73	0,12
Bangka Belitung	2019M10	238	683	0,89	236	7,75	0,12
Bangka Belitung	2019M11	236	730	0,89	238	12,97	0,10
Bangka Belitung	2019M12	245	710	0,63	236	7,91	0,09
Bangka Belitung	2020M1	243	685	0,59	245	8,15	0,09
Bangka Belitung	2020M2	237	662	0,28	243	12,76	0,09
Bangka Belitung	2020M3	248	669	0,27	237	13,01	0,09
Bangka Belitung	2020M4	238	737	0,56	248	12,50	0,09
Bangka Belitung	2020M5	312	831	0,27	238	7,52	0,09
Bangka Belitung	2020M6	306	793	0,60	312	12,43	0,08
Bangka Belitung	2020M7	304	896	0,66	306	7,19	0,09
Bangka Belitung	2020M8	301	719	0,61	304	12,27	0,08
Bangka Belitung	2020M9	320	770	0,61	301	7,16	0,08
Bangka Belitung	2020M10	319	728	0,55	320	12,06	0,07
Bangka Belitung	2020M11	317	716	0,45	319	12,11	0,06
Bangka Belitung	2020M12	318	797	0,50	317	12,22	0,06
Bangka Belitung	2021M1	314	869	0,51	318	11,77	0,06
Bangka Belitung	2021M2	312	841	0,50	314	11,67	0,06
Bangka Belitung	2021M3	311	903	0,46	312	11,62	0,06
Bangka Belitung	2021M4	309	907	0,53	311	11,63	0,06
Bangka Belitung	2021M5	307	948	0,53	309	11,91	0,06
Bangka Belitung	2021M6	325	1.006	0,61	307	6,68	0,06
Bangka Belitung	2021M7	332	981	0,54	325	6,78	0,06
Bangka Belitung	2021M8	335	1.000	0,64	332	6,81	0,06
Bangka Belitung	2021M9	344	1.026	0,47	335	8,10	0,06
Bangka Belitung	2021M10	343	1.080	0,73	344	8,02	0,06
Bangka Belitung	2021M11	317	983	0,43	343	7,85	0,06
Bangka Belitung	2021M12	320	1.035	0,42	317	7,83	0,06
Bangka Belitung	2022M1	319	1.073	0,42	320	6,59	0,06
Bangka Belitung	2022M2	320	1.163	0,46	319	10,78	0,06
Bangka Belitung	2022M3	360	1.373	0,44	320	10,74	0,07
Bangka Belitung	2022M4	376	1.272	0,42	360	10,84	0,07
Bangka Belitung	2022M5	375	1.149	0,45	376	10,61	0,06
Bangka Belitung	2022M6	374	1.234	0,49	375	10,57	0,07
Bangka Belitung	2022M7	376	1.243	0,55	374	10,46	0,07
Bangka Belitung	2022M8	375	1.191	0,57	376	10,51	0,06
Bangka Belitung	2022M9	374	1.215	0,56	375	10,41	0,07
Bangka Belitung	2022M10	372	1.215	0,57	374	10,50	0,07
Bangka Belitung	2022M11	370	1.203	0,40	372	10,63	0,07
Bangka Belitung	2022M12	371	1.206	0,40	370	10,71	0,06
Kepulauan Riau	2018M7	259	1.308	4,26	272	8,14	0,19
Kepulauan Riau	2018M8	250	1.203	4,24	259	7,63	0,19
Kepulauan Riau	2018M9	253	1.268	4,39	250	7,50	0,19
Kepulauan Riau	2018M10	249	1.273	4,11	253	12,43	0,19
Kepulauan Riau	2018M11	251	1.366	5,82	249	7,54	0,19
Kepulauan Riau	2018M12	237	1.347	5,82	251	7,72	0,18
Kepulauan Riau	2019M1	235	1.328	6,36	237	7,69	0,18
Kepulauan Riau	2019M2	232	1.391	5,91	235	7,82	0,18
Kepulauan Riau	2019M3	253	1.395	5,31	232	7,67	0,18
Kepulauan Riau	2019M4	254	1.409	5,73	253	7,94	0,18
Kepulauan Riau	2019M5	248	1.503	3,74	254	13,09	0,18
Kepulauan Riau	2019M6	244	1.529	3,81	248	7,67	0,18
Kepulauan Riau	2019M7	241	1.531	3,67	244	7,76	0,18
Kepulauan Riau	2019M8	235	1.507	3,99	241	7,82	0,18
Kepulauan Riau	2019M9	229	1.488	4,09	235	7,73	0,17
Kepulauan Riau	2019M10	225	1.497	4,19	229	7,75	0,17
Kepulauan Riau	2019M11	228	1.555	4,42	225	12,97	0,17
Kepulauan Riau	2019M12	220	1.680	6,68	228	7,91	0,17
Kepulauan Riau	2020M1	206	1.647	6,78	220	8,15	0,18
Kepulauan Riau	2020M2	199	1.696	6,33	206	12,76	0,18
Kepulauan Riau	2020M3	194	1.702	6,55	199	13,01	0,18
Kepulauan Riau	2020M4	205	1.717	5,98	194	12,50	0,16
Kepulauan Riau	2020M5	196	1.767	6,11	205	7,52	0,16
Kepulauan Riau	2020M6	226	1.763	5,46	196	12,43	0,15
Kepulauan Riau	2020M7	217	1.772	7,95	226	7,19	0,15
Kepulauan Riau	2020M8	209	1.760	8,23	217	12,27	0,15
Kepulauan Riau	2020M9	207	1.799	9,59	209	7,16	0,14

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Kepulauan Riau	2020M10	211	1.841	8,50	207	12,06	0,13
Kepulauan Riau	2020M11	208	1.882	8,33	211	12,11	0,11
Kepulauan Riau	2020M12	209	1.919	9,03	208	12,22	0,11
Kepulauan Riau	2021M1	205	1.906	9,68	209	11,77	0,10
Kepulauan Riau	2021M2	203	1.890	8,28	205	11,67	0,09
Kepulauan Riau	2021M3	202	1.881	8,35	203	11,62	0,09
Kepulauan Riau	2021M4	202	1.917	8,41	202	11,63	0,09
Kepulauan Riau	2021M5	197	1.956	5,96	202	11,91	0,09
Kepulauan Riau	2021M6	250	1.967	4,87	197	6,68	0,09
Kepulauan Riau	2021M7	249	1.969	5,44	250	6,78	0,09
Kepulauan Riau	2021M8	269	1.927	4,25	249	6,81	0,09
Kepulauan Riau	2021M9	271	1.947	2,30	269	8,10	0,09
Kepulauan Riau	2021M10	297	1.979	2,11	271	8,02	0,09
Kepulauan Riau	2021M11	302	1.862	2,17	297	7,85	0,09
Kepulauan Riau	2021M12	311	1.928	2,22	302	7,83	0,09
Kepulauan Riau	2022M1	313	1.933	1,94	311	6,59	0,09
Kepulauan Riau	2022M2	310	1.926	2,16	313	10,78	0,09
Kepulauan Riau	2022M3	317	1.906	2,00	310	10,74	0,10
Kepulauan Riau	2022M4	326	1.973	2,26	317	10,84	0,10
Kepulauan Riau	2022M5	324	1.961	2,26	326	10,61	0,10
Kepulauan Riau	2022M6	332	1.937	2,82	324	10,57	0,10
Kepulauan Riau	2022M7	341	1.967	5,61	332	10,46	0,10
Kepulauan Riau	2022M8	828	10.424	12,34	341	10,51	0,35
Kepulauan Riau	2022M9	831	8.723	12,29	828	10,41	0,32
Kepulauan Riau	2022M10	833	9.050	12,18	831	10,50	0,33
Kepulauan Riau	2022M11	760	8.446	6,98	833	10,63	0,32
Kepulauan Riau	2022M12	769	8.222	7,21	760	10,71	0,32
Lampung	2018M7	1.194	2.302	5,89	1.201	8,14	0,10
Lampung	2018M8	1.176	2.325	6,16	1.194	7,63	0,10
Lampung	2018M9	1.157	2.364	6,42	1.176	7,50	0,10
Lampung	2018M10	1.088	1.907	6,49	1.157	12,43	0,10
Lampung	2018M11	1.153	2.382	6,14	1.088	7,54	0,10
Lampung	2018M12	1.133	2.488	6,06	1.153	7,72	0,10
Lampung	2019M1	1.142	2.573	5,25	1.133	7,69	0,10
Lampung	2019M2	1.136	2.587	5,05	1.142	7,82	0,10
Lampung	2019M3	1.138	2.541	5,05	1.136	7,67	0,10
Lampung	2019M4	1.156	2.551	5,84	1.138	7,94	0,10
Lampung	2019M5	1.199	2.584	6,50	1.156	13,09	0,10
Lampung	2019M6	1.193	2.664	5,11	1.199	7,67	0,09
Lampung	2019M7	1.180	2.758	4,49	1.193	7,76	0,09
Lampung	2019M8	1.204	2.783	4,31	1.180	7,82	0,09
Lampung	2019M9	1.244	2.765	4,21	1.204	7,73	0,09
Lampung	2019M10	1.235	2.754	3,90	1.244	7,75	0,10
Lampung	2019M11	1.249	2.798	3,87	1.235	12,97	0,09
Lampung	2019M12	1.260	2.883	4,19	1.249	7,91	0,09
Lampung	2020M1	1.209	2.886	4,14	1.260	8,15	0,09
Lampung	2020M2	1.303	2.978	3,92	1.209	12,76	0,08
Lampung	2020M3	1.304	2.907	4,46	1.303	13,01	0,08
Lampung	2020M4	1.268	2.860	4,76	1.304	12,50	0,08
Lampung	2020M5	1.238	2.913	3,74	1.268	7,52	0,08
Lampung	2020M6	1.126	2.924	4,57	1.238	12,43	0,07
Lampung	2020M7	1.105	2.932	4,56	1.126	7,19	0,07
Lampung	2020M8	1.099	2.942	4,32	1.105	12,27	0,07
Lampung	2020M9	1.095	3.031	4,05	1.099	7,16	0,07
Lampung	2020M10	1.111	3.085	3,80	1.095	12,06	0,07
Lampung	2020M11	1.108	3.212	3,96	1.111	12,11	0,06
Lampung	2020M12	1.108	3.257	3,88	1.108	12,22	0,05
Lampung	2021M1	1.132	3.208	3,80	1.108	11,77	0,05
Lampung	2021M2	1.132	3.159	3,87	1.132	11,67	0,05
Lampung	2021M3	1.146	3.246	3,88	1.132	11,62	0,05
Lampung	2021M4	1.152	3.193	3,98	1.146	11,63	0,05
Lampung	2021M5	1.145	3.191	3,34	1.152	11,91	0,05
Lampung	2021M6	1.154	3.245	3,70	1.145	6,68	0,05
Lampung	2021M7	1.170	3.306	3,71	1.154	6,78	0,05
Lampung	2021M8	1.212	3.340	3,14	1.170	6,81	0,05
Lampung	2021M9	1.237	3.354	2,69	1.212	8,10	0,05
Lampung	2021M10	1.248	3.330	2,64	1.237	8,02	0,05
Lampung	2021M11	1.257	3.429	2,59	1.248	7,85	0,05
Lampung	2021M12	1.260	3.600	2,59	1.257	7,83	0,05
Lampung	2022M1	1.262	3.558	2,60	1.260	6,59	0,05
Lampung	2022M2	1.283	3.497	2,80	1.262	10,78	0,05
Lampung	2022M3	1.302	3.470	2,74	1.283	10,74	0,05
Lampung	2022M4	1.318	3.545	2,67	1.302	10,84	0,05
Lampung	2022M5	1.338	3.584	2,68	1.318	10,61	0,05
Lampung	2022M6	1.356	3.654	2,72	1.338	10,57	0,05
Lampung	2022M7	1.384	3.691	2,87	1.356	10,46	0,05
Lampung	2022M8	1.387	3.689	2,94	1.384	10,51	0,05
Lampung	2022M9	1.440	3.695	2,81	1.387	10,41	0,05
Lampung	2022M10	1.447	3.717	2,82	1.440	10,50	0,05
Lampung	2022M11	1.454	3.762	2,81	1.447	10,63	0,05
Lampung	2022M12	1.442	3.846	2,79	1.454	10,71	0,05
Kalimantan Selatan	2018M7	676	3.234	11,82	630	8,14	0,16
Kalimantan Selatan	2018M8	713	3.253	10,46	676	7,63	0,17
Kalimantan Selatan	2018M9	695	3.256	10,12	713	7,50	0,17
Kalimantan Selatan	2018M10	684	3.280	8,75	695	12,43	0,17
Kalimantan Selatan	2018M11	643	3.329	8,55	684	7,54	0,17
Kalimantan Selatan	2018M12	675	3.446	7,74	643	7,72	0,17
Kalimantan Selatan	2019M1	706	3.440	10,64	675	7,69	0,17

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Kalimantan Selatan	2019M2	701	3.661	10,98	706	7,82	0,17
Kalimantan Selatan	2019M3	721	3.742	10,79	701	7,67	0,18
Kalimantan Selatan	2019M4	723	3.658	11,71	721	7,94	0,17
Kalimantan Selatan	2019M5	747	3.741	11,91	723	13,09	0,17
Kalimantan Selatan	2019M6	731	3.759	11,94	747	7,67	0,16
Kalimantan Selatan	2019M7	696	3.846	10,39	731	7,76	0,16
Kalimantan Selatan	2019M8	810	4.044	8,67	696	7,82	0,17
Kalimantan Selatan	2019M9	827	4.226	8,85	810	7,73	0,17
Kalimantan Selatan	2019M10	797	3.653	8,93	827	7,75	0,16
Kalimantan Selatan	2019M11	775	3.479	7,18	797	12,97	0,15
Kalimantan Selatan	2019M12	785	3.801	6,29	775	7,91	0,15
Kalimantan Selatan	2020M1	785	3.565	6,32	785	8,15	0,15
Kalimantan Selatan	2020M2	966	3.750	5,40	785	12,76	0,15
Kalimantan Selatan	2020M3	952	3.627	5,62	966	13,01	0,15
Kalimantan Selatan	2020M4	950	3.601	5,61	952	12,50	0,14
Kalimantan Selatan	2020M5	935	3.686	6,00	950	7,52	0,13
Kalimantan Selatan	2020M6	680	3.741	4,72	935	12,43	0,12
Kalimantan Selatan	2020M7	680	3.622	4,59	680	7,19	0,12
Kalimantan Selatan	2020M8	669	3.654	7,31	680	12,27	0,12
Kalimantan Selatan	2020M9	674	3.744	6,85	669	7,16	0,12
Kalimantan Selatan	2020M10	670	3.790	6,94	674	12,06	0,11
Kalimantan Selatan	2020M11	666	3.825	6,69	670	12,11	0,10
Kalimantan Selatan	2020M12	666	3.783	6,04	666	12,22	0,09
Kalimantan Selatan	2021M1	651	4.004	7,48	666	11,77	0,09
Kalimantan Selatan	2021M2	649	3.980	8,39	651	11,67	0,09
Kalimantan Selatan	2021M3	642	4.006	7,53	649	11,62	0,09
Kalimantan Selatan	2021M4	637	4.056	8,60	642	11,63	0,09
Kalimantan Selatan	2021M5	632	4.070	8,63	637	11,91	0,09
Kalimantan Selatan	2021M6	686	4.159	7,80	632	6,68	0,09
Kalimantan Selatan	2021M7	682	4.156	6,44	686	6,78	0,09
Kalimantan Selatan	2021M8	849	4.206	5,53	682	6,81	0,09
Kalimantan Selatan	2021M9	848	4.246	6,02	849	8,10	0,09
Kalimantan Selatan	2021M10	881	4.250	5,19	848	8,02	0,09
Kalimantan Selatan	2021M11	860	4.261	4,58	881	7,85	0,09
Kalimantan Selatan	2021M12	943	4.419	4,31	860	7,83	0,09
Kalimantan Selatan	2022M1	935	4.401	4,27	943	6,59	0,08
Kalimantan Selatan	2022M2	1.078	4.376	4,24	935	10,78	0,09
Kalimantan Selatan	2022M3	1.071	4.415	4,33	1.078	10,74	0,09
Kalimantan Selatan	2022M4	1.189	4.517	4,24	1.071	10,84	0,09
Kalimantan Selatan	2022M5	1.179	4.622	4,19	1.189	10,61	0,09
Kalimantan Selatan	2022M6	1.174	4.688	4,39	1.179	10,57	0,09
Kalimantan Selatan	2022M7	1.174	4.683	4,69	1.174	10,46	0,09
Kalimantan Selatan	2022M8	1.194	4.649	3,92	1.174	10,51	0,08
Kalimantan Selatan	2022M9	1.216	4.807	3,99	1.194	10,41	0,09
Kalimantan Selatan	2022M10	1.204	4.768	4,14	1.216	10,50	0,09
Kalimantan Selatan	2022M11	1.136	4.808	4,17	1.204	10,63	0,09
Kalimantan Selatan	2022M12	1.187	5.169	3,49	1.136	10,71	0,09
Kalimantan Barat	2018M7	1.695	1.803	1,91	1.680	8,14	0,13
Kalimantan Barat	2018M8	1.701	1.838	1,91	1.695	7,63	0,13
Kalimantan Barat	2018M9	1.752	1.883	1,70	1.701	7,50	0,13
Kalimantan Barat	2018M10	1.736	1.856	1,54	1.752	12,43	0,13
Kalimantan Barat	2018M11	1.737	1.887	1,52	1.736	7,54	0,13
Kalimantan Barat	2018M12	1.760	1.914	1,46	1.737	7,72	0,13
Kalimantan Barat	2019M1	1.760	1.914	1,59	1.760	7,69	0,12
Kalimantan Barat	2019M2	1.773	1.909	1,57	1.760	7,82	0,13
Kalimantan Barat	2019M3	1.780	1.912	1,52	1.773	7,67	0,13
Kalimantan Barat	2019M4	1.772	1.827	1,57	1.780	7,94	0,13
Kalimantan Barat	2019M5	1.778	1.843	1,56	1.772	13,09	0,13
Kalimantan Barat	2019M6	1.766	1.908	1,48	1.778	7,67	0,13
Kalimantan Barat	2019M7	1.745	1.944	1,52	1.766	7,76	0,12
Kalimantan Barat	2019M8	1.740	1.901	1,63	1.745	7,82	0,12
Kalimantan Barat	2019M9	1.808	2.065	1,59	1.740	7,73	0,13
Kalimantan Barat	2019M10	1.804	2.021	1,83	1.808	7,75	0,12
Kalimantan Barat	2019M11	1.811	1.971	1,60	1.804	12,97	0,12
Kalimantan Barat	2019M12	1.881	2.143	1,46	1.811	7,91	0,12
Kalimantan Barat	2020M1	1.866	2.066	1,55	1.881	8,15	0,11
Kalimantan Barat	2020M2	1.918	2.037	1,59	1.866	12,76	0,11
Kalimantan Barat	2020M3	1.913	2.151	1,68	1.918	13,01	0,11
Kalimantan Barat	2020M4	1.937	2.233	1,81	1.913	12,50	0,11
Kalimantan Barat	2020M5	1.924	2.169	1,82	1.937	7,52	0,10
Kalimantan Barat	2020M6	1.752	2.275	1,76	1.924	12,43	0,09
Kalimantan Barat	2020M7	1.764	2.296	1,77	1.752	7,19	0,09
Kalimantan Barat	2020M8	1.755	2.282	1,65	1.764	12,27	0,09
Kalimantan Barat	2020M9	1.737	2.387	1,34	1.755	7,16	0,09
Kalimantan Barat	2020M10	1.728	2.418	1,36	1.737	12,06	0,08
Kalimantan Barat	2020M11	1.722	2.434	1,46	1.728	12,11	0,08
Kalimantan Barat	2020M12	1.760	2.551	1,43	1.722	12,22	0,08
Kalimantan Barat	2021M1	1.817	2.697	1,45	1.760	11,77	0,07
Kalimantan Barat	2021M2	1.837	2.587	1,45	1.817	11,67	0,07
Kalimantan Barat	2021M3	1.825	2.593	1,73	1.837	11,62	0,07
Kalimantan Barat	2021M4	1.815	2.650	1,99	1.825	11,63	0,08
Kalimantan Barat	2021M5	1.759	2.542	1,94	1.815	11,91	0,07
Kalimantan Barat	2021M6	1.728	2.650	1,94	1.759	6,68	0,07
Kalimantan Barat	2021M7	1.723	2.644	1,98	1.728	6,78	0,08
Kalimantan Barat	2021M8	2.041	2.587	1,64	1.723	6,81	0,08
Kalimantan Barat	2021M9	2.025	2.637	1,37	2.041	8,10	0,08
Kalimantan Barat	2021M10	2.002	2.657	1,17	2.025	8,02	0,08
Kalimantan Barat	2021M11	2.093	2.640	1,16	2.002	7,85	0,08

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Kalimantan Barat	2021M12	2.299	2.805	1,12	2.093	7,83	0,09
Kalimantan Barat	2022M1	2.302	2.762	1,27	2.299	6,59	0,08
Kalimantan Barat	2022M2	2.224	2.706	1,40	2.302	10,78	0,08
Kalimantan Barat	2022M3	2.252	2.786	1,50	2.224	10,74	0,08
Kalimantan Barat	2022M4	2.291	2.846	1,24	2.252	10,84	0,08
Kalimantan Barat	2022M5	2.272	2.777	1,34	2.291	10,61	0,08
Kalimantan Barat	2022M6	2.376	2.860	1,30	2.272	10,57	0,08
Kalimantan Barat	2022M7	2.396	2.952	1,33	2.376	10,46	0,09
Kalimantan Barat	2022M8	2.400	2.936	1,49	2.396	10,51	0,09
Kalimantan Barat	2022M9	2.429	3.437	1,54	2.400	10,41	0,09
Kalimantan Barat	2022M10	2.407	3.085	1,54	2.429	10,50	0,10
Kalimantan Barat	2022M11	2.413	3.220	1,50	2.407	10,63	0,10
Kalimantan Barat	2022M12	2.429	3.329	1,33	2.413	10,71	0,10
Kalimantan Timur	2018M7	989	4.144	4,76	994	8,14	0,22
Kalimantan Timur	2018M8	978	4.148	5,12	989	7,63	0,22
Kalimantan Timur	2018M9	1.024	4.218	5,23	978	7,50	0,22
Kalimantan Timur	2018M10	997	4.285	4,68	1.024	12,43	0,22
Kalimantan Timur	2018M11	1.042	4.369	3,55	997	7,54	0,22
Kalimantan Timur	2018M12	1.047	4.500	3,22	1.042	7,72	0,22
Kalimantan Timur	2019M1	1.107	4.540	3,42	1.047	7,69	0,22
Kalimantan Timur	2019M2	1.119	4.556	3,74	1.107	7,82	0,22
Kalimantan Timur	2019M3	1.134	4.605	3,24	1.119	7,67	0,22
Kalimantan Timur	2019M4	1.126	4.626	2,90	1.134	7,94	0,22
Kalimantan Timur	2019M5	1.128	4.771	3,11	1.126	13,09	0,22
Kalimantan Timur	2019M6	1.114	4.866	2,74	1.128	7,67	0,22
Kalimantan Timur	2019M7	1.100	5.018	2,91	1.114	7,76	0,22
Kalimantan Timur	2019M8	1.104	4.989	2,73	1.100	7,82	0,22
Kalimantan Timur	2019M9	1.096	5.143	2,67	1.104	7,73	0,22
Kalimantan Timur	2019M10	1.094	5.138	2,62	1.096	7,75	0,22
Kalimantan Timur	2019M11	1.179	5.168	2,31	1.094	12,97	0,21
Kalimantan Timur	2019M12	1.194	5.228	1,96	1.179	7,91	0,21
Kalimantan Timur	2020M1	1.181	5.244	2,32	1.194	8,15	0,20
Kalimantan Timur	2020M2	1.182	5.470	2,54	1.181	12,76	0,20
Kalimantan Timur	2020M3	1.216	5.534	2,22	1.182	13,01	0,20
Kalimantan Timur	2020M4	1.182	5.520	2,54	1.216	12,50	0,19
Kalimantan Timur	2020M5	1.161	5.643	2,65	1.182	7,52	0,18
Kalimantan Timur	2020M6	1.156	5.691	2,66	1.161	12,43	0,18
Kalimantan Timur	2020M7	1.163	6.064	2,54	1.156	7,19	0,19
Kalimantan Timur	2020M8	1.150	6.731	2,18	1.163	12,27	0,19
Kalimantan Timur	2020M9	1.187	7.003	2,45	1.150	7,16	0,19
Kalimantan Timur	2020M10	1.170	7.333	2,24	1.187	12,06	0,18
Kalimantan Timur	2020M11	1.173	7.069	2,50	1.170	12,11	0,15
Kalimantan Timur	2020M12	1.153	5.870	2,29	1.173	12,22	0,13
Kalimantan Timur	2021M1	1.195	7.345	2,50	1.153	11,77	0,13
Kalimantan Timur	2021M2	1.183	7.263	3,04	1.195	11,67	0,13
Kalimantan Timur	2021M3	1.174	7.102	2,49	1.183	11,62	0,13
Kalimantan Timur	2021M4	1.176	7.197	2,52	1.174	11,63	0,13
Kalimantan Timur	2021M5	1.168	7.254	2,93	1.176	11,91	0,13
Kalimantan Timur	2021M6	1.256	7.241	2,56	1.168	6,68	0,12
Kalimantan Timur	2021M7	1.150	7.375	2,54	1.256	6,78	0,12
Kalimantan Timur	2021M8	1.183	7.274	2,52	1.150	6,81	0,12
Kalimantan Timur	2021M9	1.193	7.271	2,42	1.183	8,10	0,12
Kalimantan Timur	2021M10	1.207	6.607	1,70	1.193	8,02	0,12
Kalimantan Timur	2021M11	1.191	6.479	1,97	1.207	7,85	0,12
Kalimantan Timur	2021M12	1.215	6.534	2,59	1.191	7,83	0,12
Kalimantan Timur	2022M1	1.205	6.860	2,74	1.215	6,59	0,12
Kalimantan Timur	2022M2	1.143	6.796	2,77	1.205	10,78	0,12
Kalimantan Timur	2022M3	1.210	7.407	2,67	1.143	10,74	0,12
Kalimantan Timur	2022M4	1.220	7.721	2,71	1.210	10,84	0,12
Kalimantan Timur	2022M5	1.265	7.815	2,56	1.220	10,61	0,12
Kalimantan Timur	2022M6	1.312	7.714	2,74	1.265	10,57	0,12
Kalimantan Timur	2022M7	1.295	7.597	2,84	1.312	10,46	0,11
Kalimantan Timur	2022M8	1.291	7.649	2,85	1.295	10,51	0,11
Kalimantan Timur	2022M9	1.316	7.704	2,94	1.291	10,41	0,11
Kalimantan Timur	2022M10	1.318	7.790	2,64	1.316	10,50	0,12
Kalimantan Timur	2022M11	1.332	7.884	2,45	1.318	10,63	0,12
Kalimantan Timur	2022M12	1.302	7.550	2,79	1.332	10,71	0,11
Kalimantan Tengah	2018M7	242	888	3,40	243	8,14	0,09
Kalimantan Tengah	2018M8	246	894	3,10	242	7,63	0,09
Kalimantan Tengah	2018M9	250	901	3,09	246	7,50	0,09
Kalimantan Tengah	2018M10	251	797	2,49	250	12,43	0,09
Kalimantan Tengah	2018M11	250	813	2,58	251	7,54	0,09
Kalimantan Tengah	2018M12	263	845	2,24	250	7,72	0,09
Kalimantan Tengah	2019M1	278	853	3,11	263	7,69	0,09
Kalimantan Tengah	2019M2	269	852	3,03	278	7,82	0,09
Kalimantan Tengah	2019M3	267	1.030	3,26	269	7,67	0,09
Kalimantan Tengah	2019M4	271	1.034	3,02	267	7,94	0,09
Kalimantan Tengah	2019M5	267	1.050	3,33	271	13,09	0,09
Kalimantan Tengah	2019M6	264	859	3,31	267	7,67	0,09
Kalimantan Tengah	2019M7	260	886	3,96	264	7,76	0,09
Kalimantan Tengah	2019M8	255	882	3,85	260	7,82	0,09
Kalimantan Tengah	2019M9	255	887	4,20	255	7,73	0,09
Kalimantan Tengah	2019M10	262	907	3,99	255	7,75	0,09
Kalimantan Tengah	2019M11	305	922	2,91	262	12,97	0,09
Kalimantan Tengah	2019M12	302	924	2,86	305	7,91	0,09
Kalimantan Tengah	2020M1	296	941	2,87	302	8,15	0,09
Kalimantan Tengah	2020M2	295	947	3,38	296	12,76	0,09
Kalimantan Tengah	2020M3	291	928	3,48	295	13,01	0,09

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Kalimantan Tengah	2020M4	289	942	3,95	291	12,50	0,08
Kalimantan Tengah	2020M5	284	948	3,98	289	7,52	0,08
Kalimantan Tengah	2020M6	296	986	3,61	284	12,43	0,08
Kalimantan Tengah	2020M7	292	988	3,08	296	7,19	0,08
Kalimantan Tengah	2020M8	288	1.002	2,99	292	12,27	0,08
Kalimantan Tengah	2020M9	280	1.035	2,47	288	7,16	0,07
Kalimantan Tengah	2020M10	273	1.032	2,46	280	12,06	0,07
Kalimantan Tengah	2020M11	276	1.067	2,43	273	12,11	0,06
Kalimantan Tengah	2020M12	277	1.085	2,04	276	12,22	0,06
Kalimantan Tengah	2021M1	278	1.082	2,00	277	11,77	0,06
Kalimantan Tengah	2021M2	280	1.079	1,90	278	11,67	0,05
Kalimantan Tengah	2021M3	281	1.066	1,89	280	11,62	0,05
Kalimantan Tengah	2021M4	281	1.086	1,51	281	11,63	0,05
Kalimantan Tengah	2021M5	277	1.089	1,55	281	11,91	0,05
Kalimantan Tengah	2021M6	280	1.107	1,69	277	6,68	0,05
Kalimantan Tengah	2021M7	276	1.098	1,73	280	6,78	0,05
Kalimantan Tengah	2021M8	280	1.084	1,74	276	6,81	0,05
Kalimantan Tengah	2021M9	280	1.102	1,63	280	8,10	0,05
Kalimantan Tengah	2021M10	280	1.091	1,24	280	8,02	0,05
Kalimantan Tengah	2021M11	288	1.130	1,50	280	7,85	0,05
Kalimantan Tengah	2021M12	298	1.177	1,69	288	7,83	0,05
Kalimantan Tengah	2022M1	296	1.176	2,15	298	6,59	0,05
Kalimantan Tengah	2022M2	267	1.162	2,13	296	10,78	0,05
Kalimantan Tengah	2022M3	342	1.192	1,87	267	10,74	0,05
Kalimantan Tengah	2022M4	347	1.188	1,98	342	10,84	0,05
Kalimantan Tengah	2022M5	348	1.190	1,83	347	10,61	0,05
Kalimantan Tengah	2022M6	354	1.220	1,84	348	10,57	0,05
Kalimantan Tengah	2022M7	386	1.243	1,48	354	10,46	0,05
Kalimantan Tengah	2022M8	386	1.220	1,53	386	10,51	0,05
Kalimantan Tengah	2022M9	401	1.223	1,48	386	10,41	0,05
Kalimantan Tengah	2022M10	433	1.221	1,53	401	10,50	0,05
Kalimantan Tengah	2022M11	431	1.227	1,34	433	10,63	0,05
Kalimantan Tengah	2022M12	428	1.295	1,19	431	10,71	0,05
Sulawesi Tengah	2018M7	223	827	12,18	219	8,14	0,10
Sulawesi Tengah	2018M8	221	841	13,22	223	7,63	0,10
Sulawesi Tengah	2018M9	217	841	13,84	221	7,50	0,10
Sulawesi Tengah	2018M10	214	868	14,00	217	12,43	0,10
Sulawesi Tengah	2018M11	212	887	13,91	214	7,54	0,10
Sulawesi Tengah	2018M12	220	956	12,92	212	7,72	0,10
Sulawesi Tengah	2019M1	212	943	16,02	220	7,69	0,10
Sulawesi Tengah	2019M2	204	925	18,50	212	7,82	0,10
Sulawesi Tengah	2019M3	218	948	14,70	204	7,67	0,10
Sulawesi Tengah	2019M4	212	922	14,63	218	7,94	0,10
Sulawesi Tengah	2019M5	216	995	13,50	212	13,09	0,10
Sulawesi Tengah	2019M6	217	1.025	13,95	216	7,67	0,10
Sulawesi Tengah	2019M7	208	1.035	14,14	217	7,76	0,10
Sulawesi Tengah	2019M8	219	1.054	13,47	208	7,82	0,10
Sulawesi Tengah	2019M9	215	1.045	13,25	219	7,73	0,10
Sulawesi Tengah	2019M10	214	1.085	14,30	215	7,75	0,10
Sulawesi Tengah	2019M11	224	1.103	11,84	214	12,97	0,10
Sulawesi Tengah	2019M12	240	1.135	9,54	224	7,91	0,09
Sulawesi Tengah	2020M1	227	1.145	10,42	240	8,15	0,09
Sulawesi Tengah	2020M2	225	1.158	9,84	227	12,76	0,09
Sulawesi Tengah	2020M3	216	1.146	10,44	225	13,01	0,09
Sulawesi Tengah	2020M4	214	1.189	11,28	216	12,50	0,08
Sulawesi Tengah	2020M5	211	1.194	11,53	214	7,52	0,08
Sulawesi Tengah	2020M6	225	1.215	11,08	211	12,43	0,08
Sulawesi Tengah	2020M7	227	1.266	13,56	225	7,19	0,08
Sulawesi Tengah	2020M8	225	1.259	10,65	227	12,27	0,08
Sulawesi Tengah	2020M9	225	1.301	11,12	225	7,16	0,08
Sulawesi Tengah	2020M10	230	1.267	11,10	225	12,06	0,07
Sulawesi Tengah	2020M11	230	1.267	11,02	230	12,11	0,06
Sulawesi Tengah	2020M12	216	1.181	5,83	230	12,22	0,06
Sulawesi Tengah	2021M1	221	1.239	8,51	216	11,77	0,06
Sulawesi Tengah	2021M2	224	1.223	8,25	221	11,67	0,06
Sulawesi Tengah	2021M3	226	1.220	13,70	224	11,62	0,06
Sulawesi Tengah	2021M4	232	1.274	13,63	226	11,63	0,06
Sulawesi Tengah	2021M5	224	1.293	12,22	232	11,91	0,06
Sulawesi Tengah	2021M6	228	1.297	13,58	224	6,68	0,06
Sulawesi Tengah	2021M7	230	1.333	14,15	228	6,78	0,06
Sulawesi Tengah	2021M8	231	1.376	12,32	230	6,81	0,06
Sulawesi Tengah	2021M9	226	1.379	20,47	231	8,10	0,06
Sulawesi Tengah	2021M10	210	1.384	16,77	226	8,02	0,06
Sulawesi Tengah	2021M11	253	1.435	13,14	210	7,85	0,06
Sulawesi Tengah	2021M12	244	1.459	13,54	253	7,83	0,06
Sulawesi Tengah	2022M1	244	1.434	13,94	244	6,59	0,06
Sulawesi Tengah	2022M2	236	1.401	9,31	244	10,78	0,06
Sulawesi Tengah	2022M3	251	1.438	8,60	236	10,74	0,06
Sulawesi Tengah	2022M4	255	1.533	8,78	251	10,84	0,06
Sulawesi Tengah	2022M5	252	1.548	8,91	255	10,61	0,06
Sulawesi Tengah	2022M6	204	1.493	10,48	252	10,57	0,06
Sulawesi Tengah	2022M7	205	1.497	10,17	204	10,46	0,06
Sulawesi Tengah	2022M8	207	1.518	9,59	205	10,51	0,06
Sulawesi Tengah	2022M9	207	1.501	9,72	207	10,41	0,06
Sulawesi Tengah	2022M10	196	1.480	6,19	207	10,50	0,06
Sulawesi Tengah	2022M11	197	1.539	5,93	196	10,63	0,06
Sulawesi Tengah	2022M12	198	1.616	6,06	197	10,71	0,06
Sulawesi Selatan	2018M7	907	3.030	7,87	930	8,14	0,12

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sulawesi Selatan	2018M8	877	3.069	9,56	907	7,63	0,12
Sulawesi Selatan	2018M9	869	3.101	9,62	877	7,50	0,12
Sulawesi Selatan	2018M10	862	3.072	9,19	869	12,43	0,12
Sulawesi Selatan	2018M11	881	3.074	9,03	862	7,54	0,12
Sulawesi Selatan	2018M12	887	3.194	7,00	881	7,72	0,12
Sulawesi Selatan	2019M1	883	3.246	8,03	887	7,69	0,12
Sulawesi Selatan	2019M2	873	3.313	8,42	883	7,82	0,12
Sulawesi Selatan	2019M3	955	3.277	7,76	873	7,67	0,12
Sulawesi Selatan	2019M4	927	3.247	8,49	955	7,94	0,12
Sulawesi Selatan	2019M5	923	3.294	8,55	927	13,09	0,12
Sulawesi Selatan	2019M6	901	3.373	7,96	923	7,67	0,11
Sulawesi Selatan	2019M7	900	3.500	8,32	901	7,76	0,11
Sulawesi Selatan	2019M8	891	3.569	8,11	900	7,82	0,11
Sulawesi Selatan	2019M9	906	3.659	10,90	891	7,73	0,11
Sulawesi Selatan	2019M10	919	3.753	10,77	906	7,75	0,12
Sulawesi Selatan	2019M11	940	3.902	10,11	919	12,97	0,11
Sulawesi Selatan	2019M12	956	3.954	9,50	940	7,91	0,11
Sulawesi Selatan	2020M1	886	4.022	10,22	956	8,15	0,11
Sulawesi Selatan	2020M2	901	4.071	10,23	886	12,76	0,11
Sulawesi Selatan	2020M3	880	4.038	10,69	901	13,01	0,11
Sulawesi Selatan	2020M4	863	3.997	8,42	880	12,50	0,10
Sulawesi Selatan	2020M5	856	4.017	8,39	863	7,52	0,10
Sulawesi Selatan	2020M6	892	4.108	7,97	856	12,43	0,09
Sulawesi Selatan	2020M7	893	4.088	7,44	892	7,19	0,09
Sulawesi Selatan	2020M8	880	4.121	6,74	893	12,27	0,09
Sulawesi Selatan	2020M9	874	4.274	6,43	880	7,16	0,09
Sulawesi Selatan	2020M10	885	4.265	6,21	874	12,06	0,08
Sulawesi Selatan	2020M11	927	4.359	5,63	885	12,11	0,07
Sulawesi Selatan	2020M12	933	4.453	5,94	927	12,22	0,07
Sulawesi Selatan	2021M1	953	4.467	6,56	933	11,77	0,06
Sulawesi Selatan	2021M2	925	4.409	6,55	953	11,67	0,06
Sulawesi Selatan	2021M3	957	4.434	6,28	925	11,62	0,06
Sulawesi Selatan	2021M4	984	4.359	5,92	957	11,63	0,06
Sulawesi Selatan	2021M5	987	4.419	5,81	984	11,91	0,06
Sulawesi Selatan	2021M6	996	4.572	6,34	987	6,68	0,06
Sulawesi Selatan	2021M7	1.024	4.658	5,86	996	6,78	0,06
Sulawesi Selatan	2021M8	1.027	4.679	4,38	1.024	6,81	0,06
Sulawesi Selatan	2021M9	1.015	4.963	4,40	1.027	8,10	0,06
Sulawesi Selatan	2021M10	1.035	4.998	4,29	1.015	8,02	0,06
Sulawesi Selatan	2021M11	1.055	5.113	3,57	1.035	7,85	0,06
Sulawesi Selatan	2021M12	1.084	5.378	3,56	1.055	7,83	0,06
Sulawesi Selatan	2022M1	1.085	5.400	4,59	1.084	6,59	0,06
Sulawesi Selatan	2022M2	1.158	5.374	4,73	1.085	10,78	0,06
Sulawesi Selatan	2022M3	1.155	5.262	4,94	1.158	10,74	0,06
Sulawesi Selatan	2022M4	1.180	5.171	4,32	1.155	10,84	0,06
Sulawesi Selatan	2022M5	1.176	5.203	4,53	1.180	10,61	0,06
Sulawesi Selatan	2022M6	1.209	5.332	5,79	1.176	10,57	0,06
Sulawesi Selatan	2022M7	1.224	5.390	5,86	1.209	10,46	0,06
Sulawesi Selatan	2022M8	1.213	5.268	5,44	1.224	10,51	0,06
Sulawesi Selatan	2022M9	1.195	5.286	5,88	1.213	10,41	0,06
Sulawesi Selatan	2022M10	1.198	5.315	5,39	1.195	10,50	0,06
Sulawesi Selatan	2022M11	1.264	5.369	4,95	1.198	10,63	0,06
Sulawesi Selatan	2022M12	1.210	5.521	3,83	1.264	10,71	0,06
Sulawesi Utara	2018M7	119	254	9,22	122	8,14	0,05
Sulawesi Utara	2018M8	117	251	8,77	119	7,63	0,05
Sulawesi Utara	2018M9	119	257	8,59	117	7,50	0,05
Sulawesi Utara	2018M10	118	257	7,62	119	12,43	0,05
Sulawesi Utara	2018M11	116	261	7,25	118	7,54	0,05
Sulawesi Utara	2018M12	114	297	6,18	116	7,72	0,05
Sulawesi Utara	2019M1	115	284	6,92	114	7,69	0,06
Sulawesi Utara	2019M2	112	292	7,48	115	7,82	0,06
Sulawesi Utara	2019M3	109	290	6,92	112	7,67	0,06
Sulawesi Utara	2019M4	108	290	8,51	109	7,94	0,06
Sulawesi Utara	2019M5	107	284	8,52	108	13,09	0,06
Sulawesi Utara	2019M6	106	293	8,14	107	7,67	0,06
Sulawesi Utara	2019M7	106	291	8,49	106	7,76	0,06
Sulawesi Utara	2019M8	105	286	6,88	106	7,82	0,06
Sulawesi Utara	2019M9	104	295	8,56	105	7,73	0,06
Sulawesi Utara	2019M10	101	296	8,33	104	7,75	0,06
Sulawesi Utara	2019M11	107	297	6,94	101	12,97	0,06
Sulawesi Utara	2019M12	111	335	7,10	107	7,91	0,05
Sulawesi Utara	2020M1	109	328	7,62	111	8,15	0,05
Sulawesi Utara	2020M2	107	330	7,63	109	12,76	0,05
Sulawesi Utara	2020M3	109	329	8,54	107	13,01	0,05
Sulawesi Utara	2020M4	111	317	8,22	109	12,50	0,05
Sulawesi Utara	2020M5	108	320	8,83	111	7,52	0,05
Sulawesi Utara	2020M6	114	348	7,40	108	12,43	0,05
Sulawesi Utara	2020M7	108	340	6,87	114	7,19	0,04
Sulawesi Utara	2020M8	113	358	6,83	108	12,27	0,05
Sulawesi Utara	2020M9	105	357	4,68	113	7,16	0,04
Sulawesi Utara	2020M10	106	356	4,92	105	12,06	0,04
Sulawesi Utara	2020M11	106	395	5,84	106	12,11	0,03
Sulawesi Utara	2020M12	105	386	4,98	106	12,22	0,03
Sulawesi Utara	2021M1	101	374	3,04	105	11,77	0,03
Sulawesi Utara	2021M2	100	359	3,21	101	11,67	0,03
Sulawesi Utara	2021M3	106	361	2,68	100	11,62	0,03
Sulawesi Utara	2021M4	107	364	2,80	106	11,63	0,03
Sulawesi Utara	2021M5	105	369	2,07	107	11,91	0,03

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sulawesi Utara	2021M6	105	382	2,25	105	6,68	0,03
Sulawesi Utara	2021M7	103	386	2,27	105	6,78	0,03
Sulawesi Utara	2021M8	101	391	8,48	103	6,81	0,03
Sulawesi Utara	2021M9	103	381	2,47	101	8,10	0,03
Sulawesi Utara	2021M10	100	385	2,38	103	8,02	0,03
Sulawesi Utara	2021M11	105	393	3,91	100	7,85	0,03
Sulawesi Utara	2021M12	107	421	4,02	105	7,83	0,03
Sulawesi Utara	2022M1	102	413	4,26	107	6,59	0,03
Sulawesi Utara	2022M2	100	404	4,50	102	10,78	0,03
Sulawesi Utara	2022M3	103	408	4,42	100	10,74	0,03
Sulawesi Utara	2022M4	103	410	5,03	103	10,84	0,04
Sulawesi Utara	2022M5	97	403	4,82	103	10,61	0,03
Sulawesi Utara	2022M6	106	425	4,53	97	10,57	0,04
Sulawesi Utara	2022M7	107	424	4,41	106	10,46	0,04
Sulawesi Utara	2022M8	103	423	4,90	107	10,51	0,04
Sulawesi Utara	2022M9	109	409	4,70	103	10,41	0,04
Sulawesi Utara	2022M10	111	414	5,34	109	10,50	0,04
Sulawesi Utara	2022M11	112	416	5,36	111	10,63	0,04
Sulawesi Utara	2022M12	109	444	5,49	112	10,71	0,04
Gorontalo	2018M7	23	259	13,62	25	8,14	0,08
Gorontalo	2018M8	22	260	11,35	23	7,63	0,10
Gorontalo	2018M9	22	261	14,51	22	7,50	0,09
Gorontalo	2018M10	22	258	9,77	22	12,43	0,09
Gorontalo	2018M11	8	77	14,92	22	7,54	0,09
Gorontalo	2018M12	35	233	4,63	8	7,72	0,09
Gorontalo	2019M1	36	247	7,53	35	7,69	0,08
Gorontalo	2019M2	35	249	12,95	36	7,82	0,08
Gorontalo	2019M3	32	240	8,52	35	7,67	0,08
Gorontalo	2019M4	21	263	8,78	32	7,94	0,08
Gorontalo	2019M5	20	270	6,29	21	13,09	0,08
Gorontalo	2019M6	21	278	10,04	20	7,67	0,08
Gorontalo	2019M7	20	279	11,47	21	7,76	0,08
Gorontalo	2019M8	20	280	14,19	20	7,82	0,09
Gorontalo	2019M9	20	278	18,80	20	7,73	0,09
Gorontalo	2019M10	20	280	24,92	20	7,75	0,09
Gorontalo	2019M11	19	284	14,43	20	12,97	0,09
Gorontalo	2019M12	19	259	12,97	19	7,91	0,08
Gorontalo	2020M1	18	275	15,22	19	8,15	0,08
Gorontalo	2020M2	17	279	13,91	18	12,76	0,08
Gorontalo	2020M3	17	298	12,70	17	13,01	0,08
Gorontalo	2020M4	15	299	12,35	17	12,50	0,08
Gorontalo	2020M5	15	300	11,21	15	7,52	0,08
Gorontalo	2020M6	11	313	19,32	15	12,43	0,07
Gorontalo	2020M7	10	301	30,76	11	7,19	0,07
Gorontalo	2020M8	10	306	12,23	10	12,27	0,07
Gorontalo	2020M9	11	326	28,91	10	7,16	0,07
Gorontalo	2020M10	11	320	10,87	11	12,06	0,07
Gorontalo	2020M11	12	315	10,39	11	12,11	0,05
Gorontalo	2020M12	12	285	16,40	12	12,22	0,05
Gorontalo	2021M1	25	287	8,17	12	11,77	0,05
Gorontalo	2021M2	27	292	7,58	25	11,67	0,05
Gorontalo	2021M3	27	285	7,55	27	11,62	0,05
Gorontalo	2021M4	27	290	5,81	27	11,63	0,05
Gorontalo	2021M5	26	285	2,22	27	11,91	0,05
Gorontalo	2021M6	27	298	2,70	26	6,68	0,05
Gorontalo	2021M7	27	299	2,70	27	6,78	0,05
Gorontalo	2021M8	26	300	1,41	27	6,81	0,05
Gorontalo	2021M9	25	300	1,44	26	8,10	0,05
Gorontalo	2021M10	10	296	4,49	25	8,02	0,05
Gorontalo	2021M11	8	306	5,51	10	7,85	0,05
Gorontalo	2021M12	8	312	6,25	8	7,83	0,05
Gorontalo	2022M1	23	310	2,14	8	6,59	0,05
Gorontalo	2022M2	23	311	2,05	23	10,78	0,05
Gorontalo	2022M3	24	307	1,69	23	10,74	0,06
Gorontalo	2022M4	20	310	2,04	24	10,84	0,06
Gorontalo	2022M5	18	309	2,05	20	10,61	0,06
Gorontalo	2022M6	22	321	1,60	18	10,57	0,06
Gorontalo	2022M7	22	323	1,53	22	10,46	0,06
Gorontalo	2022M8	23	340	0,23	22	10,51	0,06
Gorontalo	2022M9	24	345	0,22	23	10,41	0,06
Gorontalo	2022M10	25	337	0,21	24	10,50	0,06
Gorontalo	2022M11	26	352	0,13	25	10,63	0,06
Gorontalo	2022M12	29	347	1,50	26	10,71	0,06
Sulawesi Barat	2018M7	14	188	10,25	15	8,14	0,06
Sulawesi Barat	2018M8	14	191	13,76	14	7,63	0,06
Sulawesi Barat	2018M9	14	188	16,88	14	7,50	0,06
Sulawesi Barat	2018M10	13	186	10,70	14	12,43	0,06
Sulawesi Barat	2018M11	13	184	11,21	13	7,54	0,06
Sulawesi Barat	2018M12	13	198	7,16	13	7,72	0,06
Sulawesi Barat	2019M1	13	203	5,34	13	7,69	0,06
Sulawesi Barat	2019M2	13	204	5,82	13	7,82	0,06
Sulawesi Barat	2019M3	12	206	5,99	13	7,67	0,06
Sulawesi Barat	2019M4	12	196	6,53	12	7,94	0,06
Sulawesi Barat	2019M5	12	196	5,96	12	13,09	0,06
Sulawesi Barat	2019M6	12	204	5,93	12	7,67	0,06
Sulawesi Barat	2019M7	11	203	1,53	12	7,76	0,06
Sulawesi Barat	2019M8	11	216	2,94	11	7,82	0,06
Sulawesi Barat	2019M9	10	212	3,10	11	7,73	0,06

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sulawesi Barat	2019M10	10	213	4,85	10	7,75	0,06
Sulawesi Barat	2019M11	10	220	10,04	10	12,97	0,06
Sulawesi Barat	2019M12	12	234	4,54	10	7,91	0,06
Sulawesi Barat	2020M1	11	225	4,65	12	8,15	0,06
Sulawesi Barat	2020M2	11	222	4,75	11	12,76	0,06
Sulawesi Barat	2020M3	11	225	3,21	11	13,01	0,05
Sulawesi Barat	2020M4	10	227	1,99	11	12,50	0,05
Sulawesi Barat	2020M5	10	228	2,54	10	7,52	0,05
Sulawesi Barat	2020M6	2	93	2,57	10	12,43	0,04
Sulawesi Barat	2020M7	7	231	7,54	2	7,19	0,05
Sulawesi Barat	2020M8	7	241	8,01	7	12,27	0,05
Sulawesi Barat	2020M9	6	243	9,70	7	7,16	0,04
Sulawesi Barat	2020M10	6	242	9,15	6	12,06	0,04
Sulawesi Barat	2020M11	6	234	9,33	6	12,11	0,04
Sulawesi Barat	2020M12	6	244	9,45	6	12,22	0,04
Sulawesi Barat	2021M1	10	245	5,22	6	11,77	0,04
Sulawesi Barat	2021M2	10	247	5,27	10	11,67	0,04
Sulawesi Barat	2021M3	12	247	5,02	10	11,62	0,04
Sulawesi Barat	2021M4	21	265	1,35	12	11,63	0,04
Sulawesi Barat	2021M5	21	268	0,35	21	11,91	0,04
Sulawesi Barat	2021M6	22	266	0,33	21	6,68	0,04
Sulawesi Barat	2021M7	26	273	0,28	22	6,78	0,04
Sulawesi Barat	2021M8	26	272	0,88	26	6,81	0,04
Sulawesi Barat	2021M9	26	273	0,85	26	8,10	0,04
Sulawesi Barat	2021M10	25	278	0,84	26	8,02	0,04
Sulawesi Barat	2021M11	7	264	2,67	25	7,85	0,04
Sulawesi Barat	2021M12	8	283	2,43	7	7,83	0,04
Sulawesi Barat	2022M1	8	280	2,53	8	6,59	0,04
Sulawesi Barat	2022M2	8	273	2,37	8	10,78	0,04
Sulawesi Barat	2022M3	8	274	2,39	8	10,74	0,04
Sulawesi Barat	2022M4	8	279	2,42	8	10,84	0,04
Sulawesi Barat	2022M5	8	278	2,48	8	10,61	0,04
Sulawesi Barat	2022M6	7	273	2,79	8	10,57	0,04
Sulawesi Barat	2022M7	6	278	2,85	7	10,46	0,04
Sulawesi Barat	2022M8	6	276	2,90	6	10,51	0,04
Sulawesi Barat	2022M9	5	278	3,78	6	10,41	0,04
Sulawesi Barat	2022M10	5	279	0,00	5	10,50	0,04
Sulawesi Barat	2022M11	5	283	0,00	5	10,63	0,04
Sulawesi Barat	2022M12	5	299	0,00	5	10,71	0,04
Sulawesi Tenggara	2018M7	277	855	9,70	269	8,14	0,13
Sulawesi Tenggara	2018M8	278	873	9,42	277	7,63	0,13
Sulawesi Tenggara	2018M9	279	890	11,31	278	7,50	0,13
Sulawesi Tenggara	2018M10	277	894	9,12	279	12,43	0,13
Sulawesi Tenggara	2018M11	281	900	8,72	277	7,54	0,13
Sulawesi Tenggara	2018M12	274	934	8,46	281	7,72	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M1	283	954	7,82	274	7,69	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M2	284	970	9,33	283	7,82	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M3	295	977	9,41	284	7,67	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M4	302	982	10,70	295	7,94	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M5	305	1.052	10,31	302	13,09	0,13
Sulawesi Tenggara	2019M6	297	1.058	9,24	305	7,67	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M7	291	1.077	8,46	297	7,76	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M8	294	1.121	9,16	291	7,82	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M9	292	1.145	9,03	294	7,73	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M10	294	1.137	10,11	292	7,75	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M11	300	1.061	7,74	294	12,97	0,12
Sulawesi Tenggara	2019M12	317	1.126	7,27	300	7,91	0,12
Sulawesi Tenggara	2020M1	306	1.150	8,09	317	8,15	0,12
Sulawesi Tenggara	2020M2	297	1.170	8,64	306	12,76	0,12
Sulawesi Tenggara	2020M3	296	1.174	9,82	297	13,01	0,12
Sulawesi Tenggara	2020M4	288	1.178	9,91	296	12,50	0,11
Sulawesi Tenggara	2020M5	278	1.195	10,28	288	7,52	0,10
Sulawesi Tenggara	2020M6	275	1.232	13,62	278	12,43	0,10
Sulawesi Tenggara	2020M7	274	1.273	14,40	275	7,19	0,10
Sulawesi Tenggara	2020M8	272	1.284	13,19	274	12,27	0,10
Sulawesi Tenggara	2020M9	266	1.309	8,80	272	7,16	0,10
Sulawesi Tenggara	2020M10	270	1.312	7,34	266	12,06	0,09
Sulawesi Tenggara	2020M11	281	1.340	7,88	270	12,11	0,07
Sulawesi Tenggara	2020M12	282	1.368	8,92	281	12,22	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M1	291	1.364	8,83	282	11,77	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M2	299	1.374	8,43	291	11,67	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M3	304	1.378	6,72	299	11,62	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M4	305	1.379	6,68	304	11,63	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M5	294	1.414	4,76	305	11,91	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M6	291	1.426	6,61	294	6,68	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M7	291	1.416	6,23	291	6,78	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M8	298	1.442	6,16	291	6,81	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M9	286	1.337	4,15	298	8,10	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M10	279	1.356	4,70	286	8,02	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M11	278	1.344	5,62	279	7,85	0,07
Sulawesi Tenggara	2021M12	285	1.511	5,80	278	7,83	0,07
Sulawesi Tenggara	2022M1	289	1.510	5,54	285	6,59	0,07
Sulawesi Tenggara	2022M2	235	1.517	7,79	289	10,78	0,07
Sulawesi Tenggara	2022M3	236	1.488	8,15	235	10,74	0,07
Sulawesi Tenggara	2022M4	237	1.509	8,70	236	10,84	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M5	234	1.527	10,23	237	10,61	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M6	247	1.561	8,98	234	10,57	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M7	246	1.491	9,65	247	10,46	0,06

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Sulawesi Tenggara	2022M8	246	1.504	9,82	246	10,51	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M9	248	1.478	9,77	246	10,41	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M10	267	1.527	8,91	248	10,50	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M11	263	1.539	10,13	267	10,63	0,06
Sulawesi Tenggara	2022M12	262	1.608	10,50	263	10,71	0,06
NTB	2018M7	855	1.144	5,06	854	8,14	0,14
NTB	2018M8	842	1.197	4,88	855	7,63	0,14
NTB	2018M9	1.401	8.358	7,60	842	7,50	0,41
NTB	2018M10	1.381	8.358	8,77	1.401	12,43	0,40
NTB	2018M11	1.414	8.053	9,01	1.381	7,54	0,40
NTB	2018M12	1.465	6.154	6,20	1.414	7,72	0,39
NTB	2019M1	1.446	6.997	6,36	1.465	7,69	0,39
NTB	2019M2	1.432	7.384	6,49	1.446	7,82	0,40
NTB	2019M3	1.419	7.914	6,46	1.432	7,67	0,40
NTB	2019M4	1.408	8.583	6,87	1.419	7,94	0,41
NTB	2019M5	1.397	7.415	7,11	1.408	13,09	0,40
NTB	2019M6	1.366	7.751	6,12	1.397	7,67	0,40
NTB	2019M7	1.347	7.438	6,25	1.366	7,76	0,40
NTB	2019M8	1.354	8.270	6,03	1.347	7,82	0,40
NTB	2019M9	1.365	8.844	6,35	1.354	7,73	0,41
NTB	2019M10	1.359	10.453	6,22	1.365	7,75	0,42
NTB	2019M11	1.414	9.991	5,26	1.359	12,97	0,42
NTB	2019M12	1.460	8.171	5,00	1.414	7,91	0,40
NTB	2020M1	1.418	8.403	5,66	1.460	8,15	0,40
NTB	2020M2	1.429	8.709	5,87	1.418	12,76	0,39
NTB	2020M3	1.406	9.470	6,37	1.429	13,01	0,38
NTB	2020M4	1.386	9.585	6,63	1.406	12,50	0,36
NTB	2020M5	1.383	9.307	6,26	1.386	7,52	0,35
NTB	2020M6	1.450	9.747	6,38	1.383	12,43	0,32
NTB	2020M7	1.458	8.932	6,59	1.450	7,19	0,32
NTB	2020M8	1.473	8.586	6,74	1.458	12,27	0,32
NTB	2020M9	1.496	9.772	6,85	1.473	7,16	0,31
NTB	2020M10	1.526	9.539	6,46	1.496	12,06	0,31
NTB	2020M11	1.574	11.032	5,71	1.526	12,11	0,29
NTB	2020M12	1.586	9.066	5,23	1.574	12,22	0,28
NTB	2021M1	1.574	9.438	5,86	1.586	11,77	0,27
NTB	2021M2	1.588	9.916	6,30	1.574	11,67	0,27
NTB	2021M3	1.592	9.631	6,20	1.588	11,62	0,27
NTB	2021M4	1.610	9.993	6,42	1.592	11,63	0,27
NTB	2021M5	1.599	9.649	6,23	1.610	11,91	0,27
NTB	2021M6	1.601	9.874	6,24	1.599	6,68	0,27
NTB	2021M7	1.580	9.742	6,56	1.601	6,78	0,28
NTB	2021M8	1.655	9.651	7,30	1.580	6,81	0,28
NTB	2021M9	1.643	10.050	6,31	1.655	8,10	0,28
NTB	2021M10	1.641	10.357	6,61	1.643	8,02	0,29
NTB	2021M11	1.692	11.055	7,03	1.641	7,85	0,29
NTB	2021M12	1.723	10.318	5,75	1.692	7,83	0,29
NTB	2022M1	1.659	10.651	6,14	1.723	6,59	0,28
NTB	2022M2	1.398	11.124	7,74	1.659	10,78	0,28
NTB	2022M3	1.421	11.153	7,63	1.398	10,74	0,28
NTB	2022M4	1.445	10.914	8,37	1.421	10,84	0,28
NTB	2022M5	1.440	10.586	7,99	1.445	10,61	0,28
NTB	2022M6	1.485	11.613	7,10	1.440	10,57	0,29
NTB	2022M7	1.498	11.112	6,87	1.485	10,46	0,29
NTB	2022M8	1.524	11.162	6,87	1.498	10,51	0,29
NTB	2022M9	1.544	11.657	7,22	1.524	10,41	0,29
NTB	2022M10	1.529	12.692	6,85	1.544	10,50	0,31
NTB	2022M11	1.539	11.892	6,72	1.529	10,63	0,31
NTB	2022M12	1.513	11.505	6,09	1.539	10,71	0,31
Bali	2018M7	351	932	4,80	350	8,14	0,08
Bali	2018M8	350	940	4,53	351	7,63	0,08
Bali	2018M9	348	909	5,60	350	7,50	0,08
Bali	2018M10	370	968	6,06	348	12,43	0,08
Bali	2018M11	372	961	5,00	370	7,54	0,08
Bali	2018M12	381	980	3,90	372	7,72	0,08
Bali	2019M1	393	981	4,29	381	7,69	0,07
Bali	2019M2	390	975	4,39	393	7,82	0,07
Bali	2019M3	380	989	4,28	390	7,67	0,07
Bali	2019M4	379	981	7,87	380	7,94	0,07
Bali	2019M5	372	985	9,80	379	13,09	0,07
Bali	2019M6	369	969	6,91	372	7,67	0,07
Bali	2019M7	363	968	6,54	369	7,76	0,07
Bali	2019M8	365	953	7,25	363	7,82	0,07
Bali	2019M9	377	935	6,94	365	7,73	0,08
Bali	2019M10	394	960	8,24	377	7,75	0,08
Bali	2019M11	392	986	7,15	394	12,97	0,07
Bali	2019M12	423	998	6,12	392	7,91	0,07
Bali	2020M1	421	970	6,01	423	8,15	0,07
Bali	2020M2	443	975	5,78	421	12,76	0,07
Bali	2020M3	450	967	5,91	443	13,01	0,07
Bali	2020M4	433	956	6,08	450	12,50	0,06
Bali	2020M5	425	947	6,60	433	7,52	0,06
Bali	2020M6	380	964	6,30	425	12,43	0,06
Bali	2020M7	377	946	6,44	380	7,19	0,06
Bali	2020M8	387	952	5,88	377	12,27	0,06
Bali	2020M9	392	956	7,87	387	7,16	0,06
Bali	2020M10	399	934	7,54	392	12,06	0,05
Bali	2020M11	384	978	4,20	399	12,11	0,04

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Bali	2020M12	384	969	4,42	384	12,22	0,04
Bali	2021M1	305	955	6,62	384	11,77	0,04
Bali	2021M2	303	939	6,64	305	11,67	0,04
Bali	2021M3	303	960	6,83	303	11,62	0,04
Bali	2021M4	302	969	7,51	303	11,63	0,04
Bali	2021M5	302	962	6,50	302	11,91	0,04
Bali	2021M6	357	951	7,72	302	6,68	0,03
Bali	2021M7	363	977	5,68	357	6,78	0,04
Bali	2021M8	380	987	6,21	363	6,81	0,04
Bali	2021M9	370	968	4,58	380	8,10	0,04
Bali	2021M10	357	980	3,86	370	8,02	0,04
Bali	2021M11	343	977	3,15	357	7,85	0,04
Bali	2021M12	339	1.043	3,37	343	7,83	0,04
Bali	2022M1	319	1.033	4,08	339	6,59	0,04
Bali	2022M2	635	1.083	2,89	319	10,78	0,04
Bali	2022M3	636	1.102	2,01	635	10,74	0,04
Bali	2022M4	638	1.114	1,89	636	10,84	0,04
Bali	2022M5	636	1.099	2,01	638	10,61	0,04
Bali	2022M6	645	1.118	2,18	636	10,57	0,04
Bali	2022M7	646	1.099	2,36	645	10,46	0,04
Bali	2022M8	646	1.085	2,22	646	10,51	0,04
Bali	2022M9	649	1.082	2,05	646	10,41	0,04
Bali	2022M10	652	1.077	2,23	649	10,50	0,04
Bali	2022M11	656	1.115	2,94	652	10,63	0,04
Bali	2022M12	658	1.153	3,03	656	10,71	0,04
NTT	2018M7	58	117	1,54	59	8,14	0,02
NTT	2018M8	57	122	1,49	58	7,63	0,02
NTT	2018M9	57	121	2,60	57	7,50	0,02
NTT	2018M10	56	119	1,79	57	12,43	0,02
NTT	2018M11	57	121	1,90	56	7,54	0,02
NTT	2018M12	59	127	1,70	57	7,72	0,02
NTT	2019M1	61	120	1,88	59	7,69	0,02
NTT	2019M2	62	117	1,84	61	7,82	0,02
NTT	2019M3	63	115	3,41	62	7,67	0,02
NTT	2019M4	64	115	3,54	63	7,94	0,02
NTT	2019M5	60	112	7,38	64	13,09	0,02
NTT	2019M6	59	114	4,07	60	7,67	0,02
NTT	2019M7	59	119	3,80	59	7,76	0,02
NTT	2019M8	58	120	4,40	59	7,82	0,01
NTT	2019M9	58	119	7,50	58	7,73	0,01
NTT	2019M10	57	119	6,95	58	7,75	0,01
NTT	2019M11	55	117	7,18	57	12,97	0,01
NTT	2019M12	54	127	3,89	55	7,91	0,01
NTT	2020M1	53	120	5,77	54	8,15	0,01
NTT	2020M2	53	118	5,95	53	12,76	0,01
NTT	2020M3	63	123	7,83	53	13,01	0,01
NTT	2020M4	59	120	6,80	63	12,50	0,01
NTT	2020M5	59	122	2,87	59	7,52	0,01
NTT	2020M6	57	125	5,82	59	12,43	0,01
NTT	2020M7	57	128	6,46	57	7,19	0,01
NTT	2020M8	58	132	5,27	57	12,27	0,01
NTT	2020M9	58	136	5,04	58	7,16	0,01
NTT	2020M10	57	134	4,68	58	12,06	0,01
NTT	2020M11	56	133	4,43	57	12,11	0,01
NTT	2020M12	57	138	3,07	56	12,22	0,01
NTT	2021M1	57	139	1,26	57	11,77	0,01
NTT	2021M2	56	135	0,89	57	11,67	0,01
NTT	2021M3	56	137	2,04	56	11,62	0,01
NTT	2021M4	54	136	1,81	56	11,63	0,01
NTT	2021M5	52	140	2,01	54	11,91	0,01
NTT	2021M6	53	140	2,11	52	6,68	0,01
NTT	2021M7	54	144	2,28	53	6,78	0,01
NTT	2021M8	55	146	2,30	54	6,81	0,01
NTT	2021M9	56	146	2,07	55	8,10	0,01
NTT	2021M10	50	146	1,78	56	8,02	0,01
NTT	2021M11	49	148	1,34	50	7,85	0,01
NTT	2021M12	48	159	1,11	49	7,83	0,01
NTT	2022M1	48	159	0,90	48	6,59	0,01
NTT	2022M2	49	151	0,75	48	10,78	0,01
NTT	2022M3	49	152	0,86	49	10,74	0,01
NTT	2022M4	48	157	1,12	49	10,84	0,01
NTT	2022M5	48	157	1,40	48	10,61	0,01
NTT	2022M6	49	163	1,71	48	10,57	0,01
NTT	2022M7	49	166	1,73	49	10,46	0,01
NTT	2022M8	49	188	2,27	49	10,51	0,01
NTT	2022M9	49	172	2,24	49	10,41	0,01
NTT	2022M10	49	170	2,05	49	10,50	0,01
NTT	2022M11	47	163	2,06	49	10,63	0,01
NTT	2022M12	47	177	2,04	47	10,71	0,01
Maluku	2018M7	15	377	7,45	15	8,14	0,06
Maluku	2018M8	15	382	4,43	15	7,63	0,06
Maluku	2018M9	15	381	4,45	15	7,50	0,06
Maluku	2018M10	15	380	3,51	15	12,43	0,06
Maluku	2018M11	15	362	3,69	15	7,54	0,06
Maluku	2018M12	14	384	2,92	15	7,72	0,06
Maluku	2019M1	15	391	3,58	14	7,69	0,06
Maluku	2019M2	15	400	3,48	15	7,82	0,06
Maluku	2019M3	15	402	3,55	15	7,67	0,06

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Maluku	2019M4	15	394	3,85	15	7,94	0,06
Maluku	2019M5	14	400	2,95	15	13,09	0,06
Maluku	2019M6	14	409	2,79	14	7,67	0,06
Maluku	2019M7	14	409	2,79	14	7,76	0,06
Maluku	2019M8	14	407	2,69	14	7,82	0,05
Maluku	2019M9	14	409	2,89	14	7,73	0,05
Maluku	2019M10	14	420	2,68	14	7,75	0,05
Maluku	2019M11	14	424	2,04	14	12,97	0,05
Maluku	2019M12	13	424	2,12	14	7,91	0,04
Maluku	2020M1	13	433	1,41	13	8,15	0,04
Maluku	2020M2	12	414	2,59	13	12,76	0,04
Maluku	2020M3	12	431	2,85	12	13,01	0,04
Maluku	2020M4	12	431	2,87	12	12,50	0,04
Maluku	2020M5	12	432	3,05	12	7,52	0,04
Maluku	2020M6	11	427	6,89	12	12,43	0,04
Maluku	2020M7	11	433	6,70	11	7,19	0,04
Maluku	2020M8	11	441	7,74	11	12,27	0,04
Maluku	2020M9	10	462	7,90	11	7,16	0,04
Maluku	2020M10	10	470	3,79	10	12,06	0,03
Maluku	2020M11	10	476	3,85	10	12,11	0,03
Maluku	2020M12	10	481	8,15	10	12,22	0,03
Maluku	2021M1	11	479	3,11	10	11,77	0,03
Maluku	2021M2	11	481	6,95	11	11,67	0,03
Maluku	2021M3	11	486	7,16	11	11,62	0,03
Maluku	2021M4	10	490	3,59	11	11,63	0,03
Maluku	2021M5	10	498	0,82	10	11,91	0,03
Maluku	2021M6	9	504	2,03	10	6,68	0,03
Maluku	2021M7	9	513	2,71	9	6,78	0,03
Maluku	2021M8	9	517	2,66	9	6,81	0,03
Maluku	2021M9	9	506	2,69	9	8,10	0,03
Maluku	2021M10	7	508	3,42	9	8,02	0,03
Maluku	2021M11	7	516	5,56	7	7,85	0,03
Maluku	2021M12	6	518	5,79	7	7,83	0,03
Maluku	2022M1	7	529	5,39	6	6,59	0,03
Maluku	2022M2	7	526	5,02	7	10,78	0,03
Maluku	2022M3	8	518	4,81	7	10,74	0,03
Maluku	2022M4	8	529	5,25	8	10,84	0,03
Maluku	2022M5	7	533	6,84	8	10,61	0,03
Maluku	2022M6	8	534	6,64	7	10,57	0,03
Maluku	2022M7	7	542	7,61	8	10,46	0,03
Maluku	2022M8	7	541	7,33	7	10,51	0,03
Maluku	2022M9	8	554	6,35	7	10,41	0,03
Maluku	2022M10	7	551	6,45	8	10,50	0,04
Maluku	2022M11	7	549	10,22	7	10,63	0,04
Maluku	2022M12	7	567	12,24	7	10,71	0,04
Papua	2018M7	96	597	3,04	120	8,14	0,04
Papua	2018M8	93	582	2,70	96	7,63	0,04
Papua	2018M9	139	630	2,63	93	7,50	0,04
Papua	2018M10	142	588	3,87	139	12,43	0,04
Papua	2018M11	141	592	4,58	142	7,54	0,04
Papua	2018M12	137	617	3,52	141	7,72	0,04
Papua	2019M1	161	633	3,50	137	7,69	0,04
Papua	2019M2	159	634	3,59	161	7,82	0,04
Papua	2019M3	157	635	3,17	159	7,67	0,04
Papua	2019M4	153	624	3,98	157	7,94	0,04
Papua	2019M5	150	625	3,85	153	13,09	0,04
Papua	2019M6	148	626	3,17	150	7,67	0,04
Papua	2019M7	147	624	3,17	148	7,76	0,04
Papua	2019M8	143	625	4,35	147	7,82	0,04
Papua	2019M9	141	624	1,94	143	7,73	0,04
Papua	2019M10	141	630	0,76	141	7,75	0,04
Papua	2019M11	140	640	0,72	141	12,97	0,04
Papua	2019M12	139	673	0,04	140	7,91	0,04
Papua	2020M1	137	680	0,43	139	8,15	0,03
Papua	2020M2	139	691	0,14	137	12,76	0,03
Papua	2020M3	137	698	0,17	139	13,01	0,03
Papua	2020M4	139	658	0,14	137	12,50	0,03
Papua	2020M5	134	665	0,48	139	7,52	0,03
Papua	2020M6	132	673	0,55	134	12,43	0,03
Papua	2020M7	131	687	0,50	132	7,19	0,03
Papua	2020M8	129	699	0,13	131	12,27	0,03
Papua	2020M9	128	691	10,53	129	7,16	0,02
Papua	2020M10	128	689	10,53	128	12,06	0,02
Papua	2020M11	127	712	10,62	128	12,11	0,02
Papua	2020M12	125	725	10,65	127	12,22	0,02
Papua	2021M1	130	734	10,50	125	11,77	0,02
Papua	2021M2	126	721	10,80	130	11,67	0,02
Papua	2021M3	124	726	11,04	126	11,62	0,02
Papua	2021M4	123	720	11,08	124	11,63	0,02
Papua	2021M5	109	745	0,00	123	11,91	0,02
Papua	2021M6	107	782	0,00	109	6,68	0,02
Papua	2021M7	63	727	0,13	107	6,78	0,02
Papua	2021M8	62	738	0,13	63	6,81	0,02
Papua	2021M9	61	742	0,13	62	8,10	0,02
Papua	2021M10	57	742	0,14	61	8,02	0,02
Papua	2021M11	57	761	0,14	57	7,85	0,02
Papua	2021M12	54	786	0,14	57	7,83	0,02
Papua	2022M1	36	807	0,22	54	6,59	0,01

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Papua	2022M2	36	799	0,22	36	10,78	0,01
Papua	2022M3	34	793	0,23	36	10,74	0,02
Papua	2022M4	34	807	0,82	34	10,84	0,02
Papua	2022M5	33	816	0,79	34	10,61	0,02
Papua	2022M6	31	812	0,25	33	10,57	0,02
Papua	2022M7	32	807	0,24	31	10,46	0,02
Papua	2022M8	31	822	0,25	32	10,51	0,02
Papua	2022M9	30	824	1,03	31	10,41	0,02
Papua	2022M10	29	808	0,27	30	10,50	0,02
Papua	2022M11	30	795	0,65	29	10,63	0,02
Papua	2022M12	29	918	0,27	30	10,71	0,02
Maluku Utara	2018M7	56	518	5,96	57	8,14	0,13
Maluku Utara	2018M8	55	436	6,03	56	7,63	0,13
Maluku Utara	2018M9	56	456	4,43	55	7,50	0,13
Maluku Utara	2018M10	56	452	3,05	56	12,43	0,13
Maluku Utara	2018M11	60	462	3,18	56	7,54	0,13
Maluku Utara	2018M12	59	490	3,11	60	7,72	0,13
Maluku Utara	2019M1	59	485	3,45	59	7,69	0,13
Maluku Utara	2019M2	58	487	5,54	59	7,82	0,13
Maluku Utara	2019M3	63	497	4,68	58	7,67	0,13
Maluku Utara	2019M4	64	489	4,98	63	7,94	0,13
Maluku Utara	2019M5	65	528	4,51	64	13,09	0,13
Maluku Utara	2019M6	64	540	4,04	65	7,67	0,13
Maluku Utara	2019M7	66	558	3,94	64	7,76	0,13
Maluku Utara	2019M8	65	561	2,48	66	7,82	0,13
Maluku Utara	2019M9	66	568	2,41	65	7,73	0,13
Maluku Utara	2019M10	68	572	2,29	66	7,75	0,13
Maluku Utara	2019M11	68	559	1,98	68	12,97	0,13
Maluku Utara	2019M12	69	571	1,56	68	7,91	0,13
Maluku Utara	2020M1	68	602	1,49	69	8,15	0,12
Maluku Utara	2020M2	66	622	1,34	68	12,76	0,12
Maluku Utara	2020M3	66	614	1,47	66	13,01	0,12
Maluku Utara	2020M4	66	659	1,87	66	12,50	0,11
Maluku Utara	2020M5	65	632	1,67	66	7,52	0,11
Maluku Utara	2020M6	63	689	1,73	65	12,43	0,11
Maluku Utara	2020M7	63	658	1,45	63	7,19	0,10
Maluku Utara	2020M8	64	706	1,25	63	12,27	0,11
Maluku Utara	2020M9	64	718	1,07	64	7,16	0,10
Maluku Utara	2020M10	64	729	1,05	64	12,06	0,09
Maluku Utara	2020M11	70	719	0,94	64	12,11	0,08
Maluku Utara	2020M12	72	715	0,94	70	12,22	0,08
Maluku Utara	2021M1	72	702	0,96	72	11,77	0,08
Maluku Utara	2021M2	72	753	0,94	72	11,67	0,08
Maluku Utara	2021M3	72	714	2,32	72	11,62	0,08
Maluku Utara	2021M4	70	716	2,37	72	11,63	0,08
Maluku Utara	2021M5	70	770	2,28	70	11,91	0,08
Maluku Utara	2021M6	69	793	1,73	70	6,68	0,08
Maluku Utara	2021M7	66	782	1,91	69	6,78	0,08
Maluku Utara	2021M8	70	816	2,28	66	6,81	0,08
Maluku Utara	2021M9	69	787	2,30	70	8,10	0,08
Maluku Utara	2021M10	71	800	2,37	69	8,02	0,08
Maluku Utara	2021M11	71	796	2,09	71	7,85	0,08
Maluku Utara	2021M12	75	787	2,17	71	7,83	0,08
Maluku Utara	2022M1	77	807	5,14	75	6,59	0,08
Maluku Utara	2022M2	77	901	4,96	77	10,78	0,08
Maluku Utara	2022M3	80	1.007	3,82	77	10,74	0,09
Maluku Utara	2022M4	81	1.015	3,68	80	10,84	0,09
Maluku Utara	2022M5	79	1.013	1,45	81	10,61	0,09
Maluku Utara	2022M6	82	1.039	1,48	79	10,57	0,09
Maluku Utara	2022M7	81	1.001	1,75	82	10,46	0,09
Maluku Utara	2022M8	83	1.077	1,97	81	10,51	0,09
Maluku Utara	2022M9	86	1.059	2,05	83	10,41	0,09
Maluku Utara	2022M10	91	1.155	1,89	86	10,50	0,09
Maluku Utara	2022M11	92	1.115	1,99	91	10,63	0,09
Maluku Utara	2022M12	96	1.020	1,88	92	10,71	0,09
Papua Barat	2018M7	42	318	15,79	44	8,14	0,07
Papua Barat	2018M8	41	319	18,98	42	7,63	0,07
Papua Barat	2018M9	41	315	21,98	41	7,50	0,07
Papua Barat	2018M10	35	315	8,74	41	12,43	0,07
Papua Barat	2018M11	35	314	5,12	35	7,54	0,07
Papua Barat	2018M12	34	343	2,13	35	7,72	0,07
Papua Barat	2019M1	34	354	10,92	34	7,69	0,07
Papua Barat	2019M2	33	350	7,20	34	7,82	0,07
Papua Barat	2019M3	32	356	7,62	33	7,67	0,07
Papua Barat	2019M4	32	348	7,77	32	7,94	0,07
Papua Barat	2019M5	29	344	2,43	32	13,09	0,07
Papua Barat	2019M6	28	343	11,87	29	7,67	0,07
Papua Barat	2019M7	27	349	2,75	28	7,76	0,07
Papua Barat	2019M8	27	355	7,42	27	7,82	0,07
Papua Barat	2019M9	26	352	2,73	27	7,73	0,07
Papua Barat	2019M10	25	364	2,62	26	7,75	0,07
Papua Barat	2019M11	25	367	2,17	25	12,97	0,06
Papua Barat	2019M12	25	404	2,06	25	7,91	0,06
Papua Barat	2020M1	26	430	0,18	25	8,15	0,06
Papua Barat	2020M2	27	420	5,30	26	12,76	0,05
Papua Barat	2020M3	30	414	5,48	27	13,01	0,05
Papua Barat	2020M4	29	418	0,77	30	12,50	0,05
Papua Barat	2020M5	29	419	5,63	29	7,52	0,05

Provinsi	Bulan	Pumkm	DPK	NPF umkm	Pumkm t-1	SBDKM	ISFI
Papua Barat	2020M6	27	424	0,75	29	12,43	0,05
Papua Barat	2020M7	26	421	2,90	27	7,19	0,05
Papua Barat	2020M8	26	423	3,45	26	12,27	0,05
Papua Barat	2020M9	25	422	3,51	26	7,16	0,05
Papua Barat	2020M10	22	424	3,90	25	12,06	0,04
Papua Barat	2020M11	22	429	4,01	22	12,11	0,04
Papua Barat	2020M12	21	463	6,58	22	12,22	0,04
Papua Barat	2021M1	24	474	5,24	21	11,77	0,03
Papua Barat	2021M2	23	475	6,11	24	11,67	0,03
Papua Barat	2021M3	22	457	3,98	23	11,62	0,03
Papua Barat	2021M4	21	460	4,16	22	11,63	0,03
Papua Barat	2021M5	19	458	0,77	21	11,91	0,03
Papua Barat	2021M6	19	446	0,79	19	6,68	0,03
Papua Barat	2021M7	17	448	0,00	19	6,78	0,03
Papua Barat	2021M8	26	459	0,00	17	6,81	0,03
Papua Barat	2021M9	22	453	0,00	26	8,10	0,03
Papua Barat	2021M10	19	450	0,00	22	8,02	0,03
Papua Barat	2021M11	17	455	0,00	19	7,85	0,03
Papua Barat	2021M12	16	481	0,00	17	7,83	0,03
Papua Barat	2022M1	15	485	0,00	16	6,59	0,03
Papua Barat	2022M2	15	483	0,89	15	10,78	0,03
Papua Barat	2022M3	15	466	0,00	15	10,74	0,03
Papua Barat	2022M4	14	460	0,89	15	10,84	0,03
Papua Barat	2022M5	14	452	0,93	14	10,61	0,03
Papua Barat	2022M6	13	438	0,93	14	10,57	0,03
Papua Barat	2022M7	13	448	0,94	13	10,46	0,03
Papua Barat	2022M8	13	426	0,00	13	10,51	0,03
Papua Barat	2022M9	13	425	0,00	13	10,41	0,03
Papua Barat	2022M10	12	415	0,00	13	10,50	0,03
Papua Barat	2022M11	11	425	0,00	12	10,63	0,03
Papua Barat	2022M12	11	451	0,00	11	10,71	0,03

Lampiran 11

Estimasi Regresi Data Panel

Common Effects Model

Dependent Variable: LOG(PUMKM)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/23 Time: 20:15

Sample: 2018M07 2022M12

Periods included: 54

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 1782

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.044813	0.018783	-2.385797	0.0171
LOG(DPK)	0.013637	0.003882	3.512898	0.0005
NPFUMKM	-0.000542	0.000733	-0.739001	0.4600
LOG(PUMKM_T_1)	0.991723	0.003336	297.2810	0.0000
SBDKM	-0.000376	0.001212	-0.310477	0.7562
Root MSE	0.108449	R-squared		0.996595
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared		0.996587
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression		0.108602
Akaike info criterion	-1.599455	Sum squared resid		20.95857
Schwarz criterion	-1.584064	Log likelihood		1430.115
Hannan-Quinn criter.	-1.593771	F-statistic		130014.9
Durbin-Watson stat	2.350482	Prob(F-statistic)		0.000000

Fixed Effects Model

Dependent Variable: LOG(PUMKM)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/23 Time: 15:54

Sample: 2018M07 2022M12

Periods included: 54

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 1782

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.239275	0.095474	-2.506189	0.0123
LOG(DPK)	0.116707	0.012462	9.364721	0.0000
NPFUMKM	-0.000513	0.000989	-0.518221	0.6044
LOG(PUMKM_T_1)	0.894730	0.010161	88.05953	0.0000
SBDKM	-0.001724	0.001191	-1.447037	0.1481

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.103953	R-squared	0.996871
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared	0.996807
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression	0.105049
Akaike info criterion	-1.648232	Sum squared resid	19.25665
Schwarz criterion	-1.534336	Log likelihood	1505.575
Hannan-Quinn criter.	-1.606167	F-statistic	15444.01
Durbin-Watson stat	2.188026	Prob(F-statistic)	0.000000

Random Effects Model

Dependent Variable: LOG(PUMKM)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/13/23 Time: 15:54
 Sample: 2018M07 2022M12
 Periods included: 54
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 1782
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.044813	0.018169	-2.466482	0.0137
LOG(DPK)	0.013637	0.003755	3.631700	0.0003
NPFUMKM	-0.000542	0.000709	-0.763993	0.4450
LOG(PUMKM_T_1)	0.991723	0.003227	307.3347	0.0000
SBDKM	-0.000376	0.001172	-0.320977	0.7483

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.105049	1.0000

Weighted Statistics			
Root MSE	0.108449	R-squared	0.996595
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared	0.996587
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression	0.108602
Sum squared resid	20.95857	F-statistic	130014.9
Durbin-Watson stat	2.350482	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.996595	Mean dependent var	6.177897
Sum squared resid	20.95857	Durbin-Watson stat	2.350482

Lampiran 12
Pemilihan Model

Hasil Uji F

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.819533	(32,1745)	0.0000
Cross-section Chi-square	150.920052	32	0.0000

Hasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	137.804764	4	0.0000

Model Terbaik adalah *Fixed Effect*

Lampiran 13

Uji Model *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji MRA: Persamaan 1

Dependent Variable: LOG(PUMKM)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/23 Time: 16:05

Sample: 2018M07 2022M12

Periods included: 54

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 1782

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.228511	0.093883	-2.434006	0.0150
LOG(DPK)	0.162293	0.013572	11.95802	0.0000
NPFUMKM	-0.003155	0.001030	-3.063832	0.0022
LOG(PUMKM_T_1)	0.870264	0.010469	83.12396	0.0000
SBDKM	-0.000739	0.001178	-0.627799	0.5302
LOG(ISFI)	0.087689	0.011225	7.812144	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.102180	R-squared	0.996977
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared	0.996913
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression	0.103288
Akaike info criterion	-1.681505	Sum squared resid	18.60556
Schwarz criterion	-1.564531	Log likelihood	1536.221
Hannan-Quinn criter.	-1.638304	F-statistic	15545.18
Durbin-Watson stat	2.120432	Prob(F-statistic)	0.000000

LOGISFI = sig

Uji MRA: Persamaan 2

Dependent Variable: LOG(PUMKM)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/23 Time: 16:03

Sample: 2018M07 2022M12

Periods included: 54

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 1782

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337409	0.146138	2.308842	0.0211
LOG(DPK)	0.142132	0.018058	7.870842	0.0000
NPFUMKM	-0.026569	0.003217	-8.259760	0.0000
LOG(PUMKM_T_1)	0.836066	0.011122	75.16986	0.0000
SBDKM	-0.001329	0.001161	-1.145171	0.2523
LOG(ISFI)	0.353759	0.060260	5.870514	0.0000
LOG(DPK)*LOG(ISFI)	-0.025868	0.007218	-3.583947	0.0003
NPFUMKM*LOG(ISFI)	-0.008826	0.001173	-7.525533	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.100256	R-squared	0.997090
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared	0.997025
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression	0.101400
Akaike info criterion	-1.717294	Sum squared resid	17.91121
Schwarz criterion	-1.594163	Log likelihood	1570.109
Hannan-Quinn criter.	-1.671819	F-statistic	15303.88
Durbin-Watson stat	2.062053	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 14

Model Terbaik

Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel berdasarkan hasil Uji MRA

Dependent Variable: LOG(PUMKM)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/23 Time: 16:03

Sample: 2018M07 2022M12

Periods included: 54

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 1782

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337409	0.146138	2.308842	0.0211
LOG(DPK)	0.142132	0.018058	7.870842	0.0000
NPFUMKM	-0.026569	0.003217	-8.259760	0.0000
LOG(PUMKM_T_1)	0.836066	0.011122	75.16986	0.0000
SBDKM	-0.001329	0.001161	-1.145171	0.2523
LOG(ISFI)	0.353759	0.060260	5.870514	0.0000
LOG(DPK)*LOG(ISFI)	-0.025868	0.007218	-3.583947	0.0003
NPFUMKM*LOG(ISFI)	-0.008826	0.001173	-7.525533	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.100256	R-squared	0.997090
Mean dependent var	6.177897	Adjusted R-squared	0.997025
S.D. dependent var	1.858970	S.E. of regression	0.101400
Akaike info criterion	-1.717294	Sum squared resid	17.91121
Schwarz criterion	-1.594163	Log likelihood	1570.109
Hannan-Quinn criter.	-1.671819	F-statistic	15303.88
Durbin-Watson stat	2.062053	Prob(F-statistic)	0.000000